

# **KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH**

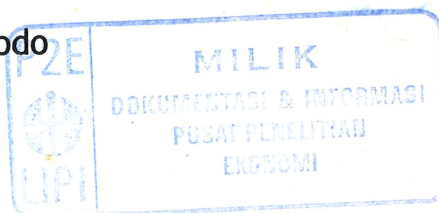
**KABUPATEN BANGKA  
PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Penulis :**

**YB. Widodo  
Daliyo  
Soewartoyo  
Sri Rahayu  
Tri Handayani**

**Penyunting :**

**YB. Widodo**



**Diterbitkan oleh :**

**Pusat Penelitian Kependudukan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Jakarta 2004**

DOKINFO  
PUSAT PENELITIAN EKONOMI  
(P2E) – LIPI

Tgl. Terima : 06 DEC 2004  
Hdh/Tkr/Beli : PPIC - LIPI  
No. Induk : 501-2004  
No. Klas : \_\_\_\_\_

YB. Widodo, et.al.

Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Konteks Otonomi Daerah di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung / YB. Widodo, Daliyo, Soewartoyo, Sri Rahayu, Tri Handayani.  
Jakarta: PPK-LIPI, 2004  
xiv, 129 hlm, 22 cm

Seri Penelitian PPK-LIPI No. 53/2004  
ISSN : 0852-9280

1. Ketenagakerjaan 2. Otonomi Daerah 3. Kepulauan Bangka Belitung  
I. Judul II. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Pusat Penelitian Kependudukan

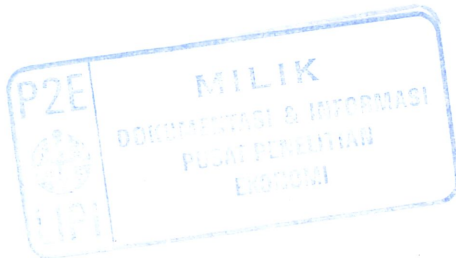
**KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANGKA, PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

YB. Widodo, Daliyo, Soewartoyo, Sri Rahayu, Tri Handayani

Desain isi : Sutarno

Desain sampul : Puji Hartana

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kependudukan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia







# KATA PENGANTAR

Penelitian tentang Kebijaksanaan Ketenagakerjaan Dalam Konteks Otonomi Daerah di Propinsi Kepulauan Bangka dan Belitung, merupakan salah satu penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK - LIPI) tahun 2003.

Kajian dalam studi ini berfokus kepada arah, strategi, dan proses kebijakan ketenagakerjaan pada penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Perencanaan tenaga kerja selama ini terutama pada masa orde baru masih bersifat *top down policies*, sehingga kebijaksanaan yang diambil kemudian tidak menunjukkan kebutuhan daerah yang sebenarnya. Perencanaan yang disusun belum mengakomodasi potensi daerah dan juga aspirasi daerah. Dalam arti umum *policy* diartikan sebagai *plan of action, statement of ideal*. Sedangkan kebijakan di sini lebih diartikan sebagai suatu pernyataan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, kelompok masyarakat maupun pengusaha dan lainnya.

Studi yang dilakukan PPK-LIPI pada tahun 2003 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbagai metoda pengumpulan data seperti wawancara mendalam dan diskusi terfokus dengan beberapa sumber informasi baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat serta observasi lapangan. Informasi awal juga didapat dari telaah dokumen yang berkaitan dengan fokus studi.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan dari berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, lembaga pemerintah dan swasta serta tokoh masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kerjasama tersebut. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada staf peneliti, teknisi serta semua pihak yang telah membantu demi selesainya tulisan ini.

Jakarta, Juni 2004  
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI

Dr. Ir Aswatini, MA



# KATA SAMBUTAN

Situasi dan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dewasa ini ditandai oleh kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah serta keterbatasan kerja produktif, sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi serta tingkat kesejahteraan sosial yang rendah. Kualitas sumberdaya manusia (SDM) rendah mengakibatkan produktifitas rendah dan tingkat pendapatan rendah. Kualitas SDM rendah juga kurang mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran terutama di kalangan tenaga terdidik bukan saja merupakan pemborosan ganda, akan tetapi juga menimbulkan masalah-masalah sosial. Untuk mendidik mereka telah dihabiskan cukup banyak waktu dan dana. Disamping itu, potensi yang seyogyanya dapat menghasilkan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat, justru menjadi beban sosial. Mereka menjadi beban bagi anggota yang bekerja, sehingga pengangguran terdidik lebih potensial untuk menimbulkan masalah sosial.

Oleh sebab itu, upaya membangkitkan perekonomian nasional serta daerah, disatu pihak diperlukan strategi penyiapan SDM profesional dan memenuhi standart kopetensi internasional. Di lain pihak, perlu disusun strategi perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan struktur perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan sekarang ini.

Upaya perluasan kesempatan kerja sangat bergantung pada strategi pengembangan ekonomi dan industri. Dalam hubungan ini, teori konvensional yang selalu dijadikan sebagai referensi adalah dengan memanfaatkan pasar dunia dan alokasi sumber - sumber secara optimal, setiap negara mengembangkan industri yang memiliki keunggulan komparatif untuk diproduksi ( comparative advantage).

Dilihat dari kondisi ekonomi dan sumber - sumber yang dimiliki, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif pada hasil-hasil pertanian, sumber daya laut dan hasil tambang, serta memanfaatkan sumberdaya manusia dalam jumlah besar. Dengan kata lain, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dengan mengembangkan:

- a. agro-industri atau industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, serta hasil hutan;
- b. industri yang memanfaatkan sumberdaya laut dan hasil-hasil tambang termasuk minyak, timah, tembaga dan batu bara;
- c. industri yang menggunakan banyak tenagakerja atau yang bersifat padat karya.

Indonesia yang mengandalkan sumber daya laut dan hasil tambang, atau yang biasa disebut dengan industri hulu, pada dasarnya membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi maju, dan sumberdaya manusia berkualitas tinggi. Hingga saat ini industri yang mengandalkan hasil laut belum dikembangkan. Dalam pemerintahan orde baru, industri yang mengandalkan hasil tambang telah dikembangkan secara intensif dengan dana investasi dan pinjaman luar negeri, serta penggunaan tenaga asing, akan tetapi manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat banyak.

Dibandingkan dengan industri yang mengandalkan sumber daya laut dan hasil tambang, agri-industri pada umumnya dapat dikembangkan dengan modal yang relatif kecil, teknologi yang relatif sederhana, dan tenagakerja yang relatif banyak. Oleh sebab itu, prioritas pengembangan agri-industri merupakan pilihan yang tepat, karena dapat memanfaatkan tenagakerja yang pada umumnya berkualitas relatif rendah, dan hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat banyak.

Buku ini berusaha memaparkan arah dan proses kebijakan ketenagakerjaan kabupaten Bangka propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu propinsi yang baru dibentuk setelah diberlakukan pelaksanaan otonomi daerah, tepatnya tahun 2000. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi dalam kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia akan mewarnai kajian disini.

Jumlah penduduk di propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 899.086 jiwa, dan di kabupaten Bangka sebesar 629.666

(BPS, Sensus Penduduk 2000). Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Bangka masih cukup tinggi. Dalam periode 1980 - 1990, penduduk Bangka telah bertambah dengan 2,54 persen setahun dan dalam periode 1990 - 2000 sebesar 1,96 persen. Ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat propinsi Bangka Belitung, yaitu 2,30 persen (1980-1990) dan 0,93 persen (1990-2000). Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di kabupaten Bangka, jumlah angkatan kerja tahun 2000 adalah 279.930 orang, dengan pendidikan pada umumnya masih rendah.

Penduduk usia 5 tahun ke atas di kabupaten Bangka pada tahun 2000 adalah 509.218 orang, dengan jumlah 217.928 orang atau 42,8 persen tidak tamat Sekolah Dasar; 35,7 persen tamat SD; hanya 11,2 persen tamat SLTP dan 9 persen tamat SLTA; 0,8 persen Lulusan Diploma atau Sarjana Muda serta 0,5 persen Sarjana. Tingkat pendayagunaan tenagakerja relatif masih rendah. Pada tahun 2000, jumlah tenagakerja sebesar 378.015 orang, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sebesar 279.930 orang, yang mencari pekerjaan berjumlah 7.098 orang atau 2,3 persen dari angkatan kerja, dinamakan penganggur terbuka.

Dengan kata lain kondisi sosial ekonomi penduduk di tingkat propinsi nampak tercermin pada tingkat kabupaten, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka selama 10 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,5 persen. Krisis ekonomi juga sempat melanda kabupaten tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi 3,3 persen pada tahun 1999 dan meningkat menjadi 6 persen pada tahun 2000, akibat peningkatan harga dan produksi hasil perkebunan (BPS & Bappeda, 2002). Pada tahun 2000 telah ada pemulihan ekonomi di kabupaten ini, meskipun tidak sebesar sebelum tahun 1997. Sektor ekonomi yang menonjol kontribusinya sebelum krisis (1996) adalah pertambangan (timah dan kuarsa) dan pengolahan, setelah krisis pada tahun 2000 nampaknya hanya sektor pertanian yang mampu bertahan, terutama subsektor perkebunan.

Kendati demikian sektor unggulan di Kabupaten Bangka dapat dijelaskan menurut indikator ekonomi, menunjukkan bahwa sektor pertanian di kabupaten Bangka termasuk didalamnya adalah perikanan dan perkebunan masih menjadi sektor unggulan yang dapat dikembangkan. Subsektor ini merupakan kegiatan ekonomi yang cukup tahan terhadap krisis ekonomi, terutama jenis

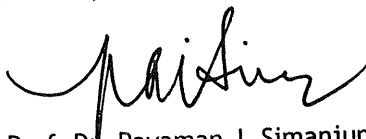
komoditas perkebunan yang pemasarannya ke luar negeri (ekspor), yaitu lada dan kelapa sawit. Pada masa krisis, sektor yang paling terpuruk sampai sekarang adalah pertambangan dan pengolahan. Oleh sebab itu perkebunan dan perikanan merupakan subsektor kabupaten akan terus dikembangkan sebagai substitusi sektor pertambangan timah yang sudah semakin menurun produksinya. Sebagai contoh usaha perkebunan kelapa sawit, selama ini telah beroperasi di Kabupaten Bangka dan telah dikembangkan seluas 51.122 ha, dengan cadangan areal secara keseluruhan seluas 147.375 ha. Selanjutnya yang perlu di usahakan, bagi propinsi Bangka Belitung, khususnya kabupaten Bangka adalah usaha agar dapat menarik Investor masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah sudah mengarah pada upaya pemanfaatan SDM lokal seperti membuka sementara tambang inkonvensional, agar dapat menyerap tenaga kerja. Disamping itu juga melakukan pelatihan ketrampilan khusus bagi para penganggur. Akan tetapi bila mengacu pada prinsip keberhasilan OTDA, strategi ini sangat tergantung pada pemerintah daerah dan lembaga terkait atas dasar prakarsa serta kreativitas dan peran aktif masyarakat itu sendiri.

Terbitnya buku "*Kebijakan ketenagakerjaan Dalam Konteks Otonomi Daerah Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*" yang ditulis oleh para peneliti bidang Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI, saya sambut dengan baik. Buku ini merupakan kajian ketenagakerjaan yang diolah berdasarkan hasil penelitian dari suatu daerah yang sedang mengembangkan konsep OTDA. Oleh sebab itu, selain dapat memperkaya khasanah pengetahuan, buku ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan, khususnya bagi Pemerintah Daerah kabupaten Bangka serta propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu saja buku ini masih perlu terus ditindaklanjuti dengan melakukan studi, agar memperoleh kelengkapan demi kesempurnaan dan lebih bermakna lagi.

Dengan demikian kehadiran buku ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam menyumbang bacaan ilmiah tentang ketenagakerjaan di Indonesia.

Jakarta, Juni 2004



Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU  
Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Bidang Sumberdaya Manusia.





# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
<b>BAGIAN PERTAMA</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
Oleh : YB. Widodo, Daliyo, Soewartoyo, Sri Rahayu, Tri Handayani	1
Latar Belakang	1
Review Kebijakan Ketenagakerjaan	6
Organisasi Penulisan	9
Daftar Pustaka	10
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
<b>POTENSI DAERAH DAN ISU KETENAGAKERJAAN</b>	11
Oleh : Tri Handayani dan Daliyo	
Seting Daerah	11
Potensi Sumber Daya Alam (SDA)	16
Pertanian dan Perkebunan	16
Hutan	23
Perikanan dan Peternakan	24
Pertambangan	26
Industri	30
Pariwisata	32
Potensi Sumber Daya Manusia	35
Jumlah dan Distribusi Penduduk	35
Pola Komposisi Penduduk	36
Mobilitas Penduduk	39
Angkatan Kerja	42
Potensi Sosial Budaya	44
Potensi Ekonomi	51
Daftar Pustaka	60
<b>BAGIAN KETIGA</b>	
<b>KETENAGAKERJAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH: Arah dan Strategi Kebijakan</b>	63
Oleh : YB. Widodo	
<b>KABUPATEN BANGKA PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	xi

	Pendahuluan	63
	Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pembangunan Daerah	65
	Arah dan Orientasi Kebijakan Pembangunan Daerah	71
	Strategi dan Implementasi	76
	Pihak terkait Dalam Ketenaga Kerjaan Daerah	80
	Penutup	82
	Daftar Pustaka	84
<b>BAGIAN KEEMPAT</b>	<b>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>87</b>
	Oleh : Soewartoyo dan Sri Rahayu	
	Pendahuluan	87
	Kebijakan Daerah Dalam Tata Organisasi Pemerintahan	90
	Mekanisme dan Proses Pembuatan Kebijakan	93
	Pemerintah Sebagai Unsur Pembuat Kebijakan	95
	Peranan DPRD	101
	Peran Dunia Usaha dan Masyarakat	106
	Penutup	113
	Daftar Pustaka	114
<b>BAGIAN KELIMA</b>	<b>RANGKUMAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>117</b>
	Oleh : Soewartoyo dan YB Widodo	
	Rangkuman	117
	Rekomendasi	121
<b>LAMPIRAN</b>		<b>125</b>

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 :	Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Sekolah Kabupaten Bangka, Tahun 2001	12
Tabel 2.2 :	Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya, Kabupaten Bangka 2001	13
Tabel 2.3 :	Jumlah Penduduk yang Menderita Sakit, Menurut Jenisnya, Kabupaten Bangka, Tahun 2001	14
Tabel 2.4 :	Tenaga Medis dan Para Medis, Kabupaten Bangka, Tahun 2001	15
Tabel 2.5 :	Jenis Perkebunan potensial di Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2000	21
Tabel 2.6 :	Jenis Bahan dan Luas Kawasan Tambang Kab. Bangka 1997/1998	27
Tabel 2.7 :	Ragam Industri Di Prop. Kep. Bangka Belitung, Tahun 2000	31
Tabel 2.8 :	Obyek Pariwisata di Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2000	33
Tabel 2.9 :	Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Prop. Kep. Bangka Belitung Menurut Daerah Tingkat II, Tahun 1990 dan 2000	36
Tabel 2.10 :	Struktur Penduduk Propinsi Bangka Belitung, Menurut Umur dan Jenis kelamin, Tahun 2000	37
Tabel 2.11 :	Truktur Penduduk Kab. Bangka Menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2000	38
Tabel 2.12 :	Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Penduduk Usia 5 tahun ke atas Kab. Bangka, Tahun 2000	39
Tabel 2.13 :	Penduduk Perkotaan dan Perdesaan, Tingkat urbanisasi Di Propinsi Bangka Belitung, Tahun 2000	40
Tabel 2.14 :	Status Migra Seumur Hidup di Prop. Bangka Belitung, Tahun 2000	41
Tabel 2.15 :	Angkatan kerja Propinsi Bangka Belitung menurut Daerah Tingkat II, Pedesaan/ Perkotaan dan Jenis Kelamin, Tahun 2000	43

Tabel 2.16 :	Penduduk Prop, Bangka Belitung Menurut Suku Bangsa, Tahun 2000	47
Tabel 2.17 :	Penduduk Propinsi Bangka Belitung Menurut Agama, Tahun 2000	48
Tabel 2.18 :	Lapangan Pekerjaan Penduduk Prop. Bangka Belitung, Tahun 2000	49
Tabel 2.19 :	Status Pekerjaan Utama Penduduk Prop. Bangka Belitung, Tahun 2000	50
Tabel 2.20 :	PDRB Kab. Bangka Atas Dasar harga Berlaku, Tahun 2000	53
Tabel 2.21 :	PDRB Kab. Bangka Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1996 dan 2000	54
Tabel 2.22 :	Lapangan Pekerjaan Prop. Bangka Belitung, Menurut Dati II, Tahun 2000	55
Tabel 2.23 :	Tata Guna Tanah Wilayah Prop. Bangka Belitung, Menurut Kabupaten, Tahun 2000.	57

# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

*Oleh : Tim Peneliti*

### Latar belakang

Selama tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru di Indonesia, strategi pembangunan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan adanya tuntutan politis pada waktu itu untuk menyehatkan ekonomi. Oleh karena itu, ukuran-ukuran keberhasilan mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Strategi pembangunan tersebut telah menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen pada tahun 80-an dan awal 90-an. Parameternya adalah peningkatan GNP per kapita. Pada waktu itu pembangunan sektor manufaktur (M) atau pengolahan telah menjadi tumpuan harapan dan kebanggaan untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun perkembangan sektor M tersebut belum memiliki landasan yang kuat baik dalam persediaan bahan baku, permodalan dan sumberdaya manusia. Perkembangan sektor manufaktur cukup menonjol dan nampak telah terjadi pergeseran sektor perekonomian (transisi) dari pertanian ke arah non-pertanian, termasuk sektor pengolahan tersebut. Namun sektor tersebut belum mampu menciptakan kesempatan kerja, akan tetapi yang terjadi adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai akibat pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (*economic growth*) dan kurang memperhatikan pemerataan (*economic equity*) (UNDP, 1990).

Dalam era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pertumbuhan sektor manufaktur telah melampaui pertumbuhan sektor pertanian. Selama 3 dasawarsa telah terjadi peningkatan sumbangan sektor manufaktur dari hanya sekitar 9 persen menjadi 26 persen pada tahun 2000. Sebaliknya sumbangan dari sektor pertanian telah terjadi penurunan dari 53 persen menjadi 17 persen pada tahun yang sama. Akan tetapi dalam kurun waktu yang sama, penurunan

proporsi tenaga kerja sektor pertanian relatif kecil yaitu dari 73 persen menjadi 45 persen (BPS, 2000). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia memang telah terjadi perubahan struktur perekonomian secara makro yang cukup berarti selama 3 dasawarsa. Namun transformasi struktur ekonomi tersebut belum mampu merubah struktur tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor M. Dampak dari pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan dengan sektor M yang lebih berorientasi pada padat modal (*capital intensive*), ternyata belum banyak menyerap tenaga kerja Indonesia yang melimpah dan bahkan yang terjadi adalah jumlah penganggur yang terus bertambah terutama sejak krisis ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi tersebut semakin diperparah sejak perekonomian Indonesia mengalami krisis multidimensi pada pertengahan tahun 1997 yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan utama yaitu penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran yang terus bertambah. Jika pada satu tahun sebelum krisis (1996) jumlah penganggur terbuka mencapai 4,3 juta orang atau 4,8 persen dari seluruh angkatan kerja, pada tahun 2000 diperkirakan meningkat menjadi 5,9 juta orang atau 6,1 persen. Dengan asumsi konservatif di mana tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar di bawah 5 persen serta tidak memperhitungkan kenaikan upah pekerja, diperkirakan tingkat pengangguran akan terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2003 sekitar 7,9 juta orang atau 7,8 persen (Bappenas, 2002). Dilain pihak, tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tantangan di bidang ketenagakerjaan baik di tingkat lokal maupun global. Hal tersebut berkaitan dengan isu rendahnya kualitas tenaga kerja baik dilihat dari tingkat pendidikan formal maupun keterampilan pekerja. Meskipun secara nasional tingkat pendidikan angkatan kerja di setiap wilayah mengalami peningkatan, namun mayoritas tenaga kerja masih tetap didominasi oleh mereka yang berpendidikan dasar.

Kegagalan pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pertumbuhan tersebut telah menyadarkan para pengambil keputusan negeri ini pada tahun-tahun terakhir untuk merubah orientasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih *pro-people* (pemerataan). Sehingga kegiatan ekonomi yang dikembangkan diharapkan lebih ke arah ekonomi kerakyatan, dengan lebih

mengembangkan sektor industri kecil dan menengah, yang selama ini dikenal sebagai sektor yang lebih ke padat tenaga kerja (*labour intensive*) daripada padat modal (*capital intensive*). Kehendak para pengambil keputusan di tingkat nasional tersebut tercermin dan tertuang di dalam PROPENAS tahun 1999.

Pada awal tahun 2000 merupakan era otonomi daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah salah satu tujuan utama adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk wilayah yang bersangkutan. Pembangunan dalam rangka otonomi daerah juga diharapkan mampu menggali dan memanfaatkan baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini sangat diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakatnya antara lain, lembaga swadaya masyarakat, kaum pengusaha, akademisi dan masyarakat pada umumnya. Partisipasi dapat berupa peran aktif dalam proses menyusun kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini merupakan proses demokratisasi yang dicanangkan semenjak era reformasi. Secara empirik terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi sebuah negara. (Umi Karomah, 2002). Terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh sistem demokrasi pada masyarakat tersebut. Dalam proses demokrasi tersebut perlu didukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi, namun secara kualitas dapat lebih menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberi kewenangan secara demokratis bagi daerah (*kabupaten / kota*) untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan dikembangkan di wilayahnya. Dalam kebijakan pembangunan ekonomi diharapkan lebih mengutamakan penggalan dan manfaat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia di wilayahnya. Di samping itu, juga membangun sektor-sektor yang lebih membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya baik bagi penduduk di wilayahnya maupun penduduk di sekitarnya.

Dari studi tentang perencanaan tenaga kerja menunjukkan bahwa perencanaan tenaga kerja selama ini masih bersifat *top-down policy*. Dalam perencanaan tersebut berlaku program dengan parameter yang bersifat seragam, serta kurang diperdayakan aparat

ketenagakerjaan di daerah (Puslitbang Tenaga Kerja, 2002). Disamping itu kendala dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja adalah kesenjangan persepsi, visi, kelembagaan, pembiayaan dan sarana, sebagai akibat dari lemahnya sosialisasi, persiapan dan proses perencanaan bidang ketenagakerjaan.

Politik pembangunan Indonesia sepanjang era Orde Baru lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi tinggi, yang dipercaya dapat menciptakan kesempatan kerja sebagai efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*). Data empiris menunjukkan bahwa meskipun pembangunan berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, namun kurang berhasil memenuhi hak warga negara terhadap pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran, berbagai ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat, baik di desa maupun di kota serta meningkatnya kemiskinan terutama sesudah krisis ekonomi, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan selama ini bersifat semu. Permasalahannya adalah apakah dengan OTDA, kewenangan daerah dalam bidang sosial, ekonomi dan politik, dapat mengarahkan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga dapat lebih memenuhi hak bagi masyarakat, terutama yang terkait dengan peluang kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah.

Selama masa Orde Baru, kebijakan pembangunan cenderung sentralistik, otoriter dan *top down*, sehingga daerah terbiasa mengambil peran sebagai lokomotif daripada peran sebagai fondasi. Sebaliknya dengan OTDA, daerah dituntut untuk lebih mampu mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Permasalahannya adalah apakah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, daerah juga mengakomodasi potensi sumberdaya (SDA dan SDM) yang dimilikinya secara berkelanjutan. Dengan kelebihan dan kekurangan OTDA, isu apakah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Sejak runtuhnya Orde Baru, reformasi politik mengamanatkan adanya demokratisasi dalam setiap aspek pembangunan termasuk pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ekonomi yang diharapkan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, ditengarai antara lain dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam produktivitas usaha, baik pada tingkat



perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Permasalahannya adalah apakah masyarakat juga memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam proses menentukan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya ?

Pusat Penelitian Kependudukan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) pada tahun 2003 melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuat kajian terhadap kebijakan ketenagakerjaan dalam kaitan dengan otonomi daerah. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah; (1) melakukan kajian terhadap potensi dan isu pokok yang berkaitan dengan penentuan kebijakan ketenagakerjaan, (2) mengkaji arah dan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di propinsi Kepulauan Bangka Belitung serta (3) mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat memberikan informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dalam penciptaan/perluasan kesempatan kerja dalam konteks otonomi daerah, serta dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

Data primer yang dikumpulkan meliputi; (1). Informasi tentang isu ketenagakerjaan dan persepsi terhadap kebijakan ketenagakerjaan di daerah. (2). Informasi tentang proses pengambilan keputusan kebijakan di daerah. Di samping itu, juga mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari BPS tingkat Dati I dan Dati II, dan Instansi terkait.

Sumber informasi diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan (1). Para penyelenggara pemerintah daerah atau instansi yang dipilih; (2). Pengusaha/Asosiasi Pengusaha; (3). Kelompok masyarakat yang terdiri dari asosiasi profesional, akademisi, LSM, tokoh masyarakat. Dalam penentuan informan tersebut, dipilih secara *purposive*, yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan pengetahuan informasi tentang kebijakan ketenagakerjaan serta isu ketenagakerjaan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta dianalisis secara deskriptif analisis. Analisis kualitatif memberikan deskripsi peranan pemerintah daerah dalam mendorong penciptaan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan di daerahnya, serta dapat menjelaskan peran dan persepsi unsur kelembagaan lain di daerah (dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi) terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Analisa kuantitatif dengan mengukur besaran-besaran ekonomi, kependudukan, angkatan kerja dan jumlah pengangguran yang menjadi bahan data analisis dalam penelitian ini. Data tersebut nantinya dapat dijadikan tolak ukur dan prediksi keberhasilan proses pembangunan di daerah penelitian, seperti pengukuran pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja dan lainnya.

## Review Kebijakan Ketenagakerjaan

Arah kebijakan pembangunan terkait dengan strategi pembangunan di antaranya adalah pertumbuhan, pemerataan dan kesinambungan. Strategi pertumbuhan yang cenderung meninggalkan aspek *equity* seperti yang selama ini terjadi telah terbukti berimplikasi pada besarnya pengangguran. Di sisi lain, untuk mengejar besaran pertumbuhan dimungkinkan dapat mengeskplotasi sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan kelangsungan potensi yang tersedia.

Pengamatan di banyak negara berkembang, proses pembangunan melalui mekanisme industrilalisasi telah terjadi '*lompatan ke depan*' dan meninggalkan tahapan-tahapan pembangunan yang seharusnya dilalui. Mekanisme kebijakan pembangunan yang mentargetkan pertumbuhan tertentu, tanpa melihat kondisi dan kemampuan suatu negara yang bersangkutan, berakibat terjadinya *gap* yang besar antar sektor, terutama antara sektor manufaktur dan pertanian. Demikian pula biasanya laju pertumbuhan sektor manufaktur lebih tinggi dari pada proses penyerapan tenaga kerja, sedangkan pada sektor pertanian laju pertumbuhannya menurun lebih cepat dari pada proses penyerapan tenaga kerja. Kenyataan tersebut terjadi di Indonesia, di mana kondisi pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak

menyebabkan terjadinya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang berarti dan tidak proporsional dengan jumlah investasi yang ditanamkan (Sritua Arief, 1998).

Secara teoritis, strategi pembangunan yang dikembangkan sangat dipengaruhi oleh berbagai pendekatan yang ada. Teori neoklasik telah mempengaruhi kebijakan ekonomi baik negara maju maupun negara berkembang, meyakini keunggulan-keunggulan sosial ekonomi sistem kapitalis yang membenarkan pemilikan sumber daya alam oleh swasta dan alokasinya melalui pasar bebas. Negara-negara yang telah menerapkan varian neo klasik ini seringkali berhasil mencapai peningkatan GNP, tetapi biasanya diikuti oleh pengorbanan sosial yang besar. (Clements, 1997:32). Sementara itu teori strukturalis yang mengakui pentingnya akumulasi modal atau pertumbuhan yang cepat sebagai motor pembangunan, di pihak lain juga beranggapan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan hambatan besar dalam pembangunan. Oleh karena itu teori strukturalis mengetengahkan adanya pengaruh positif redistribusi pendapatan terhadap pembangunan.

Berbeda dengan faham struktural dan neo klasik, teori pembangunan Marxis dan Neo Marxis menjadikan ekonomi dunia atau sistem kapitalis global sebagai unit analisis utama. Salah satu preposisi dari pendekatan ini adalah adanya hubungan eksploitatif antara negara kaya (maju) dan negara miskin (terbelakang), bahkan terjadi ketergantungan terus-menerus yang telah terstruktur dari negara-negara miskin terhadap negara maju. Preposisi lain dalam tingkatan yang lebih rendah yaitu pada tingkat nasional, adalah adanya kelas-kelas dominan di tingkat pusat dalam suatu negara yang tumbuh dengan mengorbankan kelas-kelas atau wilayah-wilayah di bawahnya, dengan cara mengambil ketersediaan sumber-daya di wilayah atau daerah (Clements, 1997; Muhaimin, 1991).

Melihat peluang otonomi daerah, maka setiap daerah akan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dan digunakan sebagai modal pembangunan. Reorientasi pembangunan berkaitan dengan politik ketenagakerjaan akan menjadi isu strategis di daerah sebagai evaluasi pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan. Orientasi pembangunan yang terlalu *bias* kota, padat modal dan lebih ke arah pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan melalui peningkatan pendapatan dan penyerapan

tenaga kerja tidak kondusif terhadap kelangsungan pembangunan di daerah.

Politik/kebijakan ketenagakerjaan pada hakekatnya berkaitan dengan kebijakan ekonomi di daerah yang meliputi arah, strategi, dan proses yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pasar kerja, terdiri dari sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja (*supply dan demand side*), serta berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja, sehingga hipotesa yang digunakan adalah kebijakan baik ketenagakerjaan maupun ekonomi di tingkat nasional serta kebijakan tingkat lokal (daerah otonom) yang mempertimbangkan keseimbangan pasar kerja yang akan mendorong keseimbangan pasar kerja dan mendayagunakan sumber daya manusia. Sementara itu, diberlakukannya otonomi daerah secara langsung akan mendorong keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan strategi kebijakan pembangunan khususnya dalam perluasan kesempatan kerja. Pemikiran tersebut sejalan dengan maksud penelitian yang akan dilakukan, yaitu sejauh mana daerah telah mempersiapkan dan merencanakan proses pembangunan sekarang dan yang akan datang khususnya di bidang ketenagakerjaan yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja.

Struktur ekonomi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih bersifat agraris membuat angkatan kerja yang tersedia kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam lapangan kerja yang lebih produktif di luar sektor pertanian. Padahal ketersediaan lapangan kerja yang produktif akan membantu mengurangi angka beban tanggungan keluarga.

Dengan struktur ekonomi seperti tersebut di atas, jelas bahwa pengangguran terbuka maupun setengah penganggur masih akan menjadi masalah utama bidang kependudukan di Propinsi Bangka Belitung. Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menanggulangi masalah tersebut demi terciptanya kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

## Organisasi Penulisan

Buku ini didasarkan pada hasil penelitian di propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengambil studi khusus di kabupaten Bangka. Dalam buku ini telah mengupas strategi dan proses kebijakan ketenagakerjaan setelah otonomi daerah dilakukan tahun 2000. Propinsi Bangka Belitung adalah propinsi yang berada di Indonesia bagian barat dan merupakan salah satu propinsi yang baru dibentuk setelah kebijakan otonomi daerah. Pilihan ini di ambil dengan harapan dapat melihat kesiapan daerah, terutama bidang ketenagakerjaan dalam mengelola sumber daya alam maupun sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut.

Uraian dalam buku ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang arah kebijakan pembangunan terkait dengan strategi pembangunan di antaranya adalah pertumbuhan, pemerataan dan kesinambungan. Bagian kedua menerangkan potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Bagian ke tiga menjelaskan tentang arah dan strategi ketenagakerjaan dan pembangunan, yang dilakukan oleh pemerintahan setempat. Pada bagian ke empat menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan ketenagakerjaan. Pada hakekatnya kaitan kebijakan ekonomi di daerah meliputi arah, strategi, dan proses yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pasar kerja, serta berpengaruh terhadap penciptaan kesempatan kerja, sehingga hipotesa yang digunakan adalah kebijakan baik ketenagakerjaan maupun ekonomi di tingkat nasional serta kebijakan tingkat lokal (daerah otonom) yang mempertimbangkan keseimbangan pasar kerja yang akan mendorong keseimbangan pasar kerja dan mendayagunakan sumber daya manusia. Sementara itu, diberlakukannya otonomi daerah secara langsung akan mendorong keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah dan strategi kebijakan pembangunan khususnya dalam perluasan kesempatan kerja. Pemikiran tersebut sejalan dengan maksud penelitian yang akan dilakukan, yaitu sejauh mana daerah telah mempersiapkan dan merencanakan proses pembangunan sekarang dan yang akan datang khususnya di bidang ketenagakerjaan yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan pendayagunaan tenaga kerja.

## Daftar Pustaka

- Arief, Sritua (1998),  
Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Bandung: Zaman  
Wacana Mulia, 1998.
- Bappenas (2002),  
Kebijakan Kesempatan Kerja: Dampak Krisis Ekonomi  
Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja. Laporan Hasil  
Penelitian Bappenas - Semeru, Jakarta: Bappenas
- Biro Pusat Statistik (2000)  
Indikator Ekonomi Indonesia, BPS. Jakarta.
- Chennery (1999)  
Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta; UGM Press.
- Daliyo, dkk (2000),  
Pengembangan Ketenagakerjaan Subsektor Agroindustri  
Kalimantan Timur, Jakarta: PPK - LIPI.
- Kartasasmita, Ginanjar (1997)  
Pembangunan Nasional : memadukan pertumbuhan dan  
pemerataan, jakarta: CIDES.
- Mubyarto (2001)  
Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia: Pasca  
Krisis Ekonomi, Yogyakarta: BPFPE.
- Muhaimin, Yahya (1990)  
Kapitalisme Semu di Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES.
- Square, Lynn (1983)  
Labor Force Policy in Developing Country, World Bank  
Publisher, dalam terjemahan Kebijakan Kesempatan Kerja  
di Negara-negara Berkembang, Jakarta: UI Press.
- Umi Karomah Y, (2002)  
Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Pelajaran  
Krisis Asia, *Masyarakat Indonesia - LIPI*, xxviii, no 2, Tahun  
2002.

## BAGIAN II

# POTENSI DAERAH DAN ISU KETENAGAKERJAAN

*Oleh: Tri Handayani dan Daliyo*

### Seting Daerah

Secara geografis Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak antara  $104^{\circ} 50'$  -  $109^{\circ} 30'$  BT dan  $0^{\circ} 50'$  -  $04^{\circ} 10'$  LS, yang terbentang dari barat laut sampai Tenggara. Luas wilayah mencapai  $81.724,74 \text{ km}^2$ . Luas daratan mencapai  $16.423,74 \text{ km}^2$  atau sekitar 20,1 persen seluruh luas wilayah. Sedangkan luas perairan sebesar  $65.301 \text{ km}^2$  atau 79,9 persen dari luas wilayah. Batas wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelah barat berbatasan dengan daratan timur Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Pulau Karimata, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi tiga kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang yang merupakan pusat pemerintahan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka sebagai lokasi studi ini secara geografis terletak antara  $1^{\circ} 20'$  -  $3^{\circ} 7'$  LS dan  $105^{\circ}$  -  $107^{\circ}$  BT, yang terbentang dari Barat Laut sampai Tenggara sepanjang lebih kurang 180 km. Luas wilayah Kabupaten Bangka lebih kurang  $1.153.414,2 \text{ ha}$  atau  $11.534,142 \text{ km}^2$  (Pemprop Kepulauan Bangka Belitung, 2002: 2-4).

Dalam hal sarana dan prasarana, Kabupaten Bangka telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Adapun sarana dan prasarana tersebut meliputi sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, perbankan, air bersih dan listrik. Kesemua sarana tersebut merupakan kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, serta untuk pengembangan wilayah.

Di bidang pendidikan, Kabupaten Bangka telah memiliki sarana pendidikan dari SD hingga Perguruan tinggi. Di kabupaten ini telah tersedia 501 sekolah SD/MI, 103 SLTP/MTs, 36 sekolah tingkat

SLTA/MA. Dihitung dari rasio jumlah murid dan jumlah sarannya sebagian besar jumlah sarana pendidikan di kabupaten ini dapat dikatakan memadai, tanpa memperhatikan seberapa jauh distribusi atau jangkauan dari para siswa terhadap sekolah tersebut. Semua rasio jumlah murid terhadap jumlah guru sudah cukup baik, hampir semuanya telah di bawah 25. Rasio murid terhadap jumlah kelas untuk SMEA dan SMIP sudah cukup baik, yakni 31 dan 32. Sebaliknya khusus untuk SMU ternyata rata-rata rasio murid terhadap kelas ternyata sudah cukup tinggi, yakni 39, sehingga masih sangat memerlukan tambahan jumlah kelas di tingkat SMU tersebut. Kecuali SMU, SMEA dan SMIP tidak tersedia data jumlah kelas.

**Tabel 2.1:**  
**Jumlah Sekolah, Kelas, Guru, Murid dan Rasio**  
**Murid/Sekolah, Murid/Guru serta Murid/Kelas**  
**Di Kabupaten Bangka, Tahun 2001**

Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Kelas	Jumlah Murid	Rasio		
					Murid/ Sek	Murid/ Guru	Murid/ Kelas
Sek Dasar	481	3 643	-	85 486	178	23	-
MI	20	165	-	2 271	113	14	-
SLTP	71	1 654	-	20 517	289	12	-
MTs	32	438	-	3 171	99	7	-
SMU	25	502	198	7 697	308	15	39
MA	11	180	-	1 098	100	6	-
STM	3	58	-	597	199	10	-
SMEA	9	220	79	2 431	270	11	31
SMIP	1	24	5	159	159	6	32

Sumber : Diolah dari data Kab. Bangka Dalam Angka, 2001.

Tanda (-) berarti tidak tersedia data.

Untuk mendukung program kepariwisataan di kabupaten ini telah dibangun satu SMIP (Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata), meskipun statusnya masih swasta. Namun hasil lulusannya telah dimanfaatkan oleh sektor-sektor di pariwisata, seperti perhotelan. Untuk mendukung program pengembangan pertanian dan perkebunan telah didirikan satu perguruan tinggi STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian) Bangka. Sekolah tinggi tersebut masih merupakan prakarsa swasta dan belum menghasilkan sarjana karena baru berusia 3 tahun. Namun dengan terpilihnya pertanian dan perkebunan sebagai program unggulan daerah Kabupaten Bangka, sekolah tersebut diharapkan dapat menyediakan sumber daya manusianya. Di kabupaten ini juga sudah ada satu Politeknik Manufaktur yang diselenggarakan oleh PT Timah. Lembaga ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pengembangan manufaktur



atau industri, antara lain industri yang terkait dengan pengolahan sumber daya alam tambang (timah, kaolin dan kuarsa) dan sumber daya laut serta sumber daya pertanian dan perkebunan.

Selain sarana pendidikan, tampaknya sarana kesehatan belum cukup memadai. Hal ini terefleksi dari rasio antara jumlah sarana kesehatan dengan jumlah penduduk yang harus dilayaninya. Di Kabupaten Bangka telah tersedia satu Rumah Sakit Umum (RSU) untuk melayani sekitar 625 666 orang. Juga telah tersedia 107 Puskesmas, yang terdiri dari 27 Puskesmas utama dan 80 Puskesmas Pembantu. Rasio penduduk terhadap Puskesmas adalah 5 847 orang/ Puskesmas, artinya tiap satu Puskesmas rata-rata harus melayani sekitar 5 847 orang. Jumlah Apotek di kabupaten ini hanya ada 4, jadi tiap satu apotek harus melayani sekitar 156 416 orang. Di daerah ini juga telah ada 49 orang dokter praktek swasta, jadi setiap satu dokter melayani sekitar 12 768 orang. Suatu rasio yang masih cukup kecil. Jumlah bidan praktek swasta sebanyak 48 orang, sehingga setiap satu bidan melayani sekitar 3 271 orang wanita usia 15-50 tahun, jadi rasionya masih cukup kecil.

**Tabel 2.2:**  
**Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya**  
**Kabupaten Bangka, Tahun 2001**

Jenis	Jumlah	Rasio Orang/Sarana
Rumah Sakit Umum (RSU)	1	625 666 orang/ RS
Rumah Sakit Jiwa	1	-
BKIA	3	-
Puskesmas	27	5 847 orang/Puskesmas
Puskesmas Pembantu	80	-
Apotik	4	156 416 orang/Apotek
Balai Pengobatan Swasta	10	-
BKIA Swasta	7	-
Dokter praktek swasta	49	12 768 orang/Dokter
Bidan praktek swasta	48	3 271 orang wanita (15-50)/Bidan
Tukang gigi swasta	10	-

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2002.

Dengan melihat rasio antara penduduk yang dilayani dan sarana kesehatan yang ada, jumlah sarana kesehatan di kabupaten ini masih perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut perlu dilakukan sebab dengan tersedianya berbagai sarana kesehatan yang memadai diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit yang timbul di masyarakat. Berdasarkan data yang ada tahun 2001, persentase terbesar (20 persen) penyakit yang diderita masyarakat adalah infeksi akut lain pada SPBA, diikuti kemudian penyakit malaria klinis sekitar 9 persen dan penyakit lain pada SPBA sebesar 7,7 persen. Dari data tersebut juga terlihat, bahwa hampir 43 persen penduduk menderita “penyakit lain-lain”, tapi sayang tidak ada informasi lebih lanjut. Secara rinci 9 jenis penyakit terbanyak yang diderita penduduk Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3:**  
**Jumlah Penduduk Yang Menderita Gangguan**  
**Kesehatan Dirinci 9 Jenis Penyakit Terbanyak**  
**Kabupaten Bangka, Tahun 2001**

Jenis Penyakit	Jumlah	Persen
Infeksi akut lain pada SPBA	61.413	19,7
Malaria klinis	27.611	8,9
Penyakit lain pada SPBA	24.076	7,7
Penyakit kulit infeksi	14.521	4,7
Penyakit tekanan darah tinggi	14.312	4,6
Diare	14.117	4,5
Penyakit kulit alergi	12.679	4,1
Asma	9.421	3,0
Penyakit lain-lain	132.890	42,7
<b>Total</b>	<b>311.040</b>	<b>100,0</b>

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2002:95.

Membicarakan sarana kesehatan, tidak dapat terlepas dari sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan. Adapun SDM bidang kesehatan tersebut meliputi tenaga medis, tenaga para medis baik perawat kesehatan maupun non perawat kesehatan. Secara keseluruhan ada sebanyak 61 tenaga medis, 347 tenaga para medis perawat kesehatan dan 46 tenaga para medis non perawat kesehatan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4:**  
**Tenaga Medis dan Para medis**  
**Kabupaten Bangka, Tahun 2001**

Tenaga Bidang Kesehatan	Keterangan	
♦ Tenaga Medis	Dokter umum Dokter gigi Sarjana Kesehatan Apoteker ASS	28 11 10 1 11
♦ Tenaga para medis perawat kesehatan menurut pendidikan	Akper SPPM SPK Perawat Gigi Bidan Akademi Bidan SPKU SPAG LCPK	23 4 83 19 60 4 18 10 65
♦ Tenaga para medis non perawat kesehatan menurut pendidikan	APK ARZI SPPH	14 7 25

Sumber: BPS Kabupaten Bangka, 2002: 96.

Dengan memperhatikan SDM bidang kesehatan tersebut tampaknya belum memadai, namun demikian untuk lebih meningkatkan kesehatan penduduk perlu kiranya diusahakan tersedianya dokter-dokter spesialis, seperti dokter mata, dokter penyakit dalam serta dokter kandungan. Karena dengan tersedianya dokter-dokter spesialis tersebut, diharapkan dapat menekan macam-macam penyakit yang timbul serta dapat menekan angka kematian.

Dalam hal sarana transportasi, di Kabupaten Bangka telah tersedia sarana transportasi darat, laut maupun udara. Di bidang perhubungan darat, saat ini perhubungan darat telah mampu menghubungkan daerah-daerah yang ada melalui jalan raya dengan panjang jalan 1.096,16 Km. Sebagian besar jalan, sekitar 90 persen dalam kondisi baik dan sedang. Sementara itu di bidang transportasi laut, Kabupaten Bangka telah memiliki 4 unit pelabuhan laut yang melayani pengangkutan penumpang dan barang. Adapun keempat pelabuhan laut tersebut adalah Pelabuhan Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan dan Mentok. Sedangkan pelabuhan udara yang melayani

angkutan udara dari dan ke Kabupaten Bangka saat ini adalah Pelabuhan Udara Depati Amir yang berlokasi di Kecamatan Pangkalan Baru.

Sementara itu dalam hal komunikasi, di Kabupaten Bangka telah dilayani oleh PT Telkom, yang hingga tahun 2000 telah ada 39 warung telekomunikasi, dengan jumlah pelanggan sebanyak 5.662 dan telepon umum tersedia sebanyak 202. Untuk kepentingan perbankan, ada 6 unit yang terdiri dari 4 unit bank pemerintah dan 2 unit bank swasta. Sarana lain yang tidak kalah pentingnya adalah air bersih dan listrik. Untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Bangka dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Adapun jumlah air minum yang disalurkan saat ini berjumlah 1.974.680 m<sup>3</sup> dengan jumlah pelanggan sebanyak 39.295. Apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang lebih dari 100 000, maka baru sepertiganya yang menikmati air dari PDAM. Sedangkan untuk melayani kebutuhan listrik, telah tersedia 7 unit pembangkit listrik tenaga disel. Jumlah VA tersambung sebanyak 73.269.026 VA dengan kapasitas produksi sebesar 133.439.555 Kwh (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2002: V-5).

## **Potensi Sumber Daya Alam (SDA)**

Potensi SDA dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu SDA yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) dan SDA yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Di Kabupaten Bangka, SDA yang tidak dapat diperbaharui yang utama adalah tambang timah dan kaolin. Sedangkan SDA yang dapat diperbaharui adalah pertanian dan perkebunan, hutan, perikanan dan peternakan serta pariwisata. Potensi-potensi tersebut belum banyak dimanfaatkan dan dikembangkan. Secara rinci potensi SDA di Kabupaten Bangka sebagai berikut.

## **Pertanian dan Perkebunan**

Sejak akhir abad ke 19, daerah Bangka yang merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat terkenal sebagai daerah penghasil utama lada putih dunia, yang lebih dikenal

dengan “*Muntok White Pepper*” sebagai merek dagang internasional. Nama Muntok White Pepper diambil dari nama salah satu pelabuhan ekspor lada yang ada di Bangka yaitu Muntok. Pada awal abad ke 20, usaha lada putih ini menyebar hingga ke Belitung. Hingga sekarang, lada merupakan penghasilan utama rakyat kepulauan Bangka dan Belitung. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memasok sekitar 70 persen (35.000-40.000 ton per tahun) dari pasaran lada putih dunia. Sementara itu, kebutuhan akan lada putih dunia pada tingkat sekarang mencapai sekitar 75.000 ton per tahun. Adapun luas perkebunan lada penduduk mencapai 49.525 Ha atau 3 persen luas daratan Kepulauan Bangka Belitung, padahal potensi lahan yang memungkinkan untuk perkebunan lada di Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 237.500 Ha atau 14,8 persen dari luas daratan Kepulauan Bangka Belitung (Pemerintah Prop. Kepulauan Bangka Belitung, PROPEDA Tahun 2002-2006). Jadi untuk pengembangan perkebunan lada di Kabupaten Bangka masih sangat terbuka.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang (Bangka Pos, 4 Juni 2003), bahwa lada putih merupakan komoditi ekspor unggulan dan andalan, sebab lada putih masih diminati oleh negara-negara berkembang sebagai bahan baku utama untuk minuman keras, obat-obatan dan pengawet daging. Oleh sebab itu, lada merupakan komoditi potensial yang harus terus dikembangkan. Lebih lanjut, Ramlan menyarankan tiga hal supaya lada masih menjadi komoditi andalan dan unggulan Babel, yaitu membentuk budaya kerja baru dan mencari pasar baru, meningkatkan kualitas lada putih Babel dan memperbaiki sistim pemasaran lada putih tersebut.

Namun demikian, walaupun lada merupakan andalan bagi Kabupaten Bangka khususnya dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, namun saat ini menghadapi kendala yang cukup serius. Hal tersebut karena harga lada putih terus merosot sehingga semakin merugikan petani karena nyaris tak sebanding dengan biaya produksi. Harga lada di tingkat petani di Pulau Bangka, sebesar Rp 15.000 - Rp 16.500,- per kilogram. Sementara di tingkat pedagang pengumpul kota Rp 17.000 - 17.500,- per kilogram. Padahal awal Januari 2003, harga di tingkat petani di atas Rp 20.000,- per kilogram. Menurut penuturan seorang informan SWD yang orang tuanya sebagai pedagang pengumpul lada mengatakan, bahwa “... *harga jual lada bisa dihitung impas dengan modal dan perawatan*

*paling enggak Rp 20.000,- per kilogram*". Masih menurut informan, *"...perdagangan lada putih semakin mirip pola perjudian yaitu, satu hari harga lada bisa naik turun tiga kali. Kita jadi kayak penjudi, bergantung nasib"*. Keluhan tentang harga lada yang cenderung merosot dan berpotensi dipermainkan pembeli bermodal besar juga dikeluhkan oleh Ketua Asosiasi Masyarakat Lada Putih Indonesia.

Menurut Sekretaris AELI (Asosiasi Eksportir Lada Indonesia), harga lada menurun antara lain disebabkan perubahan musim dan nilai dollar. Saat ini, faktor yang menyebabkan turunnya harga lada adalah karena saat ini di negara-negara yang mengalami empat musim sedang mengalami musim panas, sehingga mereka belum terlalu memerlukan lada. Kalau musim dingin mereka memerlukan lada sebagai bahan baku pembuatan makanan dan minuman penghangat tubuh, jadi wajar kalau harga lada belum meningkat. Selain itu, anjloknya dollar juga ada pengaruhnya terhadap penurunan harga lada (Bangka Pos 10 Juni 2003).

Selain itu, masih menurut Sekretaris AELI, satu hal yang harus diingat, negara penghasil lada saat ini bukan Indonesia saja. Vietnam sekarang sudah menjadi negara penghasil lada putih, yang mutu dan juga rasanya tidak jauh berbeda dengan Muntok White Pepper. Jika harga lada yang ditawarkan Vietnam lebih murah, nanti pasar yang akan memilih. Lada Vietnam harganya lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia, dalam hal ini Bangka. Untuk menyikapi penurunan harga lada ini ia menyarankan:

Bangka harus meningkatkan mutu ladanya agar bisa mempertahankan "kehebatan" nama Muntok White Pepper. Untuk meningkatkan mutu lada sehingga harga lada Bangka tetap baik di pasaran, petani harus meningkatkan produktivitasnya, sekarang ini bagaimana caranya agar melakukan intensifikasi (meningkatkan produksi tanpa memperluas lahan) dan untuk mutunya supaya lada putih Bangka tetap terbaik adalah dengan melakukan perendaman di air yang baik dan mengalir, namun saat ini dengan banyaknya TI (Tambang Inkonvensional), sedikit banyak juga mempengaruhi mutu lada, selain itu keamanan yang kurang terjamin, akhirnya membuat petani merendam ladanya di bak-bak dekat rumahnya yang airnya tidak mengalir untuk menghindari pencurian.

Selain meningkatkan mutu, juga menyarankan agar petani bisa memilih waktu yang tepat untuk menanam lada: “... *hendaknya petani memilih waktu yang tepat untuk menanam lada, misalnya pada saat kebutuhan internasional berkurang (saat musim semi atau musim panas), petani memulai menanam lada dan diharapkan akan panen pada saat kebutuhan internasional sedang meningkat (saat musim gugur atau musim dingin)*”.

Sementara itu pendapat lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa harga lada yang terus menurun disinyalir karena lada putih Bangka banyak di ekspor ke traders di Singapura, bukan langsung ke end user (Bangka Pos, 4 Juni 2003). Ungkapan tersebut lebih diperkuat oleh Asnan Idris SIP, MM yang mengatakan: “... *ada pengakuan seorang eksportir lada kepada saya bahwa sebenarnya ia tidak memiliki modal apa-apa, namun ia dibiayai oleh trader Singapura untuk membeli lada putih Bangka yang akhirnya mau tak mau harga lada ditentukan oleh trader*”.

Menyikapi kondisi tersebut, petani pemilik kebun, pedagang pengumpul, eksportir serta pemerintah kabupaten dan kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung kini menyiapkan pembentukan Kantor Pemasaran Bersama (KPB) perniagaan lada putih. Menurut Kepala Dinas Industri dan Perdagangan, bahwa PKB itu akan dipayungi oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Namun, karena desakan kondisi, dengan peraturan daerah pun tata laksana perdagangan lada ini dapat diberlakukan. Ketua Asosiasi Masyarakat Lada Putih Indonesia mengatakan “... *itu sebabnya kita dukung adanya PKB. Tata laksana perdagangan bukan untuk membuat harga lada setinggi mungkin, tetapi agar harga stabil sehingga kami tak sengsara karena lada*”. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, menjelaskan bahwa PKB akan menjadi badan penyangga yang memastikan lada petani tidak dibeli di bawah standar harga dasar (Kompas, 9 Juli 2003).

Lebih lanjut KPB lada menyiapkan dana penyangga guna membeli lada petani sesuai dengan standar harga yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Babel. KPB beranggotakan PT Bangka Belitung Agricom dan BUMN PT Cipta Niaga membentuk tim evaluasi harga pokok produksi di tingkat petani. KPB berencana akan membuat struktur harga lada baik di

tingkat internasional, tingkat eksportir, tingkat pengumpul kota, pengumpul desa dan tingkat petani. Tujuan kebijakan agar informasi harga lada bisa transparan dan setiap pelaku perdagangan tahu keuntungan masing-masing. Kata Gubernur "... lada ini bersama-sama harus kita perjuangkan harga dan kualitasnya sehingga lada dapat memberikan semangat hidup bagi para petani". (Bangka Pos, 7 Juni 2003). Menurut penuturan salah seorang pemilik kebun lada di Kabupaten Bangka Selatan, memperhitungkan harga jual lada putih sangat merugikan, sehingga banyak petani memilih menahan lada dari pada menjual saat panen, Juli-September.

Selain lada, sekarang yang telah dikembangkan adalah perkebunan kelapa sawit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa tempat di daerah Kepulauan Bangka Belitung sangat cocok untuk jenis tanaman tersebut. Pada tahun 1998, perkebunan kelapa sawit yang sudah jadi dan sebagian mulai berproduksi mencapai luas hampir 90.299 Ha dan pada tahun 2000 luas area perkebunan kelapa sawit telah mencapai 108.969 Ha. Adapun alokasi untuk luas areal perkebunan oleh pemerintah mencapai 266.000 Ha atau 16,6 persen luas daratan kepulauan Bangka Belitung.

Dari hasil wawancara mendalam dengan Bupati Bangka Tengah yang baru saja dilantik, memperoleh informasi bahwa untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit menghadapi kendala, misalnya dalam hal permodalan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa untuk membuka perkebunan kelapa sawit, diperlukan modal, sementara kredit murah tidak ada dan bunga yang berlaku di atas 10 persen. Sebenarnya pemeliharaan kelapa sawit tidak begitu rumit dan disini banyak lahan tersedia dan cocok untuk tanaman kelapa sawit. Dilihat dari produksinya, bisa mencapai Rp 1,5 juta/Ha/bulan. Kelapa sawit di Kab Bangka, umur 3,5 tahun sudah berbuah dan kadar minyaknya tinggi. Saat ini diperlukan dana sebesar Rp 150 milliard, untuk lahan seluas 6.000 Ha, dengan sekitar 3.000 petani. Harapannya, dalam jangka waktu dua tahun selesai bayar utang. Sebenarnya masyarakat berminat mengembangkan kelapa sawit tersebut, ini tercermin dari usulan masyarakat yang dikemukakan pada saat ada pertemuan atau dialog dengan Pemda. Bahkan ada saran, kita tanam kelapa sawit, Pemda bangun pabrik. Kemudian harga kita ikat dan hasilnya diserahkan ke Pemda Bangka. Dengan demikian akan saling menguntungkan, baik masyarakat setempat maupun Pemda Bangka.



Sementara itu, menurut salah satu berita yang dilansir dalam media setempat, Bangka Pos 7 Juni 2003, telah terjadi Pertemuan segitiga bahas Plasma Sawit. Pemkab Bangka bersama Komisi B DPRD dan PT Sawindo Kencana melakukan rapat guna membahas pengadaan kebun plasma sawit rakyat. Pasalnya tahun 2003 Pemkab telah menganggarkan dana sedikitnya Rp 1.046.400.000,- untuk dimanfaatkan sebagai pengembangan perkebunan kelapa sawit. Penanaman sawit seluas 500 Ha disebarkan pada setiap kecamatan, sedikitnya terdapat lahan potensial di 18 kecamatan, setiap kecamatan mendapat bantuan 50 Ha. Dalam hal ini Dinas Perkebunan menyediakan bibit dan pemerintah menyediakan fasilitas pupuk. Akhir-akhir ini di sektor perkebunan dikembangkan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) kelapa sawit dan saat ini sudah ada 5 pabrik yang menghasilkan “Crude Palm Oil” atau CPO (Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, RENSTRA Tahun 2002-2006).

Selain lada dan kelapa sawit, karet adalah merupakan komoditi pertanian ketiga yang terpenting dari daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 1998, luas perkebunan karet 39.843 Ha dan meningkat menjadi 135.697 Ha pada tahun 2000. Secara rinci, jenis pertanian/perkebunan potensial di Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5:**  
**Jenis Pertanian/Perkebunan Potensial**  
**Di Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2000**

Jenis Pertanian	Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah
	Bangka	Belitung	Pangkal Pinang	
<b>Lada</b>				
• Luas areal perkebunan (Ha)	48.919	8.434,15	5.500	62.853
• Jumlah produksi (Ton)	26.780,60	3.764,57	10,50	30.556
• Areal yang potensial (Ha)	167.500	65.500	5.500	237.500
<b>Kelapa sawit</b>				
• Luas areal perkebunan (Ha)	62.360,22	46.608,67	-	108.969
• Jumlah produksi (Ton)	87.506,31	86.407,87	-	173.914
• Areal dicadangkan (Ha)	156.075	100.000	-	256.075
• Areal yang potensial (Ha)	275.000	125.000	-	400.000
<b>Karet</b>				
• Luas areal perkebunan (Ha)	37.937,50	97.710	49	135.697
• Jumlah produksi (Ton)	13.434,55	308,86	8,50	13.752
• Areal yang potesial (Ha)	260.000	76.000	4.500	340.500

Sumber : Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, PROPEDA 2002-2006.

Walaupun Kabupaten Bangka dari segi jumlah produksi karet cukup potensial, namun saat ini menghadapi kendala yang cukup serius. Harga karet anjlok Rp 1.700,-/kg. Harga karet mentah di tingkat pedagang pengumpul sejak dua minggu terakhir kembali turun dari Rp 2.500/kg menjadi Rp 1.700,-/kg. Turunnya harga karet ini disebabkan stok karet di tingkat eksportir menumpuk. Akibat harga karet yang terus menurun membuat ekonomi petani semakin morat-marit. Apalagi dalam sehari ia hanya sanggup menyadap karet sebanyak 12 liter karet dengan nilai Rp 10.000 hingga Rp 12.000,-/hari (Bangka Pos, 4 Juni 2003). Menghadapi situasi demikian, petani karet minta Pemda turun tangan. Petani karet mengharapkan Pemda turun tangan ikut mengatasi harga karet yang cenderung turun dan sekarang mencapai harga Rp 1.700,-/kg.

Ungkapan “... harga lada dan karet anjlok, sudah jatuh tertimpa tangga”, memberikan gambaran bagaimana sulitnya kehidupan masyarakat Bangka yang menggantungkan hidupnya dari petani. Di saat harga lada terjun bebas di bawah Rp 17.000,-/kg, kini harga karet ikut-ikutan anjlok. Pasalnya harga karet yang baru-baru ini melonjak sampai pada kisaran Rp 2.500,-/kg kembali anjlok pada kisaran Rp 1.400,-/kg. Kondisi ini benar-benar membuat warga khususnya petani di Simpangkatis menjerit. Ketika harga lada mulai anjlok, para petani masih ada alternatif lain berupa Tambang Inkonvensional (TI) dan karet. Kendati berdampak pada kerusakan lingkungan, membuka TI tetap merupakan jalan terbaik bagi mereka. Setelah TI tidak dapat diharapkan lagi, warga beralih ke karet, karena di dukung meningkatnya harga karet di pasaran Bangka. Namun setelah harga karet pun anjlok, Rustam, Kades Simpangkalis mengatakan “ ... tidak tahu lagi alternatif apa yang akan dilakukan warganya untuk menghadapi anjloknya kedua hasil pertanian tersebut”. Hanya sekitar 10 persen petani lada Desa Simpangkatis yang tidak mengandalkan karet. Lebih lanjut Rustam mengatakan bahwa “... saat ini pendapatan mereka rata-rata sekitar Rp 15.000,-. Karena di sini harga karet Rp 1.400,-/kg dan penghasilan mereka rata-rata 10 kg per hari” (Bangka Pos, 4 Juni 2003).

Dengan demikian masyarakat petani lada dan karet berharap harga lada dan karet dapat diperjuangkan agar tidak terus-menerus terpuruk. “.... kami membutuhkan penghidupan yang layak, sementara harga lada dan karet terus terpuruk, tidak ada yang bisa

*diharapkan jika lada dan karet terus terpuruk begini”, kata warga yang mengaku bernama Harun (53 tahun).*

Disamping ketiga komoditi tersebut di atas, di daerah ini juga terdapat perkebunan coklat dan cengkeh, sedangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura Propinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tergantung pasokan dari luar, terutama untuk sayur-sayuran seperti cabai, tomat dan lain-lain serta beberapa komoditi buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, melon dan semangka.

Dengan demikian, sektor pertanian/perkebunan masih memungkinkan untuk dikembangkan. Pengembangan sektor pertanian/perkebunan, selain untuk meningkatkan produksi hasil pertanian/perkebunan, juga guna meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian/perkebunan.

## **Hutan**

Sebagaimana telah diketahui bahwa hutan memiliki fungsi ganda, yaitu disamping sebagai sumber kekayaan alam juga berfungsi sebagai pengatur lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan hutan harus diatur dengan Undang-Undang. Dan guna menjaga ekosistem maka pemerintah daerah harus berupaya untuk mempertahankan keberadaan hutan produksi dan hutan lindung, paling tidak 30 persen dari luas daratan.

Sektor kehutanan di Pulau Bangka Belitung menghasilkan bermacam-macam jenis hasil hutan, misalnya kayu meranti, kayu mandaru dan kayu bulat. Pada tahun 2001, luas areal hutan di pulau Bangka 546.778 Ha yang terdiri dari 419.583 Ha hutan produksi dan 127.195 Ha hutan lindung. Sedangkan di pulau Belitung, luas areal hutan 182.787 Ha, terdiri dari 11.165 Ha hutan produksi dan 67.622 Ha hutan lindung. Sumber daya kehutanan yang masih melimpah dan belum diolah secara maksimal memberikan banyak peluang bagi investor di bidang ini. Di Kepulauan Bangka Belitung masih banyak peluang untuk membangun industri pengolahan kayu. Selain itu, juga berpeluang untuk pengembangan industri pembibitan tanaman industri dan industri yang berbahan baku kayu, seperti meubel, pulp dan sebagainya (BKPMD, 2003).

Secara umum kondisi hutan di Kabupaten Bangka berupa hutan sekunder dan muda yang merupakan hutan alam tropis. Adapun jenis pohon yang dominan adalah seru, nyato, maramis, bintangor dan pelawan. Selain itu terdapat pula jenis hutan lain yang menjadi ciri khas hutan Bangka yaitu hutan Keranggas. Jenis pohon yang mendominasi hutan ini adalah pohon sesapuan (Beaken Frustescents) yang tumbuh di tanah pasir kuarsa.

## Perikanan dan Peternakan

Sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung yang dikelilingi laut dan memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 800 Km berpotensi besar sebagai sumber perikanan laut yang sangat besar. Lahan daerah pantai meliputi luas sekitar 104.500 Ha dengan kondisi air laut yang belum banyak tercemar. Di daerah ini sudah dikembangkan budi daya udang dalam skala besar dan kecil.

Bangka Belitung dikelilingi oleh laut, memiliki sumber perikanan yang sangat besar baik ikan demersal maupun ikan palagis. Pada saat ini potensi MSY adalah 213,625 ton/tahun yang baru dapat dimanfaatkan 116.680 ton/tahun atau 54,62 % dari potensi tersebut. Selain itu Bangka Belitung masih memiliki lahan yang cukup luas untuk pertambakan ikan air tawar serta memiliki perairan pantai yang sangat bagus untuk budidaya rumput laut, budidaya ikan sistim keramba, tripang untuk hichery dan lain-lain. Panjang pantai untuk kegiatan ini adalah 2.758 Km<sup>2</sup> dan luas lahan untuk pertambakan 114.655 Ha yang belum dimanfaatkan 113.335 Ha dan 1.320 Ha yang telah dimanfaatkan (Internet: Peluang Investasi Agribisnis Bangka Belitung, page 1 of 1, tgl 5/9/03).

Kemudian dilihat dari sisi volume, produksi perikanan terbesar dihasilkan oleh Pulau Belitung, diikuti kemudian oleh Pulau Bangka dan Pangkalpinang. Sementara dari sisi kualitas ikan, ikan dari Belitung memiliki kualitas alamiah yang lebih baik dibandingkan ikan dari Bangka dan Pangkalpinang.

Dari segi produksi ikan laut, pada tahun 2001 Pulau Bangka menghasilkan 27.265 ton, Belitung 56.892 ton dan Pangkalpinang 18.895 ton, secara keseluruhan dihasilkan 103.052 ton dengan nilai sebesar Rp 688.611.490.000,- Bila perikanan laut ini dikembangkan lebih modern, maka hasil penangkapan akan dapat mencapai

500.000 ton per tahun. Sekarang ini, dimana penangkapan ikan masih dengan cara tradisional, hasil tangkapan ikan lebih banyak untuk ekspor dalam bentuk ikan segar. Selain itu untuk konsumsi masyarakat serta keperluan industri kecil seperti industri kemplang atau kerupuk, abon ikan, ikan asin, cumi-cumi kering dan lain-lain. Industri-industri kecil tersebut disamping banyak menyerap tenaga kerja juga sangat memberikan dampak ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat. Hasil industri tersebut sudah dipasarkan hingga di luar Kepulauan Bangka Belitung, bahkan sudah dikenal di Indonesia.

Lebih lanjut dari informasi internet (Sekilas Info Bangka 01-15 Maret 2002, page 2 of 3) menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Babel, bahwa PT Bangka Usaha Mina (BUM) investasikan dana sebesar Rp 636 milliardi di Babel. Pada awal bulan April mendatang, Propinsi Babel akan menerima PT BUM, investor dalam negeri (Jakarta) yang akan menanamkan modalnya di Babel sebesar Rp 636 miliar, bergerak di bidang perikanan laut. PT BUM akan mengirimkan 8 armada kapal penangkapan ikan yang akan beroperasi di Laut Cina Selatan dan mereka akan berlabuh di Babel. Pembangunan yang akan didirikan adalah pabrik es, industri galangan kapal, pabrik produksi tepung ikan, pabrik mesin kapal dan pabrik pengalengan ikan, bertempat di Sungailiat dan Pangkalpinang. Diperkirakan sarana tsb telah bisa terpenuhi dalam waktu 5 tahun ke depan. PT BUM akan menyerap 5.000 karyawan yg berasal dari Babel. Nelayan tradisional tidak akan dirugikan, karena PT BUM tidak beroperasi di perairan Bangka, tetapi di jalur bebas, yaitu Laut Cina Selatan.

Selain perikanan laut, terdapat pula budidaya ikan air tawar yang memanfaatkan “kolong” bekas galian timah. Dari 887 buah kolong dengan luas 1.712,65 Ha dan kedalaman 9,5 M, potensi air yang dapat dimanfaatkan adalah 162.710.750 m<sup>3</sup>. Kolong maupun air yang berada di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar, sumber bahan baku air minum/air dalam kemasan, pariwisata dan sumber air untuk industri serta pertanian. Baru sedikit yang bisa dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan air tawar. Masalah reklamasi bekas tambang (kolong) oleh PT Timah - yang memiliki kuasa pertambangan seluas 19,36 persen dari luas daratan - sepatutnya terus dilanjutkan (Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2001:2.55). Namun demikian, walaupun kolong-kolong bekas galian timah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar, namun menurut penuturan penduduk

setempat mengatakan bahwa ikan air tawar tidak atau kurang diminati masyarakat setempat karena kurang laku di pasaran, karena rasanya kurang enak di dibandingkan dengan ikan laut. Berkaitan dengan pengembangan subsektor perikanan, menurut Pemerintah Kabupaten Bangka 2001: 4-67 menyebutkan menghadapi masalah: pertama, terbatasnya ketrampilan dan modal guna mengupayakan budidaya perikanan air tawar; dan kedua, berbagai kendala dalam mengembangkan industri maritim.

Namun demikian, walaupun menghadapi masalah, Kabupaten Bangka memiliki berbagai peluang untuk mengembangkan subsektor perikanan. Adapun peluang-peluang tersebut antara lain:

1. Potensi ikan laut yang sangat melimpah.
2. Potensi lahan untuk budidaya ikan air tawar dan tambak udang.

Dalam hal peternakan, jenis ternak yang banyak dibudidayakan di Bangka, Belitung dan Pangkalpinang adalah sapi, unggas, babi dan kambing. Namun dalam 10 tahun terakhir, populasi yang meningkat hanya sapi. Dengan demikian, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang kekurangan ternak.

## **Pertambangan**

Beragam jenis bahan baku industri yang potensial berasal dari pertambangan dan telah diusahakan penggaliannya di Kepulauan Bangka Belitung adalah timah, kaolin, pasir kwarsa, granit, tanah liat, batu koral dan pasir bangunan (Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2001:2.55). Sementara itu, Kabupaten Bangka merupakan produsen utama bahan galian tambang di Indonesia. Bahan-bahan galian tersebut tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Secara rinci jenis bahan tambang di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6:**  
**Jenis Bahan Tambang dan Luas Kawasan Penambangan**  
**Kabupaten Bangka, 1997/1998**

<b>Jenis Bahan Tambang</b>	<b>Jumlah SIPD/KP</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Timah :		
Darat	63	237.123,74
Laut	15	111.503,00
Pasir kuarsa	37	2.033,17
Pasir bangunan	19	602,48
Kaolin	32	1.150,60
Batu Granit	4	81,40
Batu Diabas	1	24,00

Sumber: *PemKab Bangka, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bangka, 2002- 2004.*

Timah adalah bahan tambang utama yg ada di Bangka yg dieksploitasi sejak ratusan tahun silam oleh bangsa kolonial Belanda dan sampai hari ini pemerintah Indonesia melalui PT Timah. Karena timah, Pulau Bangka (dan Belitung) memang terkenal ke seluruh pelosok bumi. Maklum saja, karena daerah ini (termasuk Riau Kepulauan) adalah pemasok timah terbesar di dunia. Tapi timah tidak dapat dieksploitasi secara besar-besaran pada tahun 1700 an kalau tidak ada orang Tionghoa yang mau menjadi buruh di pertambangan-pertambangan timah yang baru dibuka. Bangka sebenarnya tidak punya penduduk asli, semua penghuni Bangka adalah warga pendatang (Internet: Indonesia Media Online Budaya - Februari 2002, page 1 of 4).

Ada permasalahan pokok yang harus dibenahi di bidang pertambangan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Kabupaten Bangka merupakan daerah potensial penambangan timah. Dalam kaitannya dengan penambangan timah tersebut, Kabupaten Bangka memiliki permasalahan yang khas yang tidak dimiliki propinsi lain di Indonesia. Dari ribuan tambang inkonvensional (TI) yang beroperasi serta merusak lingkungan dan menyebabkan pencemaran limbah galian timah, belum satupun dilakukan tindakan yang memadai. Tindakan reklamasi lingkungan (tanah, air dan hutan) di Kabupaten Bangka maupun Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya,

saat ini sangat memerlukan perhatian utama. Menurut Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa tambang inkonvensional (TI) yang beroperasi sebagian besar bersifat illegal dan merusak lingkungan yang berada dalam kawasan kuasa pertambangan PT Timah Tbk dan PT Koba Tin. Salah satu pemecahannya, kepada kedua perusahaan tersebut diharuskan membina dan mengawasi TI-TI yang berada dalam kawasan mereka.

Seperti yang dilansir pada media setempat, Bangka Pos 4 Juli 2003 menyebutkan bahwa Tambang Inkonvensional (TI) beroperasi di kawasan hutan lindung. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kapolres Bangka terungkap, kedua pengusaha itu mengaku mengoperasikan TI mereka karena semata-mata untuk mencari penghasilan. “... kami membayar fee Rp 1.000,-/kg pasir timah yang diperoleh kepada pemilik lahan”. Namun menurut Kapolres, pengakuan tersebut tidak beralasan karena lahan atau lokasi yg digarap para pengusaha itu adalah kawasan hutan lindung alias bukan milik warga”.

TI selain di kawasan hutan lindung ada juga yang beroperasi di lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Empat TI/TR (Tambang Rakyat) milik masyarakat yang berada di lokasi DAS tepatnya di Sungai Rangkui Desa Kace Kecamatan Mendobarat, tanggal 29 Mei lalu ditutup. Pasalnya hasil limbah terutama limbah tailing keempat TI/TR tersebut telah mencemari sumber air di kolong Sungai Rangkui yang juga sumber air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, sehingga membuat air PDAM tersebut menjadi keruh (Bangka Pos, 10 Juni 2003).

Menurut informasi dari internet (Belitung Island.Com, May 9, 2001) memberikan gambaran, rata-rata warga masyarakat yang bekerja di tambang timah bisa mengumpulkan antara Rp 10.000,- hingga Rp 30.000,- per hari, dengan tingkat harga jual dari warga kepada pengumpul antara Rp 9.000,- hingga Rp 12.000,- per kg biji/pasir timah. Selain penghasilan yang kurang memadai, pekerja di tambang timah juga menghadapi resiko kecelakaan kerja yang cukup serius. Seperti yang dilansir oleh salah satu media setempat (Bangka Pos, 10 Juni 2003), mengungkapkan adanya penambang TI luka parah tertimbun tanah (Gunawan, 35 Th). Gunawan tertimpa longsoran tanah TI di tempat pelimbangan timah Parit Enam Air Itam, Senin 9 Juni 2003. Akibatnya pergelangan kaki kiri dan paha kanan korban patah akibat longsoran tersebut dan yang paling



mengenaskan pergelangan kaki korban patah hingga tulangnya tersembul keluar. Waktu hendak makan siang, melihat cuaca yg sangat panas, korban pun masuk ke dalam lubang camui yang berkedalaman 2 meter untuk berteduh sambil menghabiskan makan siangnya. Saat korban sedang asyik makan dan minum ternyata tanah bekas galian yang telah bergumpal di atas lubang camui tiba-tiba tanpa diduga longsor ke dalam lubang. Korban yang ada di dalam lubang tak dapat berbuat banyak saat tanah longsor tersebut menindih tubuhnya hingga sebatas pinggang. Karena tanah yang longsor merupakan tanah jenis berbatu dan sangat keras, korban pun mengalami luka yang sangat serius.

Dengan situasi demikian, masyarakat Bangka Belitung menyadari bahwa terus-menerus menggantungkan diri pada timah adalah tidak “sehat”, karena kegiatan penambangan timah selama ini, baik yang dilakukan penambang timah resmi yaitu PT Timah dan PT Koba Tin, penambangan TI maupun Tambang Rakyat yang kegiatannya lebih kecil-kecilan, dampak negatifnya sama-sama besar, yaitu kerusakan lingkungan yang bisa membahayakan masyarakat Bangka Belitung sendiri di kemudian hari. Paling tidak, kalangan masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sekarang ini sudah mulai sadar bahwa suatu ketika Bangka Belitung akan benar-benar ditinggalkan oleh timah. Penanaman lada mulai diintensifkan kembali di banyak tempat. Warga Bangka Belitung yang dulunya tidak pernah bersentuhan dengan tanaman palawijo, kini sudah mulai belajar bertanam jagung dan sayur-sayuran. Semangat untuk melaut pun kini cukup tinggi, apalagi harga ikan di Singapura terbilang baik dan selalu siap untuk menerima ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Bangka Belitung (Internet: Belitung Island.Com, May 9, 2001).

Perlu dikemukakan disini, bahwa pertambangan sebagai potensi sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung bersifat tidak dapat diperbaharui, namun sangat laku untuk diekspor, misalnya timah. Sehingga pengeksploitasi secara berlebihan, dalam jangka panjang sangat membahayakan dan memperparah kondisi lingkungan. Untuk itu perlu kiranya dibuat peraturan (Perda) untuk mengatur penataan dan pemanfaatan ruang yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Selanjutnya dengan semakin menipisnya cadangan timah di darat, maka kegiatan penambangan dengan skala modern akan difokuskan di tengah laut (*offshore*).

## Industri

Hingga tahun 1998, sektor perindustrian di Bangka, Belitung dan Pangkalpinang memberikan kontribusi PDRB tertinggi bersama-sama sektor perdagangan, jasa dan pariwisata. Industri di Kabupaten Bangka secara kuantitas di dominasi oleh industri kecil (98,76 persen) dengan skala industri rumah tangga. Jenis industri ini umumnya mengandalkan bahan baku setempat seperti ikan, hasil perikanan/perkebunan dan hasil hutan.

Selain itu, terdapat industri ukuran menengah yang berbasis bahan baku golongan C yaitu industri tepung kaolin, batu granit, industri pembuatan batu bata dan genteng. Industri pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan adalah industri pengolahan keret, kelapa sawit (CPO) dan industri pengolahan kayu serta industri pendukung perikanan laut, yakni industri es balok.

Industri besar yang berkembang di Bangka umumnya masih berhubungan dengan kegiatan penambangan timah, misalnya industri peleburan timah di Muntok Bangka dan industri galangan kapal dan reparasi kapal keruk. Penting untuk diketahui, bahwa dengan adanya industri-industri besar tersebut telah menghasilkan tenaga terampil yang berkualitas tinggi, dengan ciri masyarakat industri, yang sangat diperlukan bagi pengembangan industri, khususnya industri maritim di kemudian hari.

Dengan adanya industri penambangan timah dimana kegiatannya selalu berkaitan dengan industri permesinan dan logam, tenaga listrik, perkapalan dan perawatan peralatan besar dan modifikasi teknik atas peralatan, hal tersebut merupakan modal dasar bagi pengembangan industri selanjutnya di Bangka Belitung. Hal ini terbukti dengan pembangunan industri pengolahan kelapa sawit (CPO) yang dikerjakan oleh tenaga lokal yang ada di Bangka. Secara rinci jenis industri di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7:**  
**Ragam Industri Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kategori Industri	Kabupaten/Kota			Jumlah
	Bangka	Belitung	Pangkal Pinang	
<b>Skala Industri</b>				
• Kecil	867	974	1.079	2.920
• Sedang	7	21	102	130
• Besar	14	3	1	18
<b>Jenis Usaha</b>				
• Pangan	272	93	73	438
• Sandang & kulit	36	78	17	131
• Kimia & Bahan Bangunan	290	239	-	531
• Kerajinan	53	202	-	255
• Barang & jasa	216	216	-	432
• Perkapalan	3	1	-	4
• Reparasi/Doking kapal	3	1	-	4
• Peleburan Timah	2	-	-	2
• Lain-lain	15	22	64	101

*Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka, Tahun 2000.*

Pada tahun 1998, perkembangan sektor kerajinan tangan dan industri kecil di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 2.060 unit yang tersebar di Kabupaten Bangka, Belitung dan Pangkalpinang. Mayoritas sektor ini berupa industri rumah tangga yang sangat berarti bagi sumber pendapatan penduduk, sekaligus banyak menyerap tenaga kerja. Industri rumah tangga tersebut seperti mengolah hasil agroindustri, perikanan, perkebunan dan hasil laut serta kerajinan tangan berupa industri pewter dari timah, gelang/cincin/tongkat dari akar bahar, anyaman kopiah/peci resam dan sebagainya. Sedangkan industri kecil di Kabupaten Bangka antara lain menghasilkan bahan pangan seperti terasi, rusip, madu, sambal lingkung, gula aren dan sagu rumbia. Kesemua industri tersebut memberikan banyak kesempatan kerja bagi penduduk setempat.

## Pariwisata

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Hamparan pantai dengan pasir putihnya sepanjang 150 Km, bebatuan granit dengan mosaik yang indah dan air laut yang jernih dengan terumbu karangnya serta pulau-pulau kecilnya, merupakan lokasi wisata yang sangat potensial. Selain itu, dengan adanya adat-istiadat yang bernuansa keagamaan seperti Upacara Tawar Laut/Ketupat Laut, Tahun Baru Cina, Sembahyang Kubur Cina (Ceng Beng), Sembahyang Pantai dan Upacara Pesta Perkawinan massal merupakan momentum yang potensial untuk dikembangkan, terutama yang berkaitan dengan tradisi Cina kuno, acara ini diikuti oleh sanak famili yang datang dari Hongkong, Taiwan, Singapura dan Cina Daratan. Selain itu obyek wisata sejarah seperti Obyek Sejarah Kota Kapur, Petilasan Bung Karno serta wisata gunung/Outbond dan wisata pertanian (lada, karet, kelapa sawit) potensial dikembangkan untuk obyek wisata.

Perayaan Ceng Beng, yaitu ritual sembahyang kubur yang dilakukan warga keturunan Tionghoa setiap tahun untuk menghormati arwah leluhur. Upacara Ceng Beng memang mengharuskan semua sanak keluarga, minimal diwakili satu orang, untuk hadir mempersembahkan sesaji di makam leluhur. Karena itu, upacara Ceng Beng sendiri memberikan nilai tambah yang tidak kecil pada ekonomi Bangka. Pada saat seperti ini, hotel-hotel di Bangka pasti penuh. Barang-barang kerajinan tangan dari sini laris manis karena mereka yang datang adalah orang-orang yg sukses di luar. (Internet: Indonesia Media Online Budaya -Februari 2002, Page 2 of 4).

Sementara itu untuk Kabupaten Bangka khususnya, yang terletak di daerah kepulauan yang strategis memiliki potensi perairan laut berikut pantai yang menarik untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. Obyek wisata yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan yaitu wisata alam, wisata air panas, wisata sejarah, wisata budaya dan agrowisata. Dengan berbagai potensi yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, maka sudah selayaknya subsektor pariwisata dijadikan salah satu sektor unggulan bagi Kabupaten Bangka.

Dalam rangka pengembangan pariwisata tersebut, telah dibangun hotel-hotel berbintang dan hotel-hotel kelas melati serta

ditunjang sarana dan prasarana perhubungan udara, laut dan darat serta restoran merupakan sarana penunjang pariwisata terpenting. Restoran dengan masakan khas daerah, dengan sajian hidangan laut merupakan kekayaan daerah yang perlu ditingkatkan dan dipromosikan. Secara rinci, obyek-obyek pariwisata di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8:**  
**Obyek Pariwisata Di Propinsi Kepulauan Bangka**  
**Belitung, Tahun 2000**

Obyek Pariwisata	Kabupaten/Kota			Jumlah
	Bangka	Belitung	Pangkal Pinang	
◆ Wisata Pantai	30	22	2	54
◆ Wisata Alam/ Gunung	3	3	-	6
◆ Wisata Hutan	5	1	-	6
◆ Wisata Sejarah	7	8	3	18
◆ Wisata Budaya/Agama	43	56	14	113
◆ Wisata Agro/Pertanian	13	7	-	20
◆ Hotel/Penginapan	19	10	22	51
◆ Restoran Besar dan Kecil	53	36	30	119

Sumber : - Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, *PROPEDA 2002-2006*.  
- Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, *RENSTRA Tahun 2002-2006*.

Di Kabupaten Bangka, obyek wisata pantai tersebar hampir di tiap kecamatan. Di ibukota Kabupaten Bangka (Sungailiat) terdapat beberapa obyek wisata pantai seperti Pantai Parai Tengiri, Pantai Matras, Pantai Teluk Uber, Pantai Rebo, Pantai Tanjung Pesona. Kemudian di Kecamatan Belinyu terdapat obyek wisata Pantai Penyusuk dan Pantai Remodong dan di Kecamatan Muntok dikenal dengan Pantai Tanjung Kalian. Selain obyek wisata pantai, Kabupaten Bangka memiliki pula obyek wisata darat seperti Bukit Menumbing yang dalam sejarah dikenal sebagai tempat pengasingan Presiden Pertama R.I. (Soekarno), kemudian obyek wisata air panas di Pemali, Sungailiat. Namun sayangnya, obyek wisata air panas tersebut kini tinggal semak belukar dan tak tampak lagi seperti apa wujud wisata air panasnya.

Menurut Pemerintah Kabupaten Bangka (2001), disamping memiliki potensial sektor pariwisata, namun Kabupaten Bangka juga

menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, yaitu:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi langsung dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka.
2. Meningkatkan pembangunan industri penunjang pariwisata.
3. Terbatasnya dana dan berbagai fasilitas penunjang, seperti listrik dan sarana komunikasi.
4. Krisis ekonomi membuat terhambatnya berbagai rencana pengembangan berbagai obyek wisata.
5. Belum adanya penerbangan langsung dari dan ke Singapura. Padahal Singapura merupakan salah satu kota transit dan/atau tujuan wisata yang padat dikunjungi wisatawan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, hal yang cukup memprihatinkan yaitu keindahan pantai yang begitu indah telah hilang keindahannya karena adanya penambangan timah di pantai (Pantai Rebo). Kondisi ini tampaknya cukup meresahkan masyarakat yang peduli lingkungan. Hal tersebut tercermin dari ungkapan mereka yang dimuat dalam media Bangka Pos, 10 Juni 2003, kolom "Ngasih Saran", yang berbunyi : "... gimana nasib Bangka abis timah, Pantai Rebo rusak. Mau jadi apa Bangka ini kelak?". Ironisnya lagi, menurut informasi yang kami peroleh, pemilik modal dari penambangan pantai tersebut adalah orang Bangka (China) yang sudah sukses di Jakarta. Hal ini memperlihatkan bahwa orang setempat masih belum merasa memiliki akan perlunya menjaga dan melestarikan keindahan alam yang ada.

Dari Internet (BelitungIsland.Com, May 9, 2001) disebutkan ada kaitan PT Timah dengan sektor pariwisata. Diungkapkan sejumlah pengelola hotel, bahwa para pegunjung ke hotel-hotel atau tempat wisata pantai di sekitar Bangka Belitung, sebagian besar dari keluarga besar timah, baik itu keluarga besar PT Timah ataupun para tamu yang datang karena mempunyai hubungan pekerjaan dengan pertimahan. *"sulit dibayangkan apa jadinya kalau PT Timah sampai menutup kantornya dan menghentikan semua kegiatannya di Bangka. Bisnis pariwisata di sini yang belum cukup berkembang, bisa langsung ambruk"*, ungkap beberapa pekerja hotel di sekitar Pantai Parai Tenggara maupun Pantai Tanjung Pesona, dua lokasi wisata pantai di sekitar Sungiliat yang sudah dikelola oleh investor.

## Potensi Sumber Daya Manusia

### *Jumlah dan Distribusi Penduduk*

#### *Jumlah, pertumbuhan dan penyebaran penduduk*

Jumlah penduduk Propinsi Bangka Belitung menurut sensus penduduk tahun 1980 sebanyak 653 522 orang, kemudian meningkat menjadi 819 882 orang pada tahun 1990 dan meningkat lagi menjadi 899.095 orang pada hasil sensus penduduk terakhir tahun 2000. Hasil sementara sensus persiapan Pemilu 2004, penduduk Propinsi Bangka Belitung telah mencapai 932.152 orang. Dari jumlah 899 095 orang tersebut terdiri dari 458.244 orang laki-laki dan 440.851 orang perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 104/100, artinya tiap 104 orang laki-laki sebanyak 100 orang perempuan. Jadi penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Mengapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan ? Mungkin dipengaruhi oleh faktor migrasi, mungkin juga karena kelahiran bayi lebih banyak laki-laki daripada perempuan dan tetap bertahan hidup.

Untuk Kabupaten Bangka sebagai kabupaten yang menjadi sasaran penelitian, jumlah penduduk pada tahun 1980 baru mencapai 399 855 orang, namun pada tahun 1990 meningkat menjadi 513 946 orang dan meningkat lagi menjadi 620 227 orang pada tahun 2000. Berdasarkan hasil sementara dari sensus untuk persiapan Pemilu 2004, jumlah penduduk Kabupaten Bangka pada 3 Juni 2003 sebanyak 629.666 orang. Dari angka-angka absolut tersebut dapat dihitung bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Bangka cukup menonjol terjadi pada periode 1980-1990, yakni mencapai 2,5 persen. Angka tersebut menunjukkan suatu pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan yang tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh adanya migrasi masuk yang lebih besar daripada migrasi keluar, sehubungan dengan masih banyak peluang kerja terutama dalam pertambangan timah pada periode tersebut. Di samping juga dipengaruhi oleh penambahan alami. Namun pertumbuhan tinggi tersebut cenderung menurun pada periode 1990-2000. Angka tersebut menurun menjadi 1,9 persen. Penurunan tersebut utamanya disebabkan karena telah makin habisnya deposit timah, sehingga terjadi penurunan produksi timah. Di banyak lokasi pertambangan timah bahkan ada yang harus ditutup. Bagi PT Timah yang merupakan perusahaan pertambangan

terbesar di Bangka, pada awal tahun 90an (1992) telah mengurangi produksi dan telah mengadakan efisiensi dan restrukturisasi. Perusahaan tersebut telah mengurangi jumlah tenaga kerjanya terutama tenaga lapangan. Menurunnya peluang kerja di pertambangan timah tersebut telah mengurangi laju migrasi masuk ke Kabupaten Bangka dan bahkan mungkin telah terjadi migrasi keluar kabupaten ini. Kondisi yang ekstrim lagi apabila dilihat secara provinsial, ternyata penurunan laju pertumbuhan penduduk tersebut sangat tajam. Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Babel menurun dari 2,3 persen (1980-1990) menjadi hanya 0,9 persen (1990-2000).

**Tabel 2.9:**  
**Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Propinsi Bangka Belitung Menurut Daerah Tingkat II, Tahun 1980, 1990 dan 2000**

Daerah	Jumlah Penduduk				Tingkat Pertumbuhan	
	1980	1990	2000	2003 *	1980-90	90-2000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
Kab. Bangka	399 855	513 946	620 227	629 666	2,54	1,96
Kab. Belitung	163 599	192 972	204 776	216 895	1,66	0,62
Kota Pangkal Pinang	90 068	113 163	125 423	135 591	2,31	2,15
<b>Jumlah</b>	<b>653 522</b>	<b>819 882</b>	<b>899 086</b>	<b>982 152</b>	<b>2,29</b>	<b>0,93</b>

Sumber : - BPS, Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 1990, Seri : L.1  
 - BPS, Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 2000, Seri : RBL1.2  
 - BPS Prov. Babel, Hasil sementara Penduduk Babel 3 Juni 2003.

## ***Pola Komposisi Penduduk***

### ***Struktur umur dan rasio jenis kelamin***

Struktur penduduk suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui apakah di daerah tersebut masih termasuk struktur penduduk muda atau telah mencapai struktur penduduk dewasa atau tua. Dengan melihat struktur umur penduduk di Propinsi Bangka Belitung tahun 2000 dapat diklasifikasikan struktur penduduk ke arah dewasa, sebab proporsi kelompok penduduk di bawah 15 tahun hanya sekitar 32 persen dan hampir 70 persen telah berusia 15 tahun ke atas. Hal tersebut kemungkinan telah terjadi penurunan tingkat kelahiran di daerah ini. Hal tersebut tercermin dari adanya kecenderungan penurunan proporsi penduduk usia muda dan anak-



anak. Penurunan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Di samping itu, juga kemungkinan pengaruh migran masuk yang pada umumnya dilakukan oleh penduduk usia muda dan dewasa. Fenomena tersebut telah merubah struktur penduduk dari muda ke dewasa.

Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk di Propinsi Bangka Belitung secara umum sebesar 104 artinya di propinsi ini tiap 100 orang perempuan ada 104 orang laki-laki. Rasio jenis kelamin yang lebih tinggi penduduk laki-lakinya ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang migran masuknya cukup menonjol. Jumlah laki-laki yang lebih besar tersebut disebabkan karena pengaruh adanya migran masuk yang umumnya lebih didominasi laki-laki, sehingga merubah rasio jenis kelamin dari lebih banyak penduduk perempuan menjadi lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Untuk Propinsi Bangka Belitung rasio yang lebih banyak penduduk laki-laki ini lebih banyak terjadi pada kelompok penduduk usia produktif antara 15-64 tahun sebesar 105,7. Hal ini menunjukkan bahwa banyak migran laki-laki yang masuk ke propinsi ini.

**Tabel 2.10:**  
**Struktur Penduduk Propinsi Bangka Belitung**  
**Menurut Umur & Jenis Kelamin, 2000**

Golongan Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	46.354	10,1	46.119	10,5	92.473	10,3
5-9	45.957	10,0	45.007	10,2	90.964	10,1
10-14	54.009	11,8	52.617	11,9	106.626	11,8
15-49	257.169	56,2	245.617	55,7	502.786	55,9
50-64	39.156	8,5	34.758	7,9	73.914	8,2
65+	15.594	3,4	16.729	3,8	32.323	3,6
Jumlah	458.239	100,0	440.847	100,0	899.086	100,0

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

Di Kabupaten Bangka gambaran kependudukan termasuk struktur umur penduduk dan rasio jenis kelamin ternyata tidak banyak berbeda dengan kondisi di tingkat Propinsi Bangka Belitung. Struktur umur penduduk juga sudah mengarah ke penduduk tua. Sekitar 33 persen adalah penduduk muda atau kelompok usia di bawah 15 tahun. Penurunan proporsi kelompok usia muda telah diikuti kenaikan kelompok usia dewasa. Proporsi penduduk usia 15

tahun ke atas mencapai 66,5 persen. Naiknya kelompok usia dewasa dipengaruhi oleh migran masuk dan kemungkinan penurunan tingkat kelahiran sebagai dampak keberhasilan program keluarga berencana.

Dalam rasio jenis kelamin juga seperti di tingkat propinsi, ternyata jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yaitu sebanyak 104 orang laki-laki setiap 100 orang perempuan. Rasio yang lebih banyak laki-laki ini lebih mencolok pada kelompok penduduk usia produktif, yaitu 106 orang laki-laki setiap 100 orang perempuan. Kondisi ini makin memberikan petunjuk bahwa besarnya penduduk pada usia tersebut karena migran masuk di masa lalu. Peran migran masuk selama ini telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang belum banyak dilakukan oleh penduduk setempat.

**Tabel 2.11:**  
**Struktur Penduduk Kabupaten Bangka Menurut Umur & Jenis Kelamin, 2000**

Golongan Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	Absolut	Persen	Absolut	Persen	Absolut	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	30.517	10,3	30.735	10,8	61.252	10,5
5-9	30.480	10,2	30.100	10,6	60.580	10,4
10-14	37.168	12,5	36.401	12,8	73.599	12,6
15-49	164.721	55,5	157.011	55,1	321.722	55,3
50-64	24.283	8,2	20.920	7,3	45.203	7,8
65+	9.833	3,3	9.741	3,4	19.574	3,4
Jumlah	297.002	100,0	284.908	100,0	581.910	100,0

Sumber : BPS, *Bangka Dalam Angka 2001*.

### ***Pendidikan penduduk***

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Tingkat pendidikan penduduk Bangka usia 5 tahun ke atas, ternyata lebih dari 80 persen masih memiliki latar belakang pendidikan tamat SD ke bawah. Mengingat kelompok penduduk tersebut sebagian besar merupakan kelompok penduduk usia kerja, diperkirakan sebagian besar angkatan kerja di propinsi ini juga masih mempunyai pendidikan rendah. Suatu kendala yang masih menjadi hambatan

dalam mempercepat pembangunan daerah, karena belum didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Hanya sekitar 10 persen penduduk usia kerja yang berpendidikan SLTA ke atas dan sekitar satu persen yang telah menamatkan perguruan tinggi, baik pada tataran diploma, sarjana muda maupun sarjana. Rendahnya penduduk berpendidikan tinggi tersebut juga kemungkinan menjadi hambatan dalam pengembangan otonomi daerah dan pengembangan ekonomi daerah.

**Tabel 2.12:**  
Pendidikan Tertinggi Ditamatkan Penduduk Usia 5 tahun ke atas  
Kabupaten Bangka, Tahun 2000

Pendidikan Tertinggi Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki & Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tidak/Belum Tamat SD	104 926	40.3	113 002	45.5	217 928	42.8
Tamat SD	92 841	35.6	89 013	35.8	181 854	35.7
SLTP	31 808	12.2	25 402	10.2	57 210	11.2
SLTA	27 047	10.4	18 714	7.5	45 761	9.0
Diploma I/ II	1 220	0.5	1 093	0.4	2 313	0.5
Akademi/ Diploma III	989	0.4	672	0.3	1 661	0.3
Universitas	1 616	0.6	734	0.3	2 350	0.5
Jumlah	260 522	100,0	248 696	100,0	509 218	100,0

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

## Mobilitas Penduduk

### Urbanisasi

Urbanisasi merupakan suatu proses pemusatan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (*urban area*). Besarnya tingkat urbanisasi di suatu daerah ditentukan oleh proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan terhadap jumlah seluruh penduduk di daerah tersebut. Perkembangan urbanisasi dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pertambahan alami, migrasi dan reklasifikasi wilayah. Dalam urbanisasi peran migrasi semakin penting dalam pertumbuhan penduduk daerah perkotaan, mengingat pertambahan alami semakin kecil pengaruhnya karena adanya program pengendalian jumlah penduduk melalui keluarga berencana.

Pemusatan penduduk di daerah perkotaan biasanya ada korelasi dengan meningkatnya pembangunan yang lebih cenderung *urban bias*. Pembangunan merupakan proses transformasi

struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor pengolahan dan jasa. Perkembangan sektor pengolahan dan jasa, kota akan terus berkembang dan mengakibatkan penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat.

Di Propinsi Bangka Belitung penduduk yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 386.793 orang. Sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan sebanyak 512.302 orang. Tingkat urbanisasi di propinsi ini telah mencapai 43 persen, angka ini termasuk sudah cukup tinggi. Angka tersebut telah melampaui angka nasional yang pada tahun 2000 telah mencapai 42 tahun. Sedangkan di Kabupaten Bangka tingkat urbanisasi baru mencapai sekitar 26 persen. Rendahnya urbanisasi di Kabupaten Bangka disebabkan karena pisahnya Kota Pangkal Pinang menjadi Daerah Tingkat II tersendiri, sehingga proporsi penduduk kota di kabupaten ini menurun, sedangkan kota-kota yang ada belum banyak berkembang. Ibukota Kabupaten Bangka selama ini adalah kota Sungai Liat nampaknya belum banyak berkembang, belum banyak penduduk yang tinggal di kota tersebut. Jumlah penduduk sampai tahun 2001 belum mencapai 60 ribu orang.

**Tabel 2.13:**  
Penduduk Perkotaan, Penduduk Pedesaan dan Tingkat Urbanisasi di Propinsi Bangka Belitung, Tahun 2000

Daerah	Jumlah Penduduk			Tingkat Urbanisasi (%)
	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah	
Kab. Bangka	153.325	415.800	569.125	28,3
Kab. Belitung	111.883	92.768	204.651	54,5
Kota Pangkal Pinang	121.585	3.734	125.319	97,3
<b>PROP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>386.793</b>	<b>512.302</b>	<b>899.095</b>	<b>33,1</b>

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

### *Migrasi Penduduk*

Menurut informan pada awalnya semua penduduk yang tinggal di Pulau Bangka dan Belitung adalah pendatang atau migran. Penduduk yang pertama mendiami pulau ini adalah orang Cina. Mereka sengaja didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dipekerjakan sebagai buruh di pertambangan timah ratusan tahun silam. Oleh karena itu, usaha pertambangan timah di pulau ini

sudah berumur tua. Sedangkan orang-orang dari daerah lain (Sumatera, Jawa dan Sulawesi) berdatangan belakangan.

Dalam konsep migran seumur hidup, dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 menunjukkan bahwa secara umum penduduk yang berstatus migran seumur hidup di Propinsi Bangka Belitung hanya sebesar 13,4 persen. Sebagian besar lainnya dalam konsep migran seumur hidup sudah bukan migran, sebab sudah dilahirkan di daerah ini, tetapi mereka semua turunan migran. Para migran tersebut penyebarannya yang paling banyak terdapat di Kota Pangkal Pinang mencapai 26,7 persen, di Kabupaten Bangka 11,9 persen dan yang terendah di Kabupaten Belitung hanya sebesar 9,6 persen. Sedangkan yang berstatus migran risen pada tahun 2000 di propinsi ini hanya sebesar 5,3 persen, dengan penyebaran di Kota Pangkal Pinang sebesar 8,6 persen, di Kabupaten Bangka hanya 5,1 persen dan di Kabupaten Belitung hanya 3,6 persen.

Di Kabupaten Bangka persentase migran terhadap seluruh jumlah penduduk Bangka memang lebih rendah dibandingkan dengan Kota Pangkal Pinang. Namun secara absolut dibandingkan dengan Kabupaten Belitung maupun Kota Pangkal Pinang menunjukkan angka yang paling banyak. Hal tersebut disebabkan wilayah Kabupaten Bangka adalah paling luas, peluang kerja terutama pertambangan timah pada tahun-tahun sebelum 90-an yang paling banyak pula. Dengan makin menurunnya peluang kerja di pertambangan tersebut, barangkali dari Kabupaten Bangka yang paling banyak penduduk atau tenaga kerja yang bermigrasi ke luar atau kembali ke daerah asal.

**Tabel 2.14 :**  
**Status Migrasi Seumur Hidup di Propinsi Bangka Belitung**  
**Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2000**

Kabupaten/Kota	Non Migran	Migran Masuk	Jumlah	% Migran
Kab. Bangka	501.351	67.774	569.125	11,9
Kab. Belitung	185.020	19.631	204.651	9,6
Kota Pangkal Pinang	91.867	33.452	125.319	26,7
Propinsi	778.238	120.857	899.095	13,4

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

## **Angkatan Kerja**

### ***Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran***

Dari sebanyak 609.032 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Propinsi Bangka Belitung sebanyak 414.464 orang adalah termasuk angkatan kerja. Sedangkan di Kabupaten Bangka sendiri jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2000 sebanyak 378 015 orang. Dari jumlah tersebut 247.930 orang adalah angkatan kerja. Mereka merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang seminggu sebelum sensus penduduk 2000 mempunyai pekerjaan (baik yang bekerja maupun yang sementara sedang tidak bekerja - menunggu panen, cuti dsb) dan yang tidak memiliki pekerjaan, tapi sedang mencari pekerjaan.

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Propinsi Bangka Belitung tahun 2000 hanya sebesar 68 persen. Dalam perspektif jender, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari pada perempuan. TPAK laki-laki sebesar 84,4 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 50,8 persen. Sedangkan TPAK di Kabupaten Bangka ternyata jauh lebih besar (74 persen). Ini menggambarkan bahwa kesempatan kerja di kabupaten ini masih cukup besar. Dalam persepektif jender, ternyata TPAK laki-laki (86 persen) di kabupaten ini juga lebih tinggi dibandingkan perempuan (61 persen), keduanya dalam persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi.

Tingkat pengangguran terbuka secara umum di Propinsi Bangka Belitung pada tahun 2000 hanya 3,3 persen. Namun dalam perspektif jender ternyata perempuan lebih besar daripada laki-laki, masing-masing 4,1 persen dan 2,8 persen. Mengapa demikian, kemungkinan karena angkatan kerja perempuan masih kalah bersaing di pasar kerja dibandingkan angkatan kerja laki-laki. Perbedaan tingkat pengangguran tersebut lebih mencolok apabila dibedakan antara pedesaan dan perkotaan. Tingkat pengangguran di daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Secara umum tingkat pengangguran di perkotaan sebesar 5,2 persen, sedangkan di daerah pedesaan hanya 2,1 persen. Perbedaan tingkat pengangguran antara pedesaan dan perkotaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan jenis lapangan kerja yang tersedia. Di perkotaan lapangan kerja lebih didominasi sektor

formal, sedangkan di pedesaan lebih didominasi sektor informal pertanian. Di lapangan kerja sektor informal pertanian para pencari kerja lebih mudah dan fleksibel masuk dibandingkan di sektor formal. Hal tersebut yang mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka di daerah pedesaan lebih rendah dari pada daerah perkotaan. Para pencari kerja di pertanian tidak dituntut persyaratan harus memiliki pendidikan dan ketrampilan tertentu. Sedangkan di sektor formal hanya pencari kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan tertentu yang dapat diterima. Sedangkan tingkat pencari kerja di Kabupaten Bangka (2,3 persen) ternyata lebih kecil dibandingkan propinsi (2,8 persen). Ini dapat menggambarkan bahwa peluang kerja di kabupaten ini masih cukup besar, sehingga banyak pencari kerja yang terserap.

Tabel 2.15 :  
Angkatan kerja Kabupaten Bangka menurut Daerah Tingkat II,  
Pedesaan/Perkotaan dan Jenis Kelamin

Kab/Kota	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja (BAK)			Jumlah Usia Produktif	TPAK (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	Bekerja	Cari Kerja	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Lainnya	Jumlah BAK			
<b>Kab. Bangka</b>									
<b>Perkotaan</b>									
1. Laki-laki	42.215	1.594	43.809	6.167	5.249	11.416	55.225	79,3	3,64
2. Perempuan	20.595	1.119	21.714	6.392	25.461	31.853	53.567	40,5	5,15
Jumlah	62.810	2.713	65.523	12.559	30.710	43.269	108.792	60,2	4,14
<b>Pedesaan</b>									
1. Laki-laki	121.641	2.256	123.897	8.594	6.672	15.266	139.163	89,0	1,82
2. Perempuan	88.381	2.129	90.510	8.416	31.134	39.550	130.060	69,6	2,35
Jumlah	210.022	4.385	214.407	17.010	37.806	54.816	269.223	79,6	2,04
<b>Jumlah K+D</b>									
1. Laki-laki	163.856	3.850	167.706	14.761	11.921	26.682	194.388	86,2	2,29
2. Perempuan	108.976	3.248	112.224	14.808	56.595	71.403	183.627	61,1	2,89
Jumlah	272.832	7.098	279.930	29.569	68.516	98.085	378.015	74,0	2,53
<b>Kab. Belitung</b>									
<b>Perkotaan</b>									
1. Laki-laki	30.705	1.467	32.172	3.557	4.456	8.013	40.185	80,0	4,56
2. Perempuan	9.406	1.128	10.534	3.570	24.869	28.439	38.973	27,0	10,71
Jumlah	40.111	2.595	42.706	7.127	29.329	36.452	79.158	53,9	6,07
<b>Pedesaan</b>									
1. Laki-laki	29.680	572	30.252	1.087	2.299	3.386	33.638	89,9	1,89
2. Perempuan	13.856	492	14.348	1.094	15.411	16.505	30.853	46,5	3,43
Jumlah	43.536	1.064	44.600	2.181	17.710	19.891	64.491	69,1	2,38
<b>Jumlah K+D</b>									
1. Laki-laki	60.385	2.039	62.424	4.644	6.755	11.399	73.823	84,5	3,26
2. Perempuan	23.262	1.620	24.882	4.664	40.280	44.944	69.826	35,6	6,51
Jumlah	83.647	3.659	87.306	9.308	47.035	56.343	143.649	60,8	4,19
<b>K. P. Pinang</b>									
<b>Perkotaan</b>									
1. Laki-laki	30.988	1.463	32.451	5.395	4.674	10.069	42.520	76,3	4,51
2. Perempuan	12.284	1.241	13.525	5.184	23.944	29.128	42.653	31,7	9,17
Jumlah	43.272	2.704	45.976	10.579	28.618	39.197	85.173	53,9	5,88
<b>Pedesaan</b>									
1. Laki-laki	770	96	866	53	274	327	1.193	72,6	11,08
2. Perempuan	349	37	386	50	566	616	1.002	38,5	9,58
Jumlah	1.119	133	1.252	103	840	943	2.195	57,0	10,62
<b>Jumlah K+D</b>									
1. Laki-laki	31.758	1.559	33.317	5.448	4.948	10.396	43.713	76,2	4,68
2. Perempuan	12.633	1.278	13.911	5.234	24.510	29.744	43.655	31,9	9,18
Jumlah	44.391	2.837	47.228	10.682	29.458	40.140	87.368	54,0	6,00

## Lanjutan

<b>Prop. Babel</b>									
<b>Perkotaan</b>									
1. Laki-laki	103.908	4.524	108.432	15.119	14.379	29.498	137.930	78,6	4,17
2. Perempuan	42.285	3.488	45.773	15.146	74.274	89.420	135.193	33,9	7,62
Jumlah	146.193	8.012	154.205	30.265	88.653	118.918	273.123	56,4	5,19
<b>Perdesaan</b>									
1. Laki-laki	152.091	2.924	155.015	9.734	9.245	18.979	173.994	89,1	1,89
2. Perempuan	102.586	2.658	105.244	9.560	47.111	56.671	161.915	65,0	2,52
Jumlah	254.677	5.582	260.259	19.294	56.356	75.650	335.909	77,5	2,14
<b>Jumlah K+D</b>									
1. Laki-laki	400.870	7.448	263.447	24.853	23.624	48.477	311.924	84,4	2,83
2. Perempuan	255.999	6.146	151.017	24.706	121.385	146.091	297.108	50,8	4,07
Jumlah	144.871	13.594	414.464	49.559	145.009	194.568	609.032	68,0	3,28

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

## Potensi Sosial Budaya

Kata Bangka berasal dari kata 'Wangka' yang artinya timah. Jadi pemberian nama 'bangka' karena pulau ini kaya akan bahan tambang timah. Sayangnya tidak ada sumber yang dapat menyebutkan siapa yang awal mulanya memberikan nama bangka tersebut. Namun kata bangka sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Belanda sendiri pada waktu mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang timah di pulau ini sudah menyebut kata 'bangka'. Ada yang menyatakan bahwa kata 'bangka' berasal dari kata 'vanka', dalam bahasa Sansekerta yang berarti juga timah (Kompas, 25-06-2001). Kata 'wangka' juga pernah ditulis di inskripsi Sriwijaya tahun 686 (<http://w.w.w.dipardass.go.id/bangka.htm>). Sedangkan timah pertama ditemukannya di Pulau Bangka pada awal abad 18 dan mulai diusahakan pada abad ke 19 oleh VOC (Wirantaprawira, 2000).

## Konsep kerja

Konsep kerja secara ekonomis yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk dan survai biasanya adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Namun bagi sebagian penduduk Bangka, orang dikatakan bekerja apabila mereka telah mampu mendapatkan pekerjaan formal seperti sebagai pegawai negeri atau karyawan perusahaan atau swasta. Oleh karena itu, bagi orang-orang muda yang hanya bekerja di sektor informal bekerja membantu di kebun atau ladang atau sebagai nelayan belum dianggap sebagai bekerja (Wawancara Mendalam). Karena konsep tersebut para orang-orang muda di Bangka berusaha mencari pekerjaan di sektor formal. Sebab pekerjaan di sektor formal memberikan jaminan pendapatan yang tetap dan tidak terpengaruh



musim maupun pasar. Konsep kerja tersebut barangkali juga didukung oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan mereka dibanding dengan orang-orang tua mereka. Mereka menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat dan bidang pendidikan yang mereka miliki. Konsep kerja tersebut yang antara lain ikut mendorong orang-orang muda Bangka banyak meninggalkan desanya pergi ke kota-kota di Bangka atau bahkan meninggalkan Pulau Bangka melanjutkan sekolah, merantau atau mencari pekerjaan di Jawa atau daerah lain di Indonesia. Apalagi setelah banyak orang-orang muda Bangka yang berhasil meniti karier di luar Bangka dan berhasil menjadi pejabat tinggi di Jawa atau banyak di antara mereka yang telah berhasil menempuh pendidikan tinggi di Jawa dan kemudian berhasil menduduki jabatan tinggi di Kabupaten Bangka atau Propinsi Bangka Belitung.

### ***Suku Bangsa dan Sejarah Penduduk Bangka***

Penduduk Propinsi Bangka Belitung terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada 7 suku bangsa mendiami propinsi ini. Secara umum suku yang paling banyak (di atas 50 persen) mendiami propinsi ini adalah Suku Melayu Bangka. Suku ini merupakan penduduk keturunan Melayu yang berasal dari Pulau Bangka. Urutan kedua sekitar 18 persen adalah Suku Melayu Belitung. Mereka merupakan penduduk Melayu yang berasal dari Kabupaten Belitung. Kemudian yang cukup menarik adalah suku dalam urutan ketiga ternyata Suku Cina (11,5 persen). Meskipun hanya urutan ketiga namun Suku Cina merupakan suku yang tertua masuk Bangka Belitung. Urutan keempat (5,8 persen) adalah Suku Jawa, ternyata meskipun jumlah penduduk Jawa merupakan mayoritas penduduk Indonesia tidak banyak yang tertarik masuk dan tinggal di Propinsi Bangka Belitung. Sebab daerah ini bukan daerah pertanian tanaman pangan yang menjadi mata pencaharian bagi banyak penduduk Jawa. Kemudian dalam proporsi yang lebih kecil lagi adalah Suku Bugis, Melayu Palembang, Madura dan lainnya.

Sebagaimana di tingkat propinsi, di Kabupaten Bangka penduduknya juga terdiri dari berbagai suku. Hampir 70 persen penduduk Kabupaten Bangka adalah Suku Melayu Bangka. Selanjutnya sekitar 11 persen ternyata Suku Cina dan Suku Jawa menduduki urutan ketiga, yaitu hanya sekitar 6 persen. Sejarah masuknya Suku Cina tersebut masuk Pulau Bangka sudah cukup

lama. Menurut informan, suku pertama yang mendiami Pulau Bangka adalah orang-orang dari Daratan Cina yang dikenal dengan orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa tersebut didatangkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk dimanfaatkan sebagai kuli tambang dalam eksploitasi tambang timah di pulau ini. Oleh sebab itu, karena sejarahnya sudah cukup lama di antara para turunan orang Tionghoa tersebut sudah menganggap sebagai penduduk asli Bangka. Hal itu disebabkan karena orang tua mereka juga sudah dilahirkan di Pulau Bangka. Mereka dikenal sebagai Cina Bangka. Sebuah sumber mengatakan ada hubungan antara *timah, orang Tionghoa dan Bangka*. Ketiga kata tersebut merupakan satu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan yang saling mengadakan dan mentiadakan. Produksi timah di Pulau Bangka berusia ratusan tahun dan dikenal sebagai pemasok timah terbesar di dunia. Tambang timah tersebut pada tahun 1700-an tidak dapat dieksploitasi besar-besaran tanpa orang-orang Tionghoa sebagai pekerjanya.

Dengan adanya multi etnik yang mendiami Pulau Bangka dan ketiadaan penduduk asli pulau ini, menyebabkan Bangka tidak memiliki budaya yang khas atau budaya suatu etnik tertentu yang dominan. Budaya yang ada merupakan campuran antara budaya Melayu dan Tionghoa. Kaitannya dengan pengembangan pariwisata, setiap awal April di Bangka sering ada acara perayaan *Ceng Beng*, yaitu ritual sembahyang kubur yang dilakukan warga Tionghoa untuk menghormati para arwah leluhurnya. Pada waktu-waktu menjelang perayaan tersebut jumlah kunjungan warga Tionghoa dari luar Bangka cukup tinggi termasuk dari Jawa. Mereka umumnya menggunakan transportasi udara dan pada waktu-waktu itu beberapa perusahaan penerbangan terpaksa menambah jumlah penerbangan. Upacara *Ceng Beng* tersebut mengharuskan semua sanak keluarga mereka yang di rantau untuk datang, paling tidak satu orang per keluarga untuk hadir dan mempersembahkan sesaji ke makam leluhur mereka (Wawancara Mendalam). Oleh karena itu, adanya upacara tersebut telah memberikan nilai tambah tidak sedikit bagi ekonomi Bangka. Dari sisi sektor pariwisata dengan adanya acara tersebut cukup menguntungkan, sebab banyak hotel-hotel yang penuh hunian, rumah makan dan restoran laku, barang hasil kerajinan dan makanan khas yang dapat dipasarkan. Untuk mendukung program pariwisata di Kabupaten Bangka telah dibangun hotel-hotel berbintang di daerah pesisir.

**Tabel 2.16 :**  
**Penduduk Propinsi Bangka Belitung Menurut Suku Bangsa,**  
**Tahun 2000**

Suku Bangsa	Bangka		Belitung		Pangkal Pinang		Prop Babel	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Melayu Bangka	397.741	69,9	1.360	0,6	66.204	52,8	465.305	51,7
Melayu Belitung	3.408	0,6	154.332	75,4	1.681	1,3	159.421	17,7
Cina	65.356	11,5	12.892	6,3	25.488	20,3	103.736	11,5
Jawa	33.523	5,9	8.534	4,2	10.257	8,2	52.314	5,8
Bugis, Ugi	13.210	2,3	10.380	5,1	572	0,4	24.162	2,7
Melayu Palembang	7.210	1,2	1.474	0,7	3.218	2,5	11.902	1,3
Madura	4.740	0,8	2.322	1,1	3.193	2,5	9.985	1,1
Melayu	7.221	1,2	857	0,4	1.488	1,2	9.566	1,0
Lainnya	36.881	6,5	12.422	6,1	13.195	10,5	62.498	6,9
<b>Jumlah</b>	<b>569.020</b>	<b>100</b>	<b>204.573</b>	<b>100</b>	<b>125.296</b>	<b>100</b>	<b>898.889</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000, Seri L 2.2.9.

### ***Kepercayaan yang dianut penduduk***

Ada lima agama besar yang dianut penduduk di Kabupaten Bangka, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Dari lima agama tersebut Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk. Secara umum pemeluk agama Islam mencapai sekitar 87,4 persen. Mereka adalah sebagian besar penduduk setempat dan dari Suku Melayu Bangka dan Suku Melayu Belitung. Proporsi Islam yang mayoritas tersebut terjadi baik di Kota Pangkal Pinang maupun Kabupaten Belitung. Urutan kedua, meskipun perbedaannya sangat kontras dibandingkan jumlah penganut Islam, yaitu penganut agama Budha. Jumlah penganut agama Budha di kabupaten ini hanya mencapai sekitar 7 persen. Mereka kebanyakan dianut oleh Suku Cina. Urutan selanjutnya adalah penganut Katolik dan Protestan yang masing-masing secara umum propinsi hanya di bawah 2 persen. Jumlah penganut yang paling kecil adalah agama Hindu, di bawah 0,5 persen.

**Tabel 2.17:**  
**Penduduk Propinsi Bangka Belitung Menurut Agama, Tahun 2000**

Suku Bangsa	Bangka		Belitung		Pangkal Pinang		Prop. Babel	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Islam	497.532	87,4	189.170	92,4	95.290	76,0	781.992	89,9
Katolik	7.091	1,2	1.187	0,6	5.148	4,1	13.426	1,5
Protestan	6.456	1,1	1.914	0,9	3.342	2,7	11.712	1,3
Hindu	1.133	0,2	637	0,3	408	0,3	2.178	0,2
Budha	39.591	6,9	11.426	5,6	14.000	11,2	65.017	7,2
Lainnya	17.322	3,0	317	0,2	7.131	5,7	24.770	2,7
Jumlah	569.125	100	204.651	100	125.319	100	899.095	100

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000, Seri L 2.2.9.

### **Hubungan Sosial dan Mata Pencarian Penduduk**

Adanya multi etnik seperti telah dikemukakan di atas menjadikan kemungkinan adanya konflik kepentingan antar suku dalam kehidupan. Pada mulanya sektor pertambangan, yaitu timah dikuasai oleh Kolonial Belanda dan penduduk Cina sebagai buruhnya. Namun setelah era kemerdekaan, penambangan timah diambil alih pemerintah Indonesia, buruh penambangan timah berangsur-angsur digeser oleh penduduk pribumi (penduduk Melayu). Penduduk Cina sebagian berangsur-angsur berpindah ke usaha perdagangan dan jasa non-pemerintah yang tidak banyak digeluti oleh penduduk pribumi. Sebagian penduduk Cina yang lain kembali ke daerah asal. Oleh karena itu, usaha perdagangan di perkotaan kebanyakan didominasi oleh warga keturunan Cina.

Di samping di sektor pertambangan, usaha pertanian termasuk perkebunan masih didominasi oleh penduduk Melayu sampai sekarang. Sekitar 53 persen penduduk yang bekerja di Propinsi Bangka Belitung bekerja di lapangan usaha pertanian. Dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah mereka yang bekerja di perkebunan, antara lain perkebunan lada, cengkeh dan kelapa. Proporsi terbanyak ini berada di Kabupaten Bangka. Sedangkan penduduk yang bekerja di pertanian tanaman pangan ternyata sangat kecil hanya sekitar 4 persen. Urutan berikutnya yang cukup menonjol adalah penduduk yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan, di daerah perkotaan kebanyakan suku Cina. Di Kota Pangkal Pinang penduduk yang bekerja di sektor jasa dan

perdagangan ini merupakan proporsi yang terbanyak. Sektor jasa yang ada di propinsi ini adalah instansi pemerintah, swasta dan jasa lainnya. Sedangkan perdagangan kemungkinan perdagangan hasil perkebunan yang paling menonjol.

**Tabel 2.18:**  
**Lapangan Pekerjaan Penduduk Propinsi Bangka Belitung**  
**Menurut Daerah Tingkat II, Tahun 2000**

Lapangan Usaha	Bangka		Belitung		Pangkal Pinang		Bangka Belitung	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian t. pangan	12.623	4,6	1.723	2,0	834	1,9	15.180	3,8
Perkebunan	130.053	47,6	26.400	31,5	1.733	3,9	158.186	39,4
Perikanan	13.380	4,9	9.333	11,1	977	2,2	23.690	5,9
Peternakan	2.085	0,7	311	0,4	157	0,3	2.553	0,6
Pertanian lainnya	13.717	5,0	2.595	3,1	692	1,5	17.004	4,2
Industri pengolahan	7.306	2,7	3.628	4,3	1.841	4,1	12.775	3,2
Perdagangan	15.329	5,6	7.555	9,0	9.116	20,5	32.000	7,9
Jasa	24.065	8,8	13.853	16,5	16.679	37,6	54.597	13,6
Angkutan	2.596	0,9	1.804	2,1	1.441	3,2	5.841	1,4
Lainnya	49.946	18,4	16.440	19,6	10.697	24,1	77.083	19,2
<b>Jumla</b>	<b>272.832</b>	<b>100</b>	<b>83.647</b>	<b>100</b>	<b>44.391</b>	<b>100</b>	<b>400.970</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

Di Kabupaten Bangka konflik antar suku tidak begitu nampak, karena masing-masing suku mengisi lapangan usaha masing-masing. Tenaga kerja yang bekerja di usaha perkebunan mencapai hampir 50 persen, umumnya diisi oleh penduduk Melayu. Mereka termasuk yang bekerja di perkebunan lada, kelapa sawit dan cengkeh. Bagi yang bekerja di perkebunan kelapa sawit termasuk mereka yang bekerja di perkebunan rakyat maupun di perkebunan kelapa sawit swasta. Sedangkan penduduk yang bekerja di pertambangan dari data sensus tidak nampak, mungkin mereka termasuk dalam industri pengolahan yang hanya 2,7 persen. Kemungkinan lainnya lapangan pekerjaan mereka termasuk dalam kategori lainnya yang mencapai sebesar 18,4 persen. Sektor perdagangan sebesar 5,6 persen kebanyakan diisi oleh suku keturunan Cina dan yang paling menonjol di perkotaan. Sedangkan subsektor perikanan sebesar 4,9 persen kebanyakan dilakukan oleh suku Bugis. Di samping itu, karena sudah sejak lama antara

penduduk suku Cina dan suku Melayu hidup berdampingan, sudah banyak terjadi perkawinan campuran. Dalam keyakinan keberagaman, sudah makin banyak suku keturunan Cina yang ikut beragama Islam. Oleh karena itu, perkawinan campuran antar kedua suku tersebut sudah tidak menjadi masalah.

Penduduk Bangka Belitung yang masuk dalam tenaga kerja dilihat dari status pekerjaannya, ternyata proporsi yang terbesar adalah sebagai buruh/karyawan. Hal ini kebanyakan terjadi di semua kabupaten/kota di Propinsi Bangka Belitung. Di Kota Pangkal Pinang proporsi penduduk yang statusnya buruh/karyawan ini mencapai 57 persen. Mereka adalah para karyawan yang bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta. Proporsi kedua yang cukup besar adalah penduduk yang status pekerjaannya sebagai berusaha sendiri. Di perkotaan seperti Kota Pangkal Pinang kemungkinan adalah para pekerja sektor informal, seperti pedagang eceran, jasa perbengkelan dan lainnya. Sedangkan di daerah pedesaan (Kabupaten Bangka dan Belitung) mereka adalah para petani yang lahannya sempit, sehingga tidak memerlukan bantuan tenaga orang lain atau tenaga buruh.

**Tabel 2.19:**  
**Status Pekerjaan Utama Penduduk Propinsi Bangka Belitung**  
**Menurut Daerah Tingkat II, Tahun 2000**

Status Pekerjaan Utama	Bangka		Belitung		Pangkal Pinang		Bangka Belitung	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Berusaha sendiri	70.815	25,9	33.946	40,6	12.106	27,3	116.867	29,1
Berusaha dibantu buruh tak tetap	49.277	18,0	7.019	8,4	2.838	6,4	59.134	14,7
Berusaha dengan buruh tetap	2.113	0,8	1.033	1,2	806	1,8	3.952	1,0
Buruh/Karyawan Pekerja tak dibayar	74.658	27,3	32.409	38,7	25.322	57,0	132.389	33,5
	74.271	27,2	9.238	11,0	3.011	6,8	86.520	21,6
<b>Jumlah</b>	<b>272.832</b>	<b>100</b>	<b>83.647</b>	<b>100</b>	<b>44.391</b>	<b>100</b>	<b>400.870</b>	<b>100</b>

Sumber : Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

Di Kabupaten Bangka penduduk yang masuk dalam tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan sebesar 27, 3 persen.

Angka tersebut merupakan proporsi yang tertinggi. Sangat dimungkinkan kebanyakan mereka adalah para karyawan dan para buruh tambang timah, meskipun usaha pertambangan sudah mulai menurun akhir-akhir ini. Kemudian urutan kedua yang hampir sama dengan status buruh/karyawan adalah pekerja tak dibayar, yaitu anggota keluarga yang hanya membantu bekerja tanpa menerima imbalan berupa upah. Sedangkan mereka yang statusnya berusaha sendiri cukup besar (26 persen) mereka kemungkinan para petani atau nelayan yang bekerja sendiri di lahannya sendiri.

## **Potensi Ekonomi**

### ***Tingkat pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi***

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka dapat ditunjukkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan kontribusi dari 9 sektor ekonomi, yaitu pertanian, pertambangan, pengolahan/manufaktur, listrik gas air minum, bangunan, perdagangan hotel restoran, pengangkutan & komunikasi, keuangan & jasa perusahaan dan jasa-jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka selama 10 tahun terakhir rata-rata sekitar 5,5 persen. Bencana krisis ekonomi yang dialami Indonesia nampaknya juga sempat melanda kabupaten ini. Pertumbuhan ekonomi minus terjadi pada tahun 1997 - 1998, kemudian kembali positif lagi menjadi 3,3 persen pada tahun 1999 dan meningkat lagi menjadi 6 persen pada tahun 2000 (BPS & Bappeda, 2002). Pada tahun 2000 memang telah mulai ada pemulihan ekonomi di kabupaten ini, meskipun tidak sebesar sebelum tahun 1997.

Sektor ekonomi yang menonjol kontribusinya sebelum krisis (1996) adalah pertambangan (timah dan kuarsa) dan pengolahan. Namun setelah krisis pada tahun 2000 nampaknya hanya sektor pertanian yang mampu bertahan, terutama subsektor perkebunan. Subsektor ini merupakan kegiatan ekonomi yang cukup tahan terhadap krisis ekonomi, terutama komoditi perkebunan yang pemasarannya ke luar negeri (ekspor). Di kabupaten Bangka subsektor perkebunan tersebut adalah hasil lada dan kelapa sawit. Pada masa krisis, sektor yang paling terpuruk sampai sekarang adalah pertambangan dan pengolahan. Perkebunan dan perikanan merupakan subsektor dari sektor pertanian yang kabupaten ini

nampaknya akan terus dikembangkan sebagai substitusi sektor pertambangan timah yang sudah semakin menurun produksinya. Usaha perkebunan kelapa sawit yang selama ini telah beroperasi di Kabupaten Bangka dan telah mengembangkan komoditi kelapa sawit seluas 51.121,96 ha. Sedangkan areal percadangannya secara keseluruhan ada sekitar 147.375 ha. Pemerintah daerah nampaknya mulai sadar, bahwa pertambangan timah sudah tidak dapat diandalkan lagi. Tambang-tambang timah akhir-akhir ini mulai beralih pengelolaannya dari perusahaan pertambangan besar menjadi usaha tambang rakyat (TI - *tambang inkonvensional*). Sayang usaha pertambangan rakyat ini masih menggunakan teknologi yang sederhana dan kurang memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, usaha tambang rakyat telah meninggalkan *kolong-kolong* (lobang besar), pencemaran air sungai dan air sumur penduduk dan menghasilkan padang-padang kering yang tidak dapat ditanami baik tanaman pangan maupun perkebunan. Sedangkan di daerah-daerah yang tidak ada deposit tambang timah dapat dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan, seperti wilayah Bangka Tengah. Subsektor perkebunan (kelapa sawit dan lada) dan perikanan tersebut akan menjadi harapan daerah ini dan telah menjadikan subsektor ini sebagai salah satu unggulannya.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga yang berlaku di Kabupaten Bangka tahun 2000 telah mencapai Rp 3 577 823 juta (BPS, 2001). Kontribusi yang terbesar adalah sektor industri pengolahan, meskipun hanya mencapai sekitar 34 persen. Kemudian urutan kedua sektor pertanian sekitar 23 persen, dengan kontribusi terbesar subsektor perkebunan yang meliputi produk lada, kelapa sawit dan cengkeh. Sedangkan sektor pertambangan hanya menduduki urutan ketiga sekitar 19 persen. Kontribusi sektor pertambangan cenderung menurun, sehubungan dengan makin menurunnya produk timah pada akhir 90-an sampai sekarang. Sedangkan kecenderungan kontribusi masing-masing sektor tersebut, ternyata sektor pertanian cenderung ada kenaikan selama 5 tahun terakhir (1996-2000). Kenaikan dari 20,9 persen pada tahun 1996 menjadi 26,5 persen pada tahun 2000. Kontribusi sektor pertanian yang paling menonjol adalah subsektor perkebunan dan perikanan. Luas pantai Bangka Belitung untuk kegiatan perikanan mencapai sepanjang 2.758 km<sup>2</sup> dan lahan pertambakan sekitar 114.655 ha (<http://agribisnis.deptan.go.id/usaha/investasi/bangka/peluang3.htm>). Dari luas pantai di propinsi tersebut sebagian besar berada di Kabupaten Bangka. Oleh karena itu,



potensi perikanan di kabupaten ini cukup besar dan masih bisa terus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan PDRB kabupaten. Bahkan menurut Dinas Perikanan Pemprov Bangka Belitung, PT Bangka Usaha Mina (BUM) investor dari luar Bangka Belitung akan menanamkan modalnya sebesar Rp 636 miliar untuk usaha bidang perikanan. Mereka akan mengoperasikan 8 buah armada kapal penangkapan ikan di laut lepas Cina Selatan dan akan berlabuh di wilayah Bangka. PT ini juga merencanakan membangun pabrik es, industri galangan kapal, pabrik tepung ikan, pabrik pengalengan ikan dll, di samping akan meningkatkan pendapatan daerah juga memberikan kesempatan kerja bagi penduduk Bangka. Peluang-peluang kerja tersebut diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sekitar 5 000 orang tenaga kerja.

**Tabel 2.20:**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka**  
**(Atas Dasar Harga Berlaku), Tahun 2000**

Lapangan Usaha	Dalam Jutaan Rupiah	Persen
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	813.715	22,7
a. Tanaman bahan makanan	134.527	3,9
b. Tanaman perkebunan	410.482	11,1
c. Peternakan	32.375	1,0
d. Kehutanan	38.906	0,9
e. Perikanan	197.425	5,4
2. Pertambangan & Penggalian	700.622	19,6
3. Industri pengolahan	1.236.362	34,5
4. Listrik, gas & air bersih	14.034	0,4
5. Bangunan	205.942	5,7
6. Perdag, hotel & restoran	286537	8,0
7. Angkutan & komunikasi	69.020	1,9
8. Keu, persewaan & Jasa pers	99.393	2,8
9. Jasa	152.198	4,2
Jumlah	3.577.823	100,0

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bangka 1993-2000.

**Tabel 2.21:**  
**Tren Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangka**  
**(Atas Dasar Harga Konstan), Tahun 1996-2000**

Lapangan Usaha	1996	2000
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	20,9	26,5
a. Tanaman bahan makanan	3,8	4,0
b. Tanaman perkebunan	10,0	16,8
c. Peternakan	1,3	1,5
d. Kehutanan	1,5	1,0
e. Perikanan	4,2	6,34
2. Pertambangan & Penggalan	21,5	17,5
3. Industri pengolahan	27,4	23,5
4. Listrik, gas & air bersih	0,6	0,7
5. Bangunan	8,7	6,6
6. Perdag, hotel & restoran	10,4	11,8
7. Angkutan & komunikasi	2,5	2,3
8. Keu, persewaan & Jasa pers	3,5	3,6
9. Jasa	4,4	4,3
Jumlah	100,0	100,0

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Bangka 1993-2000.

### ***Penyerapan tenaga kerja sektoral***

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk terakhir (tahun 2000) sekitar 53 persen tenaga kerja di Propinsi Bangka Belitung terserap di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah mereka yang terserap di perkebunan, antara lain perkebunan lada, cengkeh dan kelapa. Proporsi tenaga kerja terbanyak ini berada di Kabupaten Bangka. Sedangkan tenaga kerja yang terserap di subsektor pertanian tanaman pangan ternyata sangat kecil hanya sekitar 4 persen. Urutan berikutnya yang cukup menonjol adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa dan perdagangan. Di Kota Pangkal Pinang penduduk yang terserap di sektor jasa dan perdagangan ini merupakan proporsi yang terbanyak. Sektor jasa yang ada di propinsi ini adalah instansi pemerintah dan swasta dan jasa lainnya. Sedangkan perdagangan kemungkinan perdagangan hasil perkebunan yang paling menonjol.

Di Kabupaten Bangka paling tinggi proporsi tenaga kerja yang terserap di subsektor perkebunan, hampir mendekati 50 persen. Proporsi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

propinsi dan Kabupaten Belitung. Mereka paling dominan bekerja di perkebunan lada, cengkeh dan kelapa sawit dan kelapa nyiur. Nampaknya kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang cukup cocok dengan potensi sumber daya alam Bangka, terutama di daerah pedalaman Bangka Tengah. Cocok dalam arti ketersediaan lahan, kondisi tanah dan kondisi topografi wilayahnya. Oleh karena itu, perkebunan kelapa sawit dijadikan salah satu unggulan di kabupaten ini. Menurut informasi tanaman kelapa sawit di daerah ini bisa tumbuh subur dan cepat, kualitas produknya cukup baik dan dapat mulai berbuah pada usia 3,5 tahun. Di daerah Bangka Tengah sedang direncanakan untuk dibuka lahan perkebunan kelapa sawit seluas 6 ribu hektar dan diperkirakan dapat memberikan lahan kepada 3 ribu orang petani. Masing-masing petani diharapkan dapat mengelola sekitar 2 hektar kebun. Program tersebut akan memerlukan dana sekitar Rp 150 milyar dan diperkirakan akan membuka lapangan kerja lebih dari 10.000 orang tenaga kerja dengan asumsi tiap 2 hektar lahan kebun kelapa sawit mampu menyerap 5 orang tenaga kerja. Suatu lapangan kerja yang masih terbuka luas, namun masih kecil proporsi angkatan kerja yang terserap adalah perikanan terutama perikanan laut. Jumlah angkatan kerja yang terserap di perikanan atau nelayan hanya sekitar 5 persen.

**Tabel 2.22:**  
**Lapangan Pekerjaan Tenaga Kerja Propinsi Bangka Belitung**  
**Menurut Daerah Tingkat II, Tahun 2000**

Lapangan Usaha	Bangka		Belitung		Pangkal Pinang		Bangka Belitung	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian tanaman pangan	12.623	4,6	1.723	2,0	834	1,9	15.180	3,8
Perkebunan	130.053	47,6	26.400	31,5	1.733	3,9	158.186	39,4
Perikanan	13.380	4,9	9.333	11,1	977	2,2	23.690	5,9
Peternakan	2.085	0,7	311	0,4	157	0,3	2.553	0,6
Pertanian lainnya	13.717	5,0	2.595	3,1	692	1,5	17.004	4,2
Industri pengolahan	7.306	2,7	3.628	4,3	1.841	4,1	12.775	3,2
Perdagangan	15.329	5,6	7.555	9,0	9.116	20,5	32.000	7,9
Jasa	24.065	8,8	13.853	16,5	16.679	37,6	54.597	13,6
Angkutan	2.596	0,9	1.804	2,1	1.441	3,2	5.841	1,4
Lainnya	49.946	18,4	16.440	19,6	10.697	24,1	77.083	19,2
<b>Jumlah</b>	<b>272.832</b>	<b>100</b>	<b>83.647</b>	<b>100</b>	<b>44.391</b>	<b>100</b>	<b>400.970</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, Bangka Belitung : Hasil Sensus Penduduk 2000.

## **Tata Guna Tanah**

Luas lahan di wilayah Propinsi Bangka Belitung sekitar 1.779.448 hektar (17.794 km<sup>2</sup>). Dari luas lahan tersebut pemanfaatannya yang paling dominan untuk lahan kering (55,9 persen) dan penggunaannya untuk pekarangan, tegal/ kebun, ladang/ huma dan penggembalaan. Penggunaan lainnya yang cukup luas adalah untuk perkebunan (8,7 persen), hutan rakyat (17,4 persen) dan lahan yang belum diusahakan (12,3 persen). Penggunaan lahan kering lainnya adalah untuk pekarangan, tegal/kebun, ladang/huma dan penggembalaan. Lahan persawahan hanya sekitar 0,2 persen, kebanyakan masih merupakan sawah irigasi sederhana dan tadah hujan.

Di Kabupaten Bangka luas lahan secara keseluruhan memang jauh lebih luas dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dari luas lahan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bangka sekitar 14,8 persen yang merupakan lahan yang belum diusahakan dan 12,8 persen merupakan hutan rakyat. Sedangkan lahan yang telah diusahakan untuk perkebunan hanya 9,5 persen, baik untuk perkebunan lada, kelapa sawit, karet dan cengkeh. Oleh karena itu, masih cukup banyak lahan yang masih dapat digunakan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut tepat apabila Pemerintah Daerah ingin menarik para investor baik para investor daerah Bangka sendiri maupun dari luar untuk membuka dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Hanya yang harus dipertimbangkan jangan sampai memanfaatkan daerah perbukitan/ pegunungan dengan kemiringan tajam yang mestinya harus tetap dipertahankan sebagai hutan lindung untuk pelestarian alam dan konservasi air. Dalam hal ini peran Badan Pertanahan Daerah sangat penting untuk memberikan informasi data tentang wilayah-wilayah mana dan kemiringan berapa yang layak atau secara topografinya yang cocok untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perkebunan juga harus mempertimbangkan tata guna tanah yang ada dan persyaratan geografisnya.

**Tabel 2.23:**  
**Tata Guna Tanah Wilayah Propinsi Bangka Belitung**  
**Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 1990**

Penggunaan Tanah	Kab. Bangka		Kab. Belitung		Kota Pangkal Pinang		Propinsi Bangka Belitung	
	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%	Hektar	%
Lahan Sawah	2.706	0,2	295	0,1	-	-	3.001	0,2
• Irigasi teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
• Irigasi ½ teknis	244	-	31	-	-	-	275	-
• Irigasi sederhana	672	-	67	-	-	-	739	-
• Tadah hujan	108	-	47	-	-	-	155	-
• Pasang surut	-	-	-	-	-	-	-	-
• Sawah lainnya	1.682	-	150	-	-	-	1.832	-
Lahan kering	755.945	56,4	230.812	53,7	7.750	74,7	994.507	55,9
• Pekarangan	67.397	-	10.483	-	4.711	-	82.591	-
• Tegall/kebun	56.461	-	13.717	-	394	-	70.572	-
• Ladang/ huma	23.820	-	711	-	-	-	24.531	-
• Pengembalaan	27.473	-	7.372	-	28	-	34.873	-
Rawa-rawa	79.822	5,9	14.048	3,2	670	6,4	94.540	5,3
Tambak	58	-	14	-	31	-	103	-
Kolam/tebat/ empang	3.057	-	4	-	5	-	3.066	-
L. tak diusahakan	198.912	14,8	19.469	4,5	1.105	10,6	219.486	12,3
Hutan rakyat	171.999	12,8	137.692	32,0	-	-	309.691	17,4
Perkebunan	126.946	9,5	27.302	6,3	806	7,8	155.054	8,7
Jumlah	1.339.445	100,0	429.636	100,0	10.367	100,0	1.779.448	100,0

Sumber : BPS Kab. Bangka, Survei Pertanian 1990.

### **Besar PAD dan kontribusi sektoral**

Menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka pendapatan asli daerah kabupaten ini ada kecenderungan terus meningkat sejak awal tahun 90-an. Fluktuasi penurunan hanya terjadi pada tahun-tahun krisis 1996/1997 dan 1997/1998 hanya mencapai di bawah 15 milyar rupiah, sedangkan tahun sebelumnya sempat mencapai 25 milyar. Namun kemudian terus meningkat lagi diatas 30 milyar. Bahkan pada tahun anggaran 2001 telah mencapai sebesar 81 milyar rupiah atau telah melampaui target sebesar 132 persen. Kontribusi yang paling besar berasal dari bagi hasil pajak (Rp 21 milyar) dan bagi hasil bukan pajak (Rp 31 milyar). Sedangkan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan keuntungan BUMD hanya sebesar 29 milyar. Penerimaan dari dinas-dinas selama masih kosong.

## *Peluang investasi*

Peluang investasi yang ada di Kabupaten Bangka antara lain perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan, pariwisata, perindustrian, kehutanan dan pertanian.

- a. Peluang investasi perkebunan  
Peluang perkebunan di daerah ini cukup menjanjikan. Dua jenis komoditi perkebunan utama yang telah diusahakan adalah lada dan kelapa sawit. Lada diusahakan oleh rakyat dan kelapa sawit oleh perkebunan besar. Beberapa keunggulan komoditi tersebut adalah: (1) merupakan kebutuhan ekspor; (2) menjadi kebiasaan penduduk; (3) potensi lahan luas; dan (4) devisa dinikmati langsung oleh penduduk.
- b. Peluang investasi perikanan dan kelautan  
Potensi laut di kabupaten ini masih cukup besar, para nelayan selama ini masih menggunakan cara tangkap yang tradisional. Oleh karena itu, prospektif bagi investor untuk pengadaan kapal motor dan alat tangkap yang lebih produktif, pembangunan gudang dingin, pabrik es dan pengolahan ikan. Meskipun ada budi daya ikan keramba, kerang mutiara dan tambak udang, namun dari luas lahan yang ada baru sebagian kecil yang dimanfaatkan. Jadi peluang budidaya perikanan juga masih terbuka, sebab pangsa pasar sangat menjanjikan.
- c. Peluang investasi pertambangan  
Potensi tambang yang ada di kabupaten ini adalah timah, kaolin, pasir kuarsa, batu granit dan pasir bangunan. Timah sudah lama diusahakan baik oleh perusahaan maupun oleh rakyat, namun potensi masih ada dan masih ekonomis. Hal ini disebabkan pangsa pasar dunia masih cukup baik. Kemudian kaolin terdapat di Bangka Utara. Bahan ini dapat digunakan untuk pabrik kertas, keramik, kosmetika, cat dll. Bahan ini mempunyai pangsa pasar yang baik, baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan pasir kuarsa tersebar di banyak tempat di Bangka, kegunaan untuk bahan pembuat kaca, penyaringan air minum dan campuran lumpur penambangan minyak. Kemudian ada potensi minyak dan gas bumi merupakan cadangan minyak dan gas bumi *off-shore* tersebar di perairan bagian selatan Kabupaten Bangka. Namun sampai sekarang belum dieksplorir.

- d. Peluang investasi pariwisata  
Dengan berbagai potensi wisata yang ada di kabupaten ini, maka investasi yang perlu digalakan adalah pengusahaan objek wisata dengan segala sarana dan prasarananya, biro perjalanan wisata, pengembangan taman hiburan/ rekreasi serta penunjang lainnya. Penunjang seperti pendidikan kepariwisataan, tempat penukaran uang dsb.
- e. Peluang investasi perindustrian  
Adanya potensi perikanan, pertambangan, perkebunan dll, maka prospek industri yang bahan dasarnya dari potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan. Industri yang akan bisa dikembangkan antara lain industri perkapalan, pengolahan ikan, industri pengolahan bahan tambang (timah, keramik, kuarsa, kaolin), industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan lada dsb.
- f. Peluang investasi kehutanan  
Sumber daya hutan belum diolah secara maksimal, peluang investasi di kabupaten ini adalah membangun industri pengolahan kayu.
- g. Peluang investasi pertanian  
Usaha pertanian yang dapat dikembangkan di daerah ini adalah tanaman hortikultura (pisang, durian, jeruk, nanas, duku, salak dsb. Selama ini masih merupakan usaha sampingan penduduk. Oleh karena itu, masih bisa dikembangkan mengingat pangsa pasar cukup baik, hanya usaha pengemasan dan pengawetannya supaya tidak rusak sampai konsumen.

Ada pengaruh positif dan negatif yang timbul dengan adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah Kabupaten Bangka yang baru saja dilakukan. Pengaruh positifnya adalah kebijakan tersebut akan mempercepat proses pembangunan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dari negatifnya adalah dengan adanya otonomi daerah dan pemekaran/ pemecahan wilayah tersebut dapat menimbulkan adanya keresahan bagi para pengusaha atau investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah ini. Dengan adanya otonomi daerah dan pemecahan wilayah tentu akan ada peraturan daerah (Perda) baru untuk menarik pungutan-pungutan berupa pajak atau jenis yang lain yang akan membebani para pengusaha atau investor. Pungutan-pungutan tersebut memang dibutuhkan Pemerintah Daerah yang baru untuk mendapatkan atau meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dengan terbebannya para pengusaha akan mengurangi tingkat keuntungan atau bahkan merugi dan mengakibatkan mereka gulung tikar atau mengalihkan modalnya ke daerah lain yang lebih menguntungkan, karena merasa usaha di daerah ini kurang aman. Bagi investor atau pengusaha eksportir lada dengan adanya iuran wajib, yakni harus bayar Rp 50,-/kg lada. Dengan adanya kebijakan tersebut yang bakal dirugikan adalah petani lada sendiri. Para eksportir adalah pedagang yang tidak mau rugi, oleh karena itu iuran tersebut akan dibebankan kepada para petani lada. Sebagai akibatnya akan mengurangi pendapatan petani lada, apalagi harga lada di pasar lokal sedang jatuh akhir-akhir ini semakin memperburuk pendapatan petani lada. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan daerah melalui peraturan daerahnya jangan sampai terlalu membebani para pengusaha atau para investor agar perekonomian daerah dapat terus meningkat dan para investor merasa untung.

## Daftar Pustaka

BPS (1990)

*Survai Pertanian 1990*, Bangka : BPS Kab. Bangka.

BPS (2001)

Bangka Belitung : Sensus Penduduk 2000, Seri L 2.2.9,  
Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik Prop Kep. Bangka Belitung (2002a)

*Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2001*. Pangkal Pinang : BPS Prop Kep. Babel.

----- (2002b)

*Indikator Kesejahteraan Rakyat: Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2001*. Pangkalpinang: BPS Propinsi Kepulauan Babel.

----- (2002 c)

*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha: Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 1993-2001*. Pangkalpinang: BPS Propinsi Kepulauan Babel.



BKPMD Propinsi Kepulauan Babel (2002).

*Bahan Promosi dan Peta Peluang Investasi Propinsi Babel.*  
Laporan Akhir. Pangkalpinang: BKPMD Propinsi Kepulauan Babel.

Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (2002)

*Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2002-2006,* Pangkal Pinang : Pemprop. Kep. Bangka Belitung

----- (2002)

*Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2002-2006,* Pangkal Pinang : Pemprop Kep. Bangka Belitung.

Pemerintah Kabupaten Bangka (2001)

*Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Bangka 2002-2004.* Sungai Liat : Pemkab Bangka.

----- (2002)

*Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2002-2004.* Sungai Liat : Pemkab Bangka.

PT Timah Tbk (tak ada tahun)

*Restrukturisasi PT Timah Tbk,* Pangkal Pinang : PT Timah



# BAGIAN III

## KETENAGAKERJAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH : Arah dan Strategi Kebijakan

Oleh : YB Widodo

### Pendahuluan

Setelah otonomi daerah dicanangkan semenjak tahun 2000, semestinya kabupaten telah menyusun berbagai arah dan strategi kebijakan pembangunan dan implementasinya, termasuk di dalamnya adalah bidang ketenagakerjaan. Kajian tentang arah, strategi ketenagakerjaan dan implementasinya dalam otonomi daerah belum banyak dilakukan. Bahkan hal ini masih dianggap sebagai area studi yang jarang dilakukan oleh beberapa pemerhati dari bidang ketenagakerjaan. Penciptaan kesempatan kerja pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh komponen jumlah tenaga kerja (*supply side*) dan jumlah permintaan tenaga kerja yang diinginkan (*demand side*). Mengutip dari Silalahi (1980) bahwa perencanaan tenaga kerja di Indonesia sulit dilakukan dan dilaksanakan karena pada umumnya kesempatan kerja masih sangat terbatas bila dibanding dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia.

Strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi dalam jangka pendek memang akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi (Priyono, 2003). Namun demikian ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan lebih berkelanjutan (*sustainable*). Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Seperti industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktifitas, namun sekaligus juga meningkatkan pengangguran dan setengah menanggur. Oleh karena itu diperlukan integrasi dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat mendasar, yaitu besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah menjadi pelaku pembangunan berwawasan dan penikmat hasil pembangunan. Ini berarti bahwa pembangunan berwawasan kependudukan akan mempunyai dampak

terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, dibanding dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan.

Perencanaan tenaga kerja selama ini terutama pada masa Orde Baru masih bersifat *top down policies*, akibatnya kebijaksanaan yang diambil tidak menunjukkan kebutuhan daerah yang sebenarnya. Dalam hal ini perencanaan yang disusun belum mengakomodasi potensi daerah dan juga aspirasi daerah, terutama disebabkan oleh peranan pemerintah pusat dan propinsi masih dominan. Kebijakan OTDA telah dilakukan sejak 2001 untuk mendorong daerah menjadi mandiri dalam mengatur wilayah dan keuangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan mendekatkan diri pada pelayanan kepada masyarakat termasuk kebijakan ketenagakerjaan. Dalam perkembangan selanjutnya adalah munculnya keinginan berbagai daerah untuk memekarkan wilayah, dengan tujuan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabilitas (Harahap, Sofyan. 2002).

Dalam mengkaji arah dan strategi kebijakan ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan: (1). penciptaan lapangan kerja; (2). pendayagunaan tenaga kerja; dan (3). peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah. Ketiga dimensi tersebut merupakan faktor penentu, artinya, tanpa dimensi ekonomi, politik, dan kelembagaan sosial yang ada di suatu daerah, maka penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja tidak akan terjadi.

Tujuan tulisan pada bagian ini adalah mengkaji arah dan strategi kebijakan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Berdasarkan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan dalam penciptaan/perluasan kesempatan kerja dalam konteks otonomi daerah, serta dapat meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia setempat.

## **Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pembangunan Daerah**

Landasan penyusunan Program Pembangunan Daerah (Properda), adalah Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) yang mengacu pada Garis Besar Haluan negara (GBHN) 1999 - 2004. Oleh karena itu arah kebijakan penyelenggaraan daerah telah dituangkan dalam Properda. Properda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam penyusunannya telah mengikutsertakan kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan para pakar (LPEM UI, 2000). Properda dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang memuat sebagai penjabaran GBHD, yang dipakai dalam penyusunan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propeda adalah sesuai dengan pelaksanaan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Dengan demikian Properda dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah atau pedoman kebijakan di tingkat daerah.

Kebijaksanaan ketenagakerjaan yang termuat dalam Properda mempunyai kaitan erat dengan kebijakan ekonomi, dengan demikian perencanaan tenaga kerja merupakan suatu sistem dalam pendayagunaan tenaga kerja dan merupakan bagian integral dari perencanaan sosial ekonomi wilayah bersangkutan (Nagib, 2000). Kebijakan ketenagakerjaan di Propinsi Bangka Belitung dalam kaitannya dengan penyediaan kesempatan kerja merupakan proses dan dinamika dalam kebijakan yang dilakukan, mengingat daerah tersebut merupakan salah satu propinsi baru, maka yang dilakukan adalah memberi prioritas pada lapangan kerja yang dapat memberi pendapatan bagi masyarakat.

Propinsi Kepulauan Bangka dan Belitung merupakan salah satu propinsi baru setelah era reformasi. Dengan diberlakukannya UU no 27 tahun 2000, maka pada 9 Februari 2001 propinsi tersebut dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Bangka, kabupaten Belitung, dan satu kotamadya Pangkalpinang. Sehingga dalam proses perkembangan lebih lanjut arah kebijakan dilakukan, sambil melakukan pembenahan dalam tubuh struktur pemerintahan. Dalam proses pembenahan tersebut telah dilakukan perubahan serta pengaturan kebijakan terhadap penempatan tenaga kerja pada posisi penting atau jabatan tertentu, agar tenaga kerja siap pakai sesuai dengan sarana infrastruktur yang ada. Untuk penempatan

tenaga kerja (pegawai) yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu yang dibutuhkan pada masing-masing jenjang posisi penting tidak menjadi masalah. Permasalahan utama adalah jenjang kedudukan yang membutuhkan kepangkatan tertentu rata-rata masih kurang. Seperti yang terjadi pada kantor Bappeda tingkat propinsi jumlah personel atau staf belum lengkap, walaupun litbangnya sudah ada, Kepala bidang sudah ada, sekretaris sudah ada, akan tetapi sub-sub bagian belum ada. Kondisi seperti lebih parah lagi yang dialami pada tingkat kabupaten, terutama dinas-dinas terkait belum terbentuk secara lengkap. Daya dukung berupa sarana dan parasarana sama sekali belum lengkap demikian pula SDM belum tersedia.

“Kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintah melalui UU no 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah mewujudkan kebijaksanaan otonomi daerah. Daerah otonomi yang berada di tingkat kabupaten/kota berwenang untuk melaksanakan tugas desentralisasi yang diarahkan kepada fungsi penyelenggara daerah. Oleh karena itu permasalahan yang ada sebelum kebijakan otonomi daerah diterapkan, adalah tidak semua kabupaten/kota mempunyai struktur yang mengurus masalah ketenagakerjaan, atau memiliki kantor dinas tenaga kerja. Terutama sekali pada daerah kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sehingga kabupaten tersebut belum memiliki pengalaman mengurus masalah ketenagakerjaan.” (Dinas Tenaga Kerja Kab. Bangka, 2003).

Oleh sebab itu, dalam pembenahan kepegawaian di tingkat propinsi serta kabupaten, telah dilakukan pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) agar dapat dicapai terwujudnya kebijakan manajemen kepegawaian yang diarahkan pada pembinaan aparatur yang profesional, sejahtera, netral dan akuntabel. Pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan langkah awal untuk membangun sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMK), sehingga dapat terekam dalam data base PNS di tingkat nasional. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menyambut otonomi daerah, serta pembenahan status kepegawaian akibat penambahan atau perubahan lembaga instansi yang terkait.

Kebijakan tenaga kerja suatu daerah akan mengarah pada potensi unggulan sumber daya alam yang tersedia. Sebagai propinsi kepulauan Pulau Bangka dan Belitung sejak jaman kolonial Belanda merupakan penghasil utama timah dan lada di Indonesia. Kedua

komoditas tersebut sudah dikembangkan sejak jaman kolonial Portugis dan berlanjut pada era kolonial Belanda hingga sekarang. Penambangan timah dimulai sejak tahun 1852 oleh perusahaan swasta Belanda Gemeenschapelijke Mijnbouw Billiton (GMB) (LPEM UI, 2000). Pada masa pemerintahan RI, timah pernah menjadi eksportir utama ke Amerika dan Eropa. Kemudian pada tahun 1985, harga pasaran timah dunia merosot, yang mengakibatkan kejayaan timah surut. Akibat kondisi ini PT. Timah sebagai satu-satunya BUMN di Indonesia yang mengelola timah melakukan restrukturisasi.

Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan meliputi; (1). Melakukan reorganisasi karyawan; (2). Relokasi dengan melakukan pemindahan kantor pusat dari Jakarta ke Pangkalpinang; (3). Rekontruksi atau perbaikan fasilitas produksi juga melakukan pembubaran Unit Penambangan Timah Belitung (UPT-Bel) pada 29 April 1991; dan (4). Pengalihan fungsi aset non produktif kepada instansi setempat, seperti sekolahan, rumah sakit, penjualan gedung perkantoran. Pada tahun tersebut telah dilakukan pengurangan ribuan karyawan dari jumlah karyawan sebanyak 25.000 orang, dan yang dikenakan PHK sebanyak 19.000 orang sehingga jumlah karyawan tinggal 6000 orang. Agar tidak menimbulkan gejolak sosial, maka bentuk PHK yang dilakukan oleh PT Timah pemberian pensiun dini, dan memindahtugaskan pada instansi lain. Atas dasar ini PT Timah merupakan salah satu BUMN yang melakukan restrukturisasi dengan baik dan pada periode tahun terakhir (1990 - 1997) dapat meningkatkan produktivitas dari 1 ton per karyawan (1990) menjadi 44 ton per karyawan (1997) (Laporan PT Timah, 2003).

Proses restrukturisasi terus berlanjut dengan pembentukan badan usaha yang melakukan pengelolaan timah, yaitu; (1). BUMD (Badan Usaha Milik Pemda); (2). Swasta (Bangka Timah Utama) merupakan perusahaan non pribumi; (3). KOBATIM melakukan kontrak karya, ada kesepakatan bersama antara PT Timah dengan pihak swasta; (4). PT Timah yang melakukan usaha di laut lepas. Keempat badan usaha tersebut merupakan lembaga resmi dan dapat dimonitor oleh pemerintah setempat. Perkembangan selanjutnya tumbuh tambang timah inkonvensional (TI) yang dikelola swasta dan masyarakat setempat, yang relatif tidak ada kontrol terutama berbagai dampak lingkungan. Sebelum TI (timah inkonvensional) skala tambang ada pengawasan terhadap kualitas lingkungan.

Tumbuhnya TI (th 2000) merupakan salah satu cara Pemda untuk memberi kesempatan kerja bagi masyarakat. Saat ini kurang lebih 5000 penambang timah. Apabila satu tambang terdapat 5 orang tenaga kerja, berarti menghidupi 25.000 orang tenaga kerja. Apabila setiap tenaga kerja mempunyai 4 anggota keluarga, berarti dapat menghidupi 100.000 orang, dengan alasan ini maka penambang TI masih tetap dipertahankan (Sekda Kab. Bangka, 2003).

Adapun dampak negatif dari penambangan TI tersebut adalah kegiatannya tidak bisa di pantau oleh pemerintah setempat, baik dari cara operasionalnya maupun besarnya retribusi bagi pendapatan asli daerah. Para TI melakukan penambangan secara liar karena tidak ada batas aturan yang jelas, hal-hal yang dilanggar seperti royalti, pencemaran air tanah dan pajak penambangan tidak dibayar, sehingga sangat merugikan negara. Pemda tidak mampu berbuat banyak, ada kepentingan dibalik itu secara perseorangan, dibelakang kolektor ada yang membaking usaha tersebut. Adapun penambangan timah yang sudah diatur oleh pemerintah daerah, adalah yang terbentang di laut lepas, PT Timah diberi wewenang mengelola usaha tambang tersebut.

Potensi utama di sektor pertanian di Propinsi Bangka Belitung adalah sub sektor perkebunan. Perkebunan mempunyai peran strategis, dalam penyerapan tenagakerja serta pendapatan masyarakat. Kontribusi sektor perkebunan terhadap sektor pertanian adalah sebesar 45 persen tahun 2000 ( Properda Propinsi, 2002) Potensi lahan perkebunan adalah lada, kelapa sawit, karet, cengkeh dan coklat. Dari beberapa komoditas tersebut yang dominan adalah lada putih, mempunyai kualitas tertinggi di dunia. Pada saat krismon, dengan pengaruh nilai dolar yang tinggi, harga lada dapat mencapai Rp 120.000,- per kg, akan tetapi pada saat ini hanya dapat mencapai Rp. 16.000,- Rendahnya harga lada banyak petani lada mengalihkan pekerjaan sebagai buruh tambang timah swasta. Upah yang diperoleh paling sedikit Rp. 15.000,- per hari.

Pemasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan sub sektor perkebunan adalah dihapuskannya subsidi pupuk akan mempengaruhi produktivias lahan pertanian termasuk perkebunan. Rendahnya tingkat pengetahuan petani perkebunan yang masih mengandalkan pada pola tanam yang hanya menunggu saat panen tiba. Begitu perkebunan tersebut menghasilkan atau berbuah baru



para petani mendatangi kebun untuk memanen. Setelah selesai panen ditinggalkan begitu saja tanpa melakukan pemeliharaan secara teratur. Dilain pihak kurangnya akses pasar hasil pertanian, dan kelembagaan petani masih sangat lemah. Ini membuktikan sebagian masyarakat yang mengandalkan kehidupannya pada pertanian masih sangat tergantung pada pihak luar.

Demikian pula permasalahan pada tenaga buruh perkebunan adalah adanya perbedaan upah antara buruh pendatang dengan buruh setempat. Para buruh setempat cenderung memberi tawaran upah yang lebih tinggi dibanding buruh pendatang. Sebaliknya buruh pendatang dari Lampung serta dari Jawa khususnya dari Jawa tengah, mereka datang secara berkelompok 10 - 15 orang, dengan menyewa satu rumah untuk tinggal bersama sama. Setiap tiga bulan atau enam bulan sekali pulang ke daerah asal, atau setahun sekali menjelang lebaran. Tingginya permintaan upah buruh perkebunan setempat, disebabkan karena para buruh setempat masih dapat mengandalkan pada sedikit kebun lada yang mereka punyai untuk kehidupan mereka. Mereka melakukan pekerjaan sebagai buruh apabila terpaksa tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan uang tunai. Pulau Bangka bagi para buruh dari Jawa tidak menjadi tujuan utama untuk bekerja secara tetap, kalau ada kesempatan mereka akan melakukan pindah ke tempat lain. Harapan mereka adalah dapat bekerja di perkebunan Malaysia, karena dengan bekerja di perkebunan tersebut akan mendapatkan upah yang lebih tinggi.

Dalam persaingan pasar tenaga kerja baik di perkebunan dan sektor bangunan, terbukti bahwa tenaga kerja setempat masih rendah posisi tawarnya terutama dalam pengalaman maupun tingkat pengetahuan, sehingga sangat berpengaruh terhadap daya saing di pasar kerja. Konsep kerja bagi tenaga kerja setempat terutama adalah bekerja jadi PNS dan di Penambangan Timah. Bila bekerja diluar tersebut, dianggap sebagai penganggur, terutama yang bekerja di pertanian. Sehingga dalam penyerapan tenaga kerja bagi penduduk setempat perlu merubah "konsep kerja" yang memandang rendah pada jenis pekerjaan di pertanian, padahal apabila usaha tersebut ditekuni akan dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.

Secara umum dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten setelah kebijakan otonomi daerah diterapkan adalah belum tersedianya struktur yang

mengurusi masalah ketenagakerjaan di daerahnya. Dalam contoh kasus di Kabupaten Bangka, Kantor Dinas Tenaga Kerja baru saja terbentuk, sehingga wewenang dinas tenaga kerja di kabupaten tersebut belum ada, termasuk anggaran serta kebijakan masih ditangani di tingkat propinsi. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan masih belum bisa ditangani dengan baik. Seperti masalah perlindungan tenaga kerja tambang timah yang dilakukan masyarakat, masih ditangani oleh Sekretaris Bupati, padahal ini merupakan wewenang dinas terkait.

Daya saing SDM di Kabupaten Bangka khususnya dan Propinsi Bangka Belitung secara umum masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah mengetrapkan kebijakan yang sifatnya masih jangka pendek, sehingga dalam jangka panjang akan tetap terjadi persaingan yang tajam tidak hanya dengan tenaga kerja dari daerah lain akan tetapi dengan tenaga kerja dari luar negeri. Terutama yang masih dirasakan saat ini adalah lambatnya mobilitas kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Kondisi ini dapat dilihat dari besarnya tenaga kerja di sektor pertanian, di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung masing-masing masih di atas 50 persen.

Demikian pula tingginya tingkat pengangguran hampir di semua kabupaten, menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia (*supply*) melebihi daya serap tenaga kerja, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketenagakerjaan. Sementara dalam kasus tertentu, mengenai upah tenaga kerja setempat mempunyai posisi tawar tingkat upah yang lebih tinggi dari pada tenaga kerja pendatang (*migran*). Sehingga dalam kondisi seperti ini, pemberi kerja akan lebih senang menggunakan tenaga kerja pendatang, terutama pemberi kerja di sektor pertanian dan bangunan. Di lain pihak usaha ekonomi kerakyatan seperti tumbuhnya UKM masih sangat terbatas, padahal pada sektor tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan tumbuhnya sub sektor perkebunan, sektor pariwisata dan sektor industri yang mempunyai kaitan dengan sektor tradisional, diharapkan 5-10 tahun yang akan datang, dapat muncul beberapa usaha kecil yang dapat menghidupi sebagian besar masyarakat menengah ke bawah.

## Arah dan Orientasi Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan pada masa Orba dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan pertumbuhan Industri kapitalistik, sehingga masih sangat kurang menyerap tenaga kerja. Akibatnya telah terjadi ketimpangan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral, yaitu sektor pertanian masih tetap mendominasi penyerapan tenaga kerja, pengangguran makin tinggi khususnya pada kelompok yang lebih berpendidikan, ketimpangan yang lain adalah pada wilayah dan jender (Laila, 2002). Demikian pula yang terjadi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah terjadi krisis ekonomi diikuti dengan tingkat pengangguran semakin tinggi akibat pemutusan hubungan kerja di PT Timah. Di lain pihak terjadi ketidakseimbangan antara penambahan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja baru. Kebijakan PHK tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut otonomi daerah, akibatnya telah terjadi tingkat pengangguran terbuka di propinsi tersebut sebesar 4,3 pada tahun 2001 (Indikator Kesra, Babel, 2001).

GBHD memuat arah kebijakan penyelenggaraan daerah agar menjadi pedoman lembaga daerah dalam pengembangan pembangunan (Propeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2001-2006, LPEM, FE-UI). Kebijaksanaan ketenagakerjaan mempunyai kaitan erat dengan kebijakan ekonomi suatu daerah, dalam menyeimbangkan antara potensi SDM dan SDA. Dengan demikian perencanaan tenaga kerja merupakan suatu sistem dalam pendayagunaan tenaga kerja biasanya merupakan bagian integral dari perencanaan sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Implementasi pengembangan tenaga kerja yang tertuang dalam PP 25 / 2000, tidak lepas dari konteks pembangunan regional (daerah) yang akan mengarah pada keseimbangan pengembangan wilayah dengan wilayah yang lain. Dampak sosial ekonomi akan terjadi akibat tingginya persaingan produktivitas, pergeseran motivasi dan keinginan berusaha secara lintas sektoral. Sumber daya manusia dan kesempatan kerja merupakan komponen penting dalam proses pembangunan wilayah (Kedi Suradisastra, 2000). Paradigma baru otonomi daerah kualitas sumber daya tenaga kerja tidak bisa dipaksakan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi kegiatan pembangunan, namun sebaliknya kebijaksanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan kualitas sumber daya manusia

yang tersedia. Konsekuensinya adalah terbuka kemungkinan perbedaan pembangunan fisik suatu wilayah karena perbedaan kualitas tenaga kerja pada setiap daerah.

Propinsi Bangka Belitung yang semula terdiri dari 3 kabupaten/kota, kemudian pada tahun 2003 telah dikembangkan menjadi lima kabupaten, akan tetapi secara definitif pemerintahan kabupaten baru saja terbentuk. Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekuatan untuk dapat membangun daerahnya dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Hasil studi LPEM - UI menyebutkan bahwa peluang pengembangan yang timbul dapat dikategorikan sebagai berikut (LPEM, 2001); (1). Besarnya minat para investor untuk menanam modal; (2). Letak geografis yang strategis dengan potensi kekayaan alam memungkinkan untuk menjadi pusat perdagangan, industri dan pariwisata; (3). Permintaan pasar domestik dan internasional, terhadap produk-produk pertanian dan kelautan; (4). Kondisi masyarakat dengan latar belakang pertanian perkebunan dan nelayan yang bersifat terbuka.

Sejak jaman Belanda, timah dan lada merupakan sumber komoditas penting di Pulau Bangka dan Belitung secara luas, sehingga keberadaan Propinsi Bangka Belitung tidak lepas dari kedua komoditas tersebut, hingga dikenal di kalangan bisnis internasional. Dampak positif dari perkembangan bisnis tersebut hingga Masyarakat di kawasan Babel sudah biasa bersentuhan dengan industri, dan sangat terbuka dengan penduduk pendatang, baik dari dalam maupun luar negeri. Lada putih mempunyai kualitas tertinggi di dunia, sehingga pada saat krismon dengan pengaruh nilai dolar yang tinggi, harga lada dapat mencapai Rp. 120.000,- per kg, akan tetapi tingginya harga tersebut hanya berlangsung sementara, setelah keadaan mulai pulih dan akibat persaingan pasar lada di dunia, harga lada hanya sebesar Rp. 16.000,- per kg. Kondisi tersebut berakibat petani lada mengalihkan usaha ke tambang timah, atau mengalihkan pekerjaan sebagai buruh harian pada usaha tambang tersebut, dengan rata-rata upah per hari sebesar Rp. 15.000,-.

Setelah krisis 1997, sebagian besar hasil perkebunan lada mengalami penurunan produksi, sebagai akibat harga di pasaran merosot. Sebagai akibatnya lada putih mulai ditinggalkan oleh sebagian petani, dan mulai mengalihkan usaha tanaman karet dan

kelapa sawit (Kompas, 1-8-2003). Pada dasarnya lada merupakan tanaman yang membutuhkan intensitas tenaga yang tinggi, terutama saat lepas panen. Pemeliharaan lada membutuhkan ketekunan, seperti pembuatan tiang pancang dan harus menggunakan sejenis kayu tertentu yang sudah mulai sulit didapat (langka). Anjuran Dinas Pertanian agar menggunakan pohon dadap tidak mudah diikuti oleh para petani, dengan alasan membutuhkan perawatan, pemangkasan daun dadap apabila tumbuh. Pohon dadap juga biasa digunakan sebagai tiang pancang oleh petani lada di Jawa dan daerah lain. Akan tetapi anjuran untuk melakukan tehnik tersebut tidak dengan mudah diikuti oleh masyarakat petani.

Pengelolaan tambang timah di Pulau Bangka, sudah dilakukan selama ratusan tahun, sehingga secara teknis sumber tambang di kawasan daratan sudah tinggal residu, sudah tidak laik untuk ditambang lagi. Sedangkan yang masih bisa dilakukan untuk penambangan adalah di wilayah pantai. Namun akibat krisis 1997, tumbuh tambang inkonvensional atau tambang liar yang dilakukan oleh penduduk setempat, karena masalah ekonomi serta demi penyerapan tenaga kerja, sehingga penambangan tersebut terus dilakukan. Akibatnya eksploitasi yang dilakukan tidak dapat dikontrol lagi, sehingga terjadi pencemaran air tanah serta kerusakan permukaan lahan pertanian.

Semenjak tahun 2000 para petani mengalihkan usahanya ke budidaya kelapa sawit, kegiatan tersebut bahkan didukung oleh pemerintah setempat, dengan melakukan usaha konfersi ke pertanian kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi tanaman alternatif selain karet karena sekali tanam, menunggu 3-5 tahun sudah dapat menghasilkan. Padahal dalam kenyataanya kelapa sawit mengandung resiko yang tinggi, yaitu degradasi tanah akibat tidak bisa menyerap air, akibatnya mudah sekali terjadi erosi serta tingkat kesuburan tanah makin rendah. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan pemupukan kimiawi yang saat ini sudah mulai dipertanyakan tentang dampak terhadap kesehatan masyarakat. Di samping itu, masalah utama yang dihadapi adalah kerusakan lalu lintas jalan darat akibat penggunaan alat angkut hasil biji kelapa sawit. Yang biasa digunakan adalah jenis kendaraan berat (truk), dengan sendirinya jalan daerah tidak bisa menyangga tekanan berat ahkirnya menimbulkan kerusakan. Dilema semacam ini merupakan beban yang ditanggung Pemda dalam menentukan arah orientasi

pembangunan, sehingga Pemda diharuskan melakukan tindakan pilihan dalam menentukan alternatif kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil proyeksi LPEM - FE UI, diperkirakan bahwa kinerja sub sektor pertanian di Propinsi Bangka Belitung akan terus meningkat dan tetap menjadi salah satu sektor unggulan pada pasca krisis. Hingga tahun 2006 sektor pertanian akan tumbuh dengan rata-rata di atas 7 persen per tahun. Berdasarkan analisis persepsi yang diperoleh dari survey menyebutkan bahwa berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan sektor pertanian, antara lain disebabkan adanya beberapa hal seperti prospek ekonomi terbuka akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daya tarik investor dari daerah lain dari luar propinsi semakin besar. Kondisi perekonomian Propinsi Riau dan SIJORI, serta perkembangan perekonomian di Propinsi Sumatra Selatan, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di Propinsi Bangka Belitung.

Demikian pula potensi sub sektor perkebunan tersebar hampir merata di seluruh wilayah. Dari sektor tersebut peluang terhadap penyerapan tenaga kerja cukup besar. Demikian pula pesatnya perkembangan Kawasan Laut Cina dan Lingkar Pasifik Selatan memberi peluang terhadap perkembangan sektor pariwisata, di sektor tersebut Propinsi Bangka Belitung mempunyai potensi besar berupa wisata pantai, wisata alam dan wisata pertanian. Pengembangan pariwisata akan menyerap banyak tenaga kerja yang berarti mengurangi tingkat pengangguran yang dalam beberapa tahun terakhir ada kecenderungan tingkat pengangguran meningkat, sabagai akibat restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Timah.

Perencanaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Propinsi Babel untuk mengatasi jumlah pengangguran akan menyalurkan dana sebesar Rp 3 milyar, dana tersebut merupakan bagian dari anggaran perencanaan perbelanjaan negara (APBN) tahun 2003 (Bangka Pos, 3 Juli 2003). Diharapkan program tersebut dapat mengatasi permasalahan utama di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tingkat pengangguran yang tinggi yaitu sebesar 609.032 orang atau sebesar 3,28 persen dari jumlah angkatan kerja ( BPS, Sensus Penduduk 2000). Apabila dibedakan menurut tingkat kabupaten, maka kota Pangkal Pinang sebagai ibukota propinsi menduduki

tingkat pengangguran yang paling tinggi yaitu sebesar 6 persen. Sedangkan Kabupaten Bangka hanya sebesar 2,53 persen.

Dengan tingginya angka pengangguran di tingkat perkotaan tersebut, maka pemerintah daerah telah melakukan program antara lain sebagai berikut;

1. Perekrutan Tenaga kerja Sukarela (TKS).  
Dengan melakukan pendidikan dan ketrampilan pada 80 orang tingkat sarjana. Setelah itu akan diterjunkan ke perusahaan-perusahaan di kota maupun daerah tingkat kabupaten di Bangka Belitung.
2. Perekrutan Tenaga Kerja Pemuda Profesional Terdidik (TKPPT)  
Memberi pendidikan pada tenaga kerja tingkat sarjana untuk mendapatkan binaan dari perusahaan (magang) agar dapat bekerja pada perusahaan bersangkutan, berdasarkan seleksi yang ketat.
3. Tenaga kerja Mandiri terdidik (TKMT)  
Memberi pendidikan dan latihan pada calon tenaga kerja tingkat SLTA sebanyak 60 orang dan calon tenaga kerja tingkat sarjana sebanyak 20 orang untuk mendapatkan binaan dan latihan calon wirausaha agar dapat melakukan usaha mandiri serta dapat merekrut tenaga lainnya.

Mengacu pada ketiga program tersebut, nampaknya pemerintah daerah telah melakukan tindakan kebijakan yang sifatnya jangka pendek, tetapi belum melakukan kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Tindakan jangka pendek sangat berkaitan dengan kebijakan yang sifatnya penanganan segera akibat krisis ekonomi yang baru saja terjadi, terutama sebagai propinsi baru sehingga sumber dananya juga masih dari pemerintah pusat, akan tetapi pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada pemerintah daerah.

Dalam mempersiapkan tenaga kerja agar dapat diterima di pasar kerja, maka diperlukan tingkat pendidikan sumber daya manusia yang memadai, dengan asumsi semakin tinggi tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat di daerah tersebut akan semakin tinggi dalam memberikan sumbangan dalam pembangunan daerah. Data memperlihatkan bahwa perbandingan antara tingkat usia penduduk sekolah dengan penduduk yang sekolah pada usia sekolah sebagai berikut, penduduk yang dapat mengenyam pendidikan SD ke bawah sebesar 90 persen, sedangkan pada

penduduk usia SLTP sebesar 54 persen, dan pada penduduk usia SLTA sebesar 52 persen (LPEM, FE - UI, 2001). Dari data tersebut yang menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah ke jenjang lebih tinggi, paling besar di Kota Pangkal Pinang, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Bangka.

Dengan belum terpenuhinya sarana perguruan tinggi, maka sebagian besar penduduk usia produktif di atas 20 tahun melakukan migrasi ke luar, selain melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, ada yang mencari pekerjaan ke luar daerah. Walaupun demikian, peranan swasta dalam pengadaan sarana pendidikan tingkat menengah cukup tinggi, sebagai contoh pengelolaan SLTP di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, lebih dari 50 persen ditangani pihak swasta, seperti SLTA, STM, SMEA lebih dari 70 persen pengelolannya ada di swasta. Pada tahun 1999, di Ibukota Propinsi Pangkal Pinang telah berdiri beberapa perguruan tinggi yaitu Akademi Akuntansi Bhakti, STIE PERTIBA, STIH PERTIBA, AKPER, STAI dan Universitas terbuka. Selain melalui pendidikan formal, juga dilakukan peningkatan SDM melalui pembinaan khusus di bidang pendidikan, sosial, budaya, kepemudaan dan olah raga.

## Strategi dan Implementasi

Rencana Strategi (Renstra) mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Renstra merupakan salah satu tolok ukur penting dari sistem akuntabilitas kinerja Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran juga merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung, 2002). Dalam Renstra, pemerintah daerah telah mempersiapkan kinerja SDM dalam menghadapi hubungan ekonomi yang bersifat nasional maupun global. Misalnya secara internasional adanya keterkaitan negara dengan perjanjian yang bersifat internasional seperti AFTA, APEC, WTO.

Dalam visinya Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berbunyi:

*“Terwujudnya negeri serumpun sebalai yang sejahtera melalui pemerintah yang amanah dengan meningkatkan*



*kualitas masyarakat serta memberdayakan semua potensi daerah secara arif dan berwawasan lingkungan dalam negara kesatuan republik Indonesia”.*

Pemerintah daerah dalam visinya menekankan pada upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan jalan meningkatkan kualitas SDM, sehingga diharapkan dapat mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengabaikan kondisi lingkungan tersedia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka strategi pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dirinci sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik IPTEK maupun IMTAQ disemua lapisan masyarakat.
2. Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diikuti dengan terselenggaranya pemerinah yang bersih dan terbuka.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan semangat wirausaha.
6. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat.
7. Mewujudkan otonomi daerah yang luasa, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan amanah masyarakat.

Untuk pencapaian strategi tersebut, Pemerintah daerah banyak menghadapi tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Sebagai propinsi baru, upaya yang dilakukan dalam perluasan kesempatan kerja sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Dalam pengembangan perekonomian, kondisi sarana jaringan transportasi yang ada sangat penting termasuk akses terhadap pasar regional serta global. Kondisi ekonomi serta sumber daya alam yang dimiliki Propinsi Babel mempunyai keunggulan komparatif pada potensi pertanian, pertambangan, sumber daya laut, akan tetapi tantangan utama yang harus dihadapi adalah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Dalam sejarah perkembangan ketenagakerjaan di Babel tidak lepas dari masuknya pendatang dari Negeri Cina, yang di

kontrak oleh kolonial Belanda untuk mengerjakan tambang timah dan perkebunan lada. Kemudian masuknya buruh tani dari Pulau Jawa, serta dari daerah sekitarnya, seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Sehingga apabila dikategorikan adalah sebagai berikut; (1) Pada awal mulanya kaum pendatang terdiri dari para buruh tambang dan buruh tani dari negeri cina; (2). Petani serta buruh bangunan yang didatangkan dari pulau jawa; (3). Tenaga kerja migran yang datang dengan kemauan sendiri, yaitu para pedagang kecil serta buruh bangunan dan buruh tani.

Setelah menghadapi krisis, Pemda memberi peluang usaha bagi penambang inkonvensional (TI) dengan harapan memberi kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan rumah tangga. Akan tetapi dalam implementasi kebijakan pembangunan tersebut, sering menghadapi dilema antara usaha mempertahankan kelestarian alam (SDA) dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Kebijakan jangka pendek yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana mengatasi tenaga kerja yang sifatnya padat karya (*labour intensive*), di mana dalam pasar kerja masih didominasi oleh kelompok pendidikan rendah, sehingga dengan dibukanya tambang inkonvensional tersebut, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Demikian pula dengan rendahnya harga lada putih di tingkat petani, agar petani tidak meninggalkan mata pencaharian usaha lada, maka pemerintah daerah berupaya mendirikan sebuah lembaga untuk mengatasi masalah tersebut. Lembaga tersebut berupa Kantor Pemasaran Bersama (KPB) yang mempunyai peran sebagai badan penyangga, agar tidak terjadi kemerosotan harga di tingkat petani. Upaya yang dilakukan adalah berupa penetapan harga patokan lada di daerah. KPB tersebut diprakarsai oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan para investor yang melakukan usaha lada putih. Dengan melakukan harga patokan tersebut, agar dapat memutus mata rantai penjualan sehingga harga tidak jatuh terlalu rendah, selain itu dapat meningkatkan kualitas, serta mengendalikan produksi lada. Penetapan harga dasar tersebut berdasarkan surat keputusan gubernur, serta harus mendapat persetujuan DPRD.

KPB antara lain dibentuk bersama oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Bangka Belitung Agricom yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah propinsi, pemerintah

kabupaten dan kota. Pihak koperasi dan badan usaha swasta yang lain juga terus di upayakan bergabung dalam KPB (Kompas, 1-8-2003). Akan tetapi sebelum KPB ditetapkan sudah ada beberapa pengamat ekonomi dan kelompok LSM yang menyampaikan koreksi terhadap kebijakan tersebut. Menurut kelompok tersebut, bahwa dampak adanya KPB justru akan berakibat terjadinya monopoli ekspor oleh kelompok tertentu terutama para investor yang ditunjuk pemerintah daerah terhadap komoditas tersebut serta akan menjurus terjadinya KKN (Bangka Pos, 10-5- 2003).

Lada merupakan salah satu komoditas utama di dunia yang unik karena bersifat multifungsi digunakan untuk kepentingan penyedap makanan, sebagai obat dalam (dapat diminum) maupun obat luar. Bahkan dapat digunakan sebagai parfum dan bahan pengawet (Business News, 5-9-2003). Oleh sebab itu, International Pepper Community (IPC) merupakan lembaga internasional yang didirikan tahun 1992 di bawah UNESCAP, telah mengadakan pertemuan pada 1 September 2003 di Kochi India. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas 3 hal yaitu: (1). Upaya meningkatkan permintaan masyarakat terhadap lada dan produk lada: (2). Upaya meningkatkan ekspor produk primer dan bentuk proses dan promosi: (3). Pengembangan strategi terhadap produk baru dan aplikasi dari lada. Organisasi tersebut terdiri dari enam negara produsen lada yaitu Brasil, Indonesia, Malaysia, India, Sri Lanka dan Vietnam.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota IPC, akan tetapi masih dalam posisi tertinggal di banding dengan negara anggota lainnya, terutama dalam hal mutu produksi. Oleh karena itu, proses produksi akhir, harus dilakukan di Singapura. Singapura sebagai negara yang tidak menghasilkan lada, akan tetapi memperoleh banyak keuntungan baik melalui tataniaga maupun penyerapan tenaga skill melalui proses produksi lada. Demikian pula lembaga penelitian lada di Indonesia, masih jauh tertinggal terutama dengan negara produsen lainnya seperti India dan Malaysia. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian di Indonesia, tetapi hasil penelitian tersebut belum mempunyai daya tarik produsen atau investor untuk memproduksinya. Pemerintah daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari akan kelemahan ini, terutama dalam hal penelitian baik dalam pengembangan komoditas tersebut. Kendala utama dalam kelembagaan penelitian tersebut, adalah kurangnya SDM yang mau dan mampu dalam pengembangan usaha. Di samping itu dibutuhkan

biaya yang sangat besar untuk pengembangan lembaga penelitian yang dapat diterima di tingkat dunia.

Sebagian besar petani dan buruh tani di Bangka mengharapkan adanya kestabilan harga jual lada putih, agar dapat menutup ongkos produksi. Harapan ini terutama dari para petani dan buruh tani yang hanya mengandalkan kepada perekonomian keluarga pada kebun yang sempit, sering melepas lada berapapun harganya. Dengan fluktuasi harga yang tidak menentu, petani mengibaratkan menanam lada sebagai pertaruhan atau ibarat main judi (Kompas, 1-8-2003). Sebagai akibatnya, semakin banyak petani meninggalkan usaha lada beralih sebagai buruh tambang Timah Inkonvensional (TI), atau membuka lahan untuk tanaman kelapa sawit. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menghadapi tantangan yang cukup berat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban. Keadaan ini merupakan suatu proses yang harus dilalui dan hanya dapat diatasi oleh pemerintah daerah sendiri, terutama dalam meningkatkan hubungan dengan pusat dan wilayah sekitarnya.

## **Pihak Yang Terkait Dalam Ketenagakerjaan Daerah**

Menurut, Syarif Hidayat (2002), ketentuan pasal 7 (1) UU No.22 tahun 1999, tentang pengaturan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, disebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Sedangkan kewenangan (bukan kekuasaan) bidang pemerintahan, agar dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan Pemda menyadari akan pentingnya koordinasi pelaksanaan pembangunan antara instansi (dinas) terkait terutama dengan para investor.

Potensi unggulan di Propinsi Bangka Belitung meliputi Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Tambang/galian. Empat sektor unggulan tersebut mempunyai harapan yang besar sebagai sumber PAD, serta perlu didukung SDA maupun SDM. Akan tetapi dalam menangani upaya pengembangan komoditas utama tersebut,

pemerintah daerah tidak bisa mengatasinya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Berkaitan dengan tataniaga lada, Pemda setempat masih mengharapkan dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini menteri perindustrian dan perdagangan, terutama dalam menangani masalah perdagangan internasional, seperti penentuan ekspor dan harga di pasar. Atas dasar ini, terlihat bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan suatu naungan pusat yang dapat melandasi kebijakan yang dilakukan, dengan kata lain semakin kuat tantangan dari masyarakat semakin besar keinginan daerah untuk minta perlindungan pusat. Demikian pula dengan kewenangan Pemda dalam pembentukan lembaga, seperti Kantor Pemasaran Bersama (KPB) Lada putih. Kewenangan pemda tersebut masih disalahartikan sebagai pembentukan KKN baru dalam menangani komoditas utama tersebut, tentu saja ini akan membawa dampak negatif atas pandangan masyarakat terhadap Pemda setempat. Disamping itu, masih kurangnya tenaga profesional, di bidang pertanian, keuangan (akuntan), hukum, tenaga medis menyebabkan pemda masih membutuhkan uluran pusat.

Dalam kaitannya dengan iklim usaha, para investor menaruh minat besar terhadap potensi yang ada. Pemerintah daerah mulai mendekati para investor keturunan Tionghoa, yang dulu pernah bermukim di Kepulauan Bangka Belitung, agar membangun kembali daerahnya setelah terbentuk propinsi tersebut. Kebijakan ini akan mendukung pengelolaan SDA serta pemanfaatan SDM yang tersedia. Lembaga pemerintah dan swasta mempunyai peluang besar dalam pengembangan sektor ekonomi. Sebagai contoh pengembangan pariwisata di pantai utara yang dilengkapi dengan tempat peristirahatan dan tempat rekreasi pantai serta ditunjang dengan sarana transportasi yang baik, sehingga memberi peluang kerja dan berusaha pada sektor perdagangan.

Pemerintah daerah juga memberi peluang pada swasta dengan memberi kesempatan melakukan pengembangan pariwisata dan budaya, seperti telah mulai dibangun Pusat Budaya Shaolin, oleh para keturunan masyarakat Tionghoa yang pernah bermukim di Bangka. Sebagian besar para penyumbang Pusat Budaya Shaolin adalah mereka yang saat ini tinggal di luar Bangka, di mana nenek moyang mereka pernah tinggal di pulau Bangka pada awal abad ke 20, karena menjadi buruh tani atau buruh tambang timah saat jaman Belanda. Pemda setempat, juga menyediakan kemudahan prasarana jalan lingkar sepanjang pantai sekitar Pusat Budaya

Shaolin tersebut, termasuk telah dibangun tempat agrowisata, yang meliputi tanaman buah-buahan, seperti mangga dan durian.

Perkembangan sektor pariwisata di pulau Bangka mempunyai dampak langsung pada peluang kesempatan kerja kepada masyarakat. Di sektor tersebut terdapat kaitan dengan tumbuhnya kegiatan di sektor lain seperti kerajinan, perhotelan, restoran, transportasi dan jasa lainnya. Dampak langsung adalah tumbuhnya pusat pertokoan di ibukota Propinsi Kota Pangkalpinang, seperti Ramayana, Hero dan Minimarket, sehingga dapat memberi peluang kerja sebesar 2000 tenaga pelayan toko.

Sebagai propinsi yang baru berdiri, masalah yang berkaitan dengan keamanan lingkungan dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting agar usaha meningkatkan perkembangan ekonomi tidak terganggu. Kondisi ini tidak lepas dari pengaruh kebijakan pusat sebelumnya mengenai tata ekonomi yang dikembangkan di daerah tersebut. Sebagai contoh pengaruh restrukturisasi usaha tambang timah, berhentinya para pekerja akibat di PHK, serta masalah pengamanan pantai yang sangat dekat dengan lautan lepas kawasan perdagangan internasional. Kasus pencurian ikan dengan menggunakan pukat harimau masih sering terjadi, Pemda Bangka belum mampu melakukan pengamanan di sekitar perairan Bangka. Tumbuhnya tambang inkonvensional pada pihak masyarakat akan memberi pekerjaan dan pendapatan, di pihak lain merupakan kendala bagi usaha pelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut, seperti terjadinya pengrusakan lahan serta pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah air. Pemda Bangka mengeluarkan Perda tentang usaha pertambangan rakyat tersebut, akan tetapi masih belum efektif dan pelanggaran masih saja terjadi.

## **Penutup**

Sebagai salah satu propinsi kepulauan yang terletak di Kawasan Barat Indonesia, maka arah dan strategi ketenagakerjaan masih belum terfokus pada apa yang akan ditekankan pada peningkatan kualitas SDM setempat. Kebijakan selama ini masih mendasarkan pada petunjuk pusat, sehingga kebutuhan akan tenagakerja yang bisa mengisi kesempatan kerja belum tersedia. Potensi SDA sangat memungkinkan untuk dikembangkan, seperti

potensi kelautan, pantai, dan kawasan pedalaman. Pemerintah daerah menyadari akan hal ini, dan mulai mengarahkan usaha bidang lain dan tidak lagi mengandalkan pada usaha konvensional seperti timah dan lada putih. Pada pihak lain untuk menumbuhkembangkan sektor yang belum tergalai tersebut diperlukan SDM yang berkualitas. Ketersediaan SDM yang berkualitas sangat tergantung pada sarana pendidikan, akan tetapi sarana pendidikan belum terfokus pada kebutuhan pengelolaan SDA yang tersedia.

Para investor menyadari akan potensi SDA dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Kesadaran kuat bahwa SDA sangat terbatas, terutama setelah tambang timah telah habis dieksploitasi dan mulai menyusut, maka perlu dilakukan usaha lain yang banyak melibatkan kepentingan masyarakat, seperti pariwisata, perikanan dan perkebunan. Akan tetapi untuk mengelola sektor tersebut, dibutuhkan infrastruktur serta teknologi yang memadai. Selain modal usaha perlu diimbangi dengan kemampuan SDM agar dapat digunakan untuk pengelolaan sektor tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Propinsi Babel belum dapat menyediakan kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga terpaksa didatangkan dari daerah lain, seperti dari Jawa.

Kelembagaan baik pemerintahan maupun swasta, belum mencapai titik temu dalam pengelolaan SDA, sebagai contoh Pemda setempat tidak mengizinkan lagi penambangan timah yang dilakukan secara liar (tidak terkontrol). Akan tetapi dengan alasan untuk menghidupi penduduk yang mempunyai ketergantungan pada timah, maka secara legal penambangan rakyat masih tetap dilakukan dengan melibatkan pihak swasta, yang mau menampung usaha ilegal tersebut.

Pengangguran merupakan masalah utama di Propinsi Bangka Belitung, terutama setelah PT Timah melakukan rasionalisasi usahanya dengan melakukan PHK sebesar 10.000 orang tenaga kerja. Sementara sektor lain belum sepenuhnya dapat menampung pencari kerja. Pemerintah daerah melakukan terobosan pengiriman TKI dari Bangka Belitung dan melakukan pendidikan pelatihan jenis ketrampilan yang tidak dapat menciptakan usaha mandiri. Disamping karena keterbatasan dana dan keterbatasan kemampuan para calon tenaga kerja. Pengembangan UKM belum mendapat dukungan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat,

barangkali sesuai dengan konsep kerja bagi penduduk setempat bahwa dikatakan bekerja bila menjadi pegawai negeri dan bekerja di tambang timah. Pengembangan Usaha kecil masih sangat terbatas, padahal sektor ini merupakan sektor penting dalam menghadapi krisis.

Pemerintah daerah telah melakukan terobosan dalam menghadapi pengangguran di daerahnya, akan tetapi belum dapat mengatasi permasalahan yang sebenarnya. Sehingga perlu dikembangkan usaha kemitraan, dengan memberi peluang pada investor untuk mengembangkan usahanya, dengan memfasilitasi dengan informasi pasar tenaga kerja, kepada calon pekerja agar dapat mengisi kekosongan pekerjaan yang tersedia. Langkah awal yang perlu dikembangkan adalah memberi kewenangan pada pihak investor untuk melakukan usaha sesuai dengan potensi SDA setempat, setelah itu memberi keringanan pajak (*tax holiday*) pada pengusaha selama beberapa tahun agar dapat memperluas peluang selama menjalankan usahanya. Dengan harapan usahanya dapat berkembang dan dapat lebih menyerap tenaga kerja yang tersedia. Peluang kerja di sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata masih cukup luas. Diharapkan dapat memberi manfaat pada tenaga kerja, sehingga sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar, sebab sumber alam wilayah sangat menunjang pengembangan tersebut.

## Daftar Pustaka

Harahap, Sofyan S (2002)

Akuntansi, Otonomi Daerah dan Globalisasi, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. X, No. 2, 2002, Jakarta; PPE-LIPI

Hidayat, Syarif (2002)

Desentralisasi, Negara Kesatuan, Dan Semangat Bhineka Tunggal Ika, *Masyarakat Indonesia*, XXVIII, No. 2, 2002, Jakarta; LIPI

Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (2002)

Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2002-2006, Pangkal Pinang : Pemprop. Kep. Bangka Belitung



----- (2002)

Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2002-2006, Pangkal Pinang : Pemprop Kep. Bangka Belitung.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, FE - UI (2000)  
Penyusunan Propeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2001-2006, LPEM, FE-UI: Jakarta

Nagib, L dan Romdiati, H (2000)  
Situasi Ketenagakerjaan Dan Kesiapan Tenaga Kerja Menghadapi Era Globalisasi. Seminar Sehari Menapak Abad XXI, Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan kemanusiaan - LIPI, Jakarta, 10 Pebruari 2000.

Nagib, L dkk. (2003)  
Kualitas SDM Pariwisata Era OTDA dan Globalisasi, Jakarta: Pustaka Sinar harapan.

Simanjuntak, Payaman J., (2001)  
Investasi Bidang Ketenagakerjaan Untuk Membangkitkan Perekonomian Nasional, Berita IPTEK, Th. Ke 42. No. 1, 2001. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

Suradisastra, Kedi (2000)  
Implikasi Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 (PP25/2000) Terhadap Managemen Pembangunan Pertanian. Seminar Nasional Perspektif Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2001 Ke Depan, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Bogor 9 - 10 November 2000.

Tjiptoherianto, Priyono, (2003)  
Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia, *Business News*, 13 Sept 2003

**Surat kabar**

**Bangka Pos,**

Kantor Pemasaran Bersama Lada Putih, Menguntungkan  
Petani, Sabtu 10-5-2003, Pangkalpinang.

**Kompas,**

Menata Niaga, Menyelamatkan Lada Putih, Jumat 1-8-2003

# BAGIAN IV

## PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

*Oleh: Soewartoyo dan Sri Rahayu*

### Pendahuluan

Pengertian kebijakan diterjemahkan dari bahasa “policy” yang kemudian diartikan sebagai *political wisdom* atau *governing principle* dan *wise management* (Soeroto, 1983 mengutip dari Webster’s New World Dictionary of the American language, 1958). Dalam arti ini maka kebijakan dalam ketenagakerjaan bisa berarti suatu ketentuan-ketentuan yang luas untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Upaya apa saja yang dilakukan dengan metode seperti apa yang digunakan adalah mencakup kegiatan manajemen dalam pembangunan ketenagakerjaan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perlu diawali dengan pemahaman, arah dan tujuan yang ingin dicapai dari sesuatu kegiatan tersebut. Setelah ditentukan arah kemana pembangunan akan diarahkan tentu saja strategi dan cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung maupun yang menghambat dan juga pelaku pembangunan itu sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yakni pada UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Di Daerah. Kebijakan otonomi adalah sebagai produk politik yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri, hal ini daerah diartikan Kabupaten atau kota berusaha memberdayakan pemerintah lokal sekaligus juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah (Ratnawati, T, 2003).

Namun dalam rangka pengurusan tugas yang mencakup bidang sosial dan budaya masyarakat ternyata demikian luas, beberapa pengamat juga menyatakan bahwa pemberian otonomi yang sangat luas bisa saja menyebabkan kepentingan lokal atau daerah menjadi terpuruk dan kurang diperhatikan. Hal ini disadari bahwa kemampuan pemerintah lokal untuk melakukan kegiatan administrasi pemerintahan di daerahnya tanpa bantuan pusat ternyata banyak yang meragukan. Bisa saja pada prakteknya melaksanakan otonomi di daerah kemudian dapat berpotensi untuk munculnya raja-raja kecil yang cenderung lebih bertidak dan bersifat eksploitatif (Sondakh, 1998). Semangat pemberian otonomi bukan kepada perluasan kekuasaan bagi daerah tetapi seyogyanya lebih bersifat pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah yang ada di daerah. Seperti halnya batasan teori atau konsep tentang desentralisasi yang dikutip oleh Hidayat, S (2002) bahwa pengertian *administrative decentralization* bukannya daerah diberi kekuasaan tetapi diberi kewenangan. Sedangkan tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tersebut, dititik beratkan kepada pelaksanaan pemerintahan yang efisien dan effective untuk menjalankan pembangunan daerah. Misi efektifitas dan efisiensi harus menjadi sasaran yang perlu diwujudkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Kabupaten Bangka mempunyai kewenangan dalam membuat suatu kebijakan daerah untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah Bangka harus bekerja sama dengan pihak legislatif (DPRD) terutama dalam merencanakan dan melakukan program pembangunan daerah. Landasan pembangunan daerah kabupaten Bangka khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan mengacu pada landasan pembangunan daerah pada umumnya. Seperti diketahui bahwa kebijakan daerah harus mengacu kepada arah dan tujuan yang tertuang pada pola dasar daerah yaitu Garis Besar Haluan Daerah. Demikian pula tujuan dan arah pembangunan tersebut harus tertuang dalam Program pembangunan daerah selama 5 tahun yang ditetapkan Bupati sebagai Kepala Daerah bersama Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Pihak penyelenggara pemerintahan di daerah seperti dinas-dinas membuat program kerja yang dikenal dengan "Rencana Strategis Daerah" (Renstrada). Renstra tersebut dibuat oleh masing-masing dinas sebagai petunjuk arah strategis pembangunan yang

ingin dan akan dilaksanakan. Seperti juga telah diketahui bahwa saat ini untuk mencapai standar keberhasilan pemerintah Bangka, maka telah ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten dalam 2002- 2004. Visi Kabupaten Bangka tersebut adalah: *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat menuju daerah agroindustri, industri maritime dan pariwisata”*.

Seperti juga diketahui bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1998 mengajurkan bahwa pemerintah dalam perencanaan pembangunannya perlu menitik beratkan kepada pendekatan yang bersifat *bottom up*, meskipun dirasakan bahwa pendekatan ini agak menemui kesulitan untuk dilaksanakan. Hal ini karena beberapa kendala diantaranya adalah untuk melakukan koordinasi antar instansi dan dinas serta organisasi yang berbeda pada prakteknya cukup sulit di daerah. Apalagi jika koordinasi tersebut untuk mewujudkan tujuan bersama yang masing-masing akan memiliki sudut pandang yang bertlainan.

Konsep kesertaan masyarakat dalam berbagai pembangunan dan kebijakan umumnya melalui tiga tahapan yaitu partisipasi dalam perencanaan kebijakan, partisipasi dalam pembentukan kebijakan dan kesertaan dalam mengawasi kebijakan dan juga bagaimana keikutsertaannya dalam implementasinya. Dalam kesempatan ini akan mencoba membahas menyangkut terhadap proses ketiga hal diatas. Dalam konteks pemerintahan Negara yang menganut paham keterwakilan rakyat sebagai pemegang kedaulatan maka dalam pembuatan suatu kebijakan maka lembaga perwakilan rakyat seperti lembaga parlemen atau dalam tingkatan daerah peranan DPRD menjadi penting dalam pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan. Selintas perlu diketahui bahwa lembaga DPRD tingkat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan fungsinya sebagai pembawa manta rakyat misalnya. Kegiatan yang pernah dilakukan misalnya melakukan dialog dengan LIPI untuk memecahkan persoalan pembangunan propinsi Bangka Belitung yang perlu dipercepat, Dialog ini dilakukan pada tanggal 26-28 Mei 2003 adalah menunjukkan betapa keinginan lembaga tersebut akan membawa kepentingan suara warganya.

## **Kebijakan Daerah Dalam Tata Organisasi Pemerintah Daerah**

Sebagai tindak lanjut dari UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan di Daerah dan mengacu pada UU No. 27 Tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten dikepalai oleh Bupati sebagai kepala pemerintahan Kabupaten, bersama DPRD lembaga wakil rakyat, membuat suatu peraturan daerah kabupaten Bangka Nomer 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. Disamping itu ditetapkan juga Peraturan Daerah Nomer 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bangka.

Menurut Perda diatas sekurangnya meliputi 13 dinas Daerah seperti:

- Dinas pertanian dan Peternakan
- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi PKM dan Penanaman Modal.
- Dinas Perhubungan, pariwisata Seni dan Budaya.
- Dinas Kependudukan, catatan Sipil, tenaga kerja dan Transmigrasi.
- Dinas kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan masyarakat Desa
- Dinas Pemetaan dan pertanahan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas pendapatan Daerah.

Dari berbagai dinas yang ditetapkan diatas, yang langsung menangani permasalahan pemerintahan daerah khususnya bidang tenaga kerja adalah Dinas Kependudukan, catatan Sipil, Tenaga kerja dan Transmigrasi. Pada pasal 28 disebutkan bahwa dinas tersebut dibentuk dalam rangka mengemban tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang yang terkait di dalamnya dengan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Tugas dan wewenang tersebut memberi arti bahwa dinas memiliki tanggungjawab tugas

yang mencakup tugas desentralisasi dan tugas pembantuan. Kemudian sesuai dengan tugas dan fungsinya dinas-dinas mempunyai wewenang perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas yang dibebankan.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Pola dasar Pembangunan daerah Kabupaten khususnya kabupaten Bangka adalah merupakan Garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten Bangka. Di dalamnya termasuk pembangunan lima tahun yang akan dilaksanakan. Ini dinyatakan dalam Pasal 2 Bab II Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2001, bahwa apa yang tertera dan tertulis adalah sebagai cerminan aspirasi pembangunan seluruh masyarakat daerah Kabupaten Bangka. Karena poldas tersebut tersusun atas dasar kehendak dan kesepakatan rakyat melalui Wakil-wakilnya di DPRD kabupaten Bangka. Dan selanjutnya program pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Daerah (renstrada) sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat Bangka secara keseluruhan. Dan sekaligus isinya adalah prioritas pembangunan Kabupaten Bangka selama lima tahun pembangunan.

Proses mekanisme pembuatan kebijakan di daerah masih terkesan menggunakan pendekatan lama artinya bahwa pembuat kebijakan dan prosesnya melalui masyarakat. Dalam proses penyaringan kepentingan biasanya dijangking dari pemerintahan tingkat terendah dan bicarakan melalui tahapan pemerintahan yang ada. Aspirasi masyarakat pada level desa diakomodasi melalui rembug desa yang kemudian merupakan aspirasi masyarakat desa. Aspirasi masyarakat tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dalam level pemerintahan yakni Kecamatan dan kemudian dibicarakan pada tingkat Camat dengan mengundang muspida tingkat Kecamatan. Setelah dirumuskan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi dari kecamatan yakni tingkat Kabupaten.

Dalam musyawarah Daerah kabupaten adalah perwakilan pemerintah tingkat Kecamatan dan dinas, yang menjadi aspirasi dari tingkat bawah tersebut dibicarakan dalam rapat disebut sebagai rakorbang.

Pada rapat Koordinasi pembangunan Daerah (Rakorbang) di tingkat kabupaten, masing-masing dinas terkait menyuarakan kepentingan masyarakat yang ditampung atas penggalan melalui

aparatus teknis terkait. Meskipun demikian pengaruh instansi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi masih besar. Bahkan ada kesan bahwa peranan pemerintah dalam jalur dekonsentrasi pemerintah pusat melalui dinas yang ada di propinsi masih mempunyai berbagai program di daerah.

Disamping itu pihak dewan (DPRD) juga diundang untuk memberikan wacana melalui rapat gabungan antara pemerintah dan dewan. Pendekatan "*bottom up*" dalam penjangkauan aspirasi masyarakat tampaknya bukan semudah seperti tertera dalam suatu konsep yang tertulis. Dalam praktek bagaimana aspirasi masyarakat tersebut dapat terwadahi adalah menjadi persoalan tersendiri. Apa lagi dalam aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka yang mana orang-orang Bangka masih berharap terhadap potensi alam untuk dapat memberikan jaminan hidupnya. Dengan kata lain bahwa pada masa Orde baru pendekatan pembangunan yang digunakan adalah paradigma pembangunan pendekatan "*Top Down policy*" tetapi saat ini ada keinginan untuk menggunakan "*Bottom up*" yang lebih diutamakan. Namun tampaknya dalam hal ini baru sampai kepada proses ke tingkat transisi tentunya.

Peran pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan pada dasarnya meliputi program kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada program ini dinas tenaga kerja diharapkan bisa membangun dan mengadakan Balai Latihan Kerja. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melakukan program perluasan kerja dan pengembangan kesempatan kerja. Diantara program yang perlu diperhatikan bahwa dinas tenaga kerja perlu memberikan informasi tentang pasar kerja. Melakukan analisis kebutuhan jumlah tenaga kerja dan kualifikasi yang harus dipersiapkan. Oleh karena itu data tentang ketenagakerjaan di masing-masing dinas Kabupaten sebaiknya diupayakan untuk tertib administrasi. Disamping itu pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak swasta dan pengusaha untuk membuat perkiraan dan jumlah lowongan tenaga kerja yang diperlukan. Dalam perlindungan tenaga kerja pemerintah perlu menyadari terhadap peran dan existensi serikat pekerja. Disamping itu bagaimana usaha perlindungan melalui usaha asuransi perlu dipikirkan.



## **Mekanisme dan Proses Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan**

Mekanisme pembuatan kebijakan di Kabupaten Bangka dapat digambarkan misalnya seperti pada pendekatan pembuatan Program Pembangunan Daerah. Perumusannya dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik itu kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun para pakar. Berbagai upaya mencari masukan dilakukan dengan tujuan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya, antara lain dengan melakukan survei kepada para responden untuk mendapatkan data primer. Adapun responden yang dilibatkan dalam penyusunan Propeda Kabupaten Bangka adalah dari berbagai unsur antara lain dari pemerintah dan swasta. Survei dilakukan pada saat Rakorbang, pertemuan di Bappeda, presentasi intern report dan presentasi draft final laporan akhir. Unsur pemerintah responden yang berhasil dijaring adalah dari dinas-dinas, Perguruan Tinggi, Staf Bappeda, anggota komisi di DPRD, dan instansi lain. Sedangkan dari unsur swasta adalah dari LSM, wakil masyarakat, dan kantor swasta.

Menurut informasi dari pemerintah daerah bahwa Program Pembangunan Daerah bukanlah rencana program pemerintah saja, melainkan merupakan rencana program pembangunan seluruh komponen daerah. Hal ini juga terlihat dari partisipasi para responden dalam survei yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dan bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI), semua responden ini adalah dari seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bangka. Penyusunan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka (Properda) ini merupakan hal yang sangat penting sebagai tindak lanjut Penjabaran Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Bangka sebagai arah kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan.

Program Pembangunan Daerah (Properda) merupakan payung bagi seluruh lembaga pemerintah di daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan. Lebih jauh lagi, proses penyusunan Program Pembangunan Daerah yang dilakukan secara

transparan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Program dalam Renstra Propinsi masuk ke kabupaten, dengan dana dari propinsi melalui Rakorbang propinsi. Mekanisme pembangunan kabupaten, untuk saat ini memperhatikan aspirasi masyarakat/*bottom up*. Caranya adalah aspirasi masyarakat disampaikan melalui rapat desa. Kemudian dibawa ke rapat tingkat kecamatan, kemudian hasil dari kecamatan dibawa ke Forum Koordinasi Pembangunan Kabupaten (Rakorbang I). Akhirnya dibawa ke Rakorbang Propinsi (Rakorbang II) yang dihadiri oleh wakil dari Kota, Kabupaten dan Propinsi. Setelah berlakunya undang-undang Otda, pembangunan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, penekanan dari bawah keatas, sesuai dengan dana yang ada. Hal ini sesuai dengan UU No. 22 Th 1999, Bab 1, Pasal 1,h, bahwa :

*Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*

Masalah-masalah ketenagakerjaan dalam jangka panjang kedepan merupakan tugas semua sektor, masalah tenaga kerja ini sering dibahas dalam rapat dengan DPRD. Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina, padahal Dinas Tenaga kerja harus menampung tenaga kerja untuk disalurkan ke industri-industri. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan hubungan industrial agar tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dan industri. Keadaan ini sesuai dengan tujuan, dan sasaran rencana strategi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Tahun 2002 s/d 2004 yaitu :

- *“Meningkatkan hubungan industrial dan jaminan sosial”*
- *“Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan terlaksananya jaminan sosial tenaga kerja”*
- *Terwujudnya masyarakat industrial yang harmonis”*

Mekanisme pembuatan kebijakan di propinsi dengan menampung aspirasi masyarakat yang dibawa oleh pejabat legislatif dan eksekutif. Pejabat eksekutif menerima data mulai dari tingkat desa sampai dengan propinsi, sedangkan pejabat legislatif mencari

data sendiri langsung ke masyarakat. Data dari lembaga legislatif dan eksekutif dibahas bersama di DPRD, dengan dihadiri pejabat dari semua instansi yang mewakili, dirumuskan dan disesuaikan dengan program renstra.

Pembuatan Properda Kabupaten dilakukan oleh para staf yang baru menyelesaikan Spamen, biasanya mereka bekerja sama dengan UI atau UGM, kemudian diseminarkan didepan anggota DPRD. Kalau pembuatan properda langsung ke Renstra, hal ini kurang nyambung/ tidak berhasil, karena para konsultan kurang menguasai dinas-dinas. Pembuatan Renstra juga demikian, namun demikian hasilnya masih mentah.

Mekanisme pembuatan kebijakan di Kabupaten Bangka menurut pandangan Bappeda berdasarkan pada GBHD (Garis Besar Haluan Daerah) dan seperti pada propinsi kemudian didiskusikan melalui seminar didepan anggota DPRD dan bekerja sama dengan LPEM-UI disesuaikan dengan Renstrada. Hal ini berdasarkan pada input yang masuk dari LSM, Karangtaruna, Desa, Kecamatan, Dinas-dinas dan instansi vertikal.

### **Pemerintah sebagai unsur pembuat kebijakan.**

Dalam era demokrasi dimana peran rakyat dalam konteks kenegaraan menjadi penting dalam upaya dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini seperti apa yang digariskan dan sebagai semangat penjiwaan era reformasi dan otonomi daerah yang menekankan kepada pembangunan atas dasar kepentingan rakyat. Keadaan dan semangat demokrasi dalam kegiatan masyarakat yang akan ditandai dengan penguatan civil society (Warsilah, H, 2003) berarti bahwa rakyat diberikan peluang untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Menurut pemahaman dalam rangka konsep kenegaraan, kemudian individu diberikan kebebasan dalam melaksanakan organisasi dan memunculkan pendapat serta menyalurkan keinginannya melalui jalur perwakilan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah ketenaga kerjaan di daerah pada intinya terkait dengan persoalan besar yakni masalah pengangguran. Sekurangnya ada tiga faktor utama dalam keterkaitannya dengan persoalan pengangguran yaitu isu lapangan kerja itu sendiri,

masalah penyerapan tenaga kerja (recruitment), dan masalah penyiapan tenaga kerja daerah. Kemudian dalam rangka melakukan pembahasan tentang tiga isu besar tersebut tampaknya sangat terkait dengan persoalan kelembagaan. Artinya bahwa bagaimana masalah tersebut bisa dipecahkan, karena sudah dapat dipastikan akan tidak terselesaikan dengan membiarkan berbagai persoalan tenaga kerja tanpa menyertakan lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta swasta. Oleh karenanya kaitan dengan kelembagaan yang berhubungan dengan pengelolaan dan penanganan masalah di daerah pemerintah daerah perlu mempersiapkan infra struktur yang dapat mendukung pembangunan khususnya dalam persoalan tenagakerja.

World Bank (1993) yang dikutip dalam buku "Propeda Bangka" menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diwujudkan dengan bercirikan konsep *good governance*. Dalam kenyataannya diakui bahwa pelaksanaan konsep tersebut tidak mudah untuk kehidupan sehari-harinya. Bahkan secara empiris di Indonesia masih banyak diperdebatkan bagaimana melihat pemerintah yang bersih dan seperti apa paradigma yang diajukan. Konsep secara ideal dalam *good governance* tersebut pada intinya meliputi:

1. Masyarakat mempunyai partisipasi yang besar dalam Pemerintahan
2. pembuatan kebijakan yang mengikuti keterbukaan
3. pimpinannya dapat dipercaya dan punya akuntabilitas
4. kondisi birokrasi yang professional
5. adanya aturan hukum yang pasti.

Pada dasarnya konsep tersebut merupakan paradigma untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-hari bagi aparat di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Pemerintah adalah merupakan unsur pelaksana kekuasaan eksekutif yang pada dasarnya melaksanakan kegiatan dan jalannya urusan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1, UU. 22 tahun 1999 kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. serta kewenangan lainnya. Dalam praktek bahwa pemerintah berusaha untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah setidaknya ada dua belas (12) poin yang akan dicapai.

Sedangkan dalam bidang yang terkait dengan peningkatan perokonomian dan ketenagakerjaan meliputi :

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis kepada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, mandiri maju berdaya saing dan lterwujudnya ingkungan berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dapat tercapai jika terwujud kondisi ekonomi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan, dan terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kemudian juga tidak akan disangkal lagi jika Kabupaten Bangka tidak akan bias berdiri sendiri, artinya bahwa secara kehidupan sosial-ekonomi tidak terlepas dengan persoalan nasional dan internasional secara global. Keadaan ini tentu saja termasuk dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan di Bangka. Khususnya usaha dalam rangka penyiapan tenaga kerja di daerah harus juga mempertimbangkan kepentingan nasional dan dunia global. Karena perkembangan yang terjadi dalam persaingan pasar tenaga kerja mengarah bukan hanya persoalan tenaga kerja yang bersifat kuantitas tetapi telah berkembang bagaimana meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja yang ada. Oleh karenanya penyiapan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan mandiri adalah hal yang perlu disiapkan. Sehingga upaya untuk mendapatkan tenaga kerja secara tepat dan jumlah yang ideal harus ada dukungan dari pihak pemerintah dan masyarakat penggunaan tenaga kerja. Tidak saja ketenaga kerjaan dalam menyongsong globalisasi hanya mengandalkan tenaga kerja terampil tetapi tenaga kerja yang berkemampuan teknologi akan lebih dibutuhkan dalam masa mendatang.

Seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat, tuntutan akan SDM yang bermutu memang menjadi keinginan daerah. Maka sasaran meningkatkan mutu SDM sebagai sasaran pembangunan bersama-sama upaya pemerataan penanggulangan kemiskinan secara terpadu menjadi program kerja pemerintah kabupaten Bangka. Keterkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan adalah bagaimana aspek SDM dapat memberikan sumbangan terhadap sejumlah tenaga kerja yang memiliki kualitas, kualifikasi yang produktif dan disiplin. Tenaga kerja sendiri adalah

input produksi manusia yang menentukan dalam setiap kegiatan proses produksi. Pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan untuk menyiapkan dan menyediakan lapangan kerja dan lapangan berusaha untuk setiap angkatan kerja. Sehingga setiap tenaga kerja diharapkan memperoleh pekerjaan yang sesuai dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ( pasal 27, UUD 1945).

Menyadari bahwa pencari kerja di kabupaten Bangka sebagian besar adalah berlatar belakang pendidikan SLTA. Keadaan ini terjadi sejak tahun 1999. Oleh sebab itu arah pembangunan ketenagakerjaan dari pemerintah tampak terfokus kepada dua persoalan, yaitu bisa dilihat dari terealisasinya kegiatan proyek, yakni: proyek sosialisasi peraturan ketenagakerjaan dan proyek pelatihan ketrampilan wira usaha (Propeda Bangka). Maka program yang dipikirkan kemudian meliputi program peningkatan usaha kesejahteraan tenaga kerja, program pembinaan hubungan industrial, program pelatihan dan ketarampilan, program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, program pembinaan dan pengembangan produktivitas, program pengembangan dunia usaha dan pengembangan pembinaan dunia usaha. Program yang terakhir tersebut, baik melalui dinas tenaga kerja, perlu melakukan perhatian atau memprioritaskan untuk memberikan peluang bagi pencari kerja atau dalam konsep ketenagakerjaan berusaha untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja. Salah satu hal yang perlu diketahui bahwa dalam salah satu perlindungan tenaga kerja dalam hal penentuan upah minimum masih ditetapkan oleh suatu keputusan Gubernur untuk wilayah kabupaten dan Kota serta upah minimum berdasarkan sektoral. Menurut SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (SK. Gubernur No. 188.44/ 504.A/TK.T/2002), bahwa upah minimum sektoral dan kabupaten kota hendaknya mengacu terhadap keputusan Gubernur tersebut.

Peran pemerintah masih sebagai pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat, prioritas program sesuai dengan kemampuan dana APBD. Pelaksanaan teknis hanya sampai Dinas Propinsi. Pembinaan dan pelatihan ini sesuai dengan butir-butir tujuan rencana strategi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Tahun 2002 s/d 2004 yang bunyinya sebagai berikut :

- *“Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktifitas perlindungan tenaga kerja”*
- *“Terciptanya tempat kerja yang bebas dari pelanggaran norma kerja”*

Dengan ditingkatkannya kualitas tenaga kerja ini diharapkan masyarakat dan pemerintah juga berperan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berusaha secara spesifik di Kabupaten Bangka adalah usaha penambangan. Mungkin karena cara penambangannya mereka ini tidak lazim, sehingga para penambang ini juga biasa disebut dengan *“tambang inkonvensional”* (TI).

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan yang telah tertuang dalam *“tujuan rencana strategi”* tersebut, maka pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Bangka dalam rencana strateginya Tahun 2002 s/d 2004 antara lain mempunyai sasaran sebagai berikut :

- *Membuka lapangan kerja dibidang pertambangan*
- *Mengurangi dampak lingkungan akibat kegiatan penambangan*

Dengan adanya peluang bagi masyarakat untuk berusaha dibidang pertambangan dan kegiatan penambangannya supaya tidak merusak kelestarian lingkungan ini, maka dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang lain. Peran pemerintah juga melaksanakan kontrol terhadap semua kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan dan kerusakan-kerusakan sumber alam. Karena telah diketahui bahwa kegiatan penambangan masyarakat tersebut adalah penambangan timah yang dilakukan secara inkonvensional. Kontrol ini biasanya berlaku pada masyarakat yang melanggar atau tidak mentaati aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku dalam hal ini adalah seperti yang pernah disosialisasikan dalam pelatihan dan pembinaan pada masyarakat. Dengan demikian diharapkan mereka melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Maksudnya bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak merusak sumber-sumber alam misal sumber mata air.

Kontrol pemerintah ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, point 8, sebagai berikut :

*“Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan sebanyak-banyaknya 2 unit mesin yang masing-masing berkekuatan 20 PK”*

Dengan demikian perda ini mengatur para penambang agar melakukan kegiatan penambangan ini tidak merusak sumber-sumber alam. Apabila para penambang tidak diatur, kemungkinan akan ada yang menggunakan mesin dengan kekuatan lebih besar hal demikian akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sumber alam. Kebijakan pemerintah memang biasanya diawali dari adanya masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dari masalah-masalah biasanya diselesaikan oleh dinas yang terkait, kemudian masalah tersebut dibawa dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) tingkat propinsi. Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang pejabat di Bappeda Propinsi Bangka sebagai berikut :

*“..... sebenarnya rakyat menghendaki tetap diberlakukannya penambangan sesuai aturan. Makanya hal ini akan dibahas dalam Perda yang dimulai dari pemerintah daerah. Biasanya Pemda membawa masalah-masalah yang timbul dari masyarakat”*

Kebijakan yang ada dalam tujuan dan sasaran rencana strategi Dinas Pertambangan dan Energi ini selain berperan mengontrol sekaligus juga memberikan pelatihan dan pembinaan. Pelatihan dan pembinaan berdasarkan pada sasaran dan tujuan rencana strategi Dinas Tenaga Kerja agar masyarakat memiliki kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam menciptakan tempat kerja yang sesuai dengan norma-norma kerja. Hal ini tertuang dalam butir-butir tujuan Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja, antara lain berbunyi sebagai berikut :



- *“Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas perlindungan tenaga kerja”*
- *“Meningkatkan hubungan industri dan jaminan sosial”*
- *“Terciptanya tempat kerja yang bebas dari pelanggaran norma kerja”*

Kendala yang dihadapi misalnya tidak bisa berkembangnya pelatihan perikanan, kemungkinan disebabkan karena masyarakat tidak menyukai ikan air tawar melainkan lebih suka makan ikan air laut, sehingga pemasarannya sulit. Akibatnya harga air tawar drop, ikan tidak laku dan akhirnya pengusaha bangkrut. Hal yang sama juga dihadapi pada pelatihan.

## **Peranan DPRD**

Pemerintah daerah adalah unsur eksekutif yang berkewajiban melaksanakan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pembinaan kearah yang lebih baik. Dilain pihak unsure DPRD sebagai lembaga Perwakilan Daerah adalah lebih cenderung merupakan lembaga yang bersifat dan berfungsi sebagai kekuatan politik. Peran DPRD meliputi wewenang dalam legislative (perundang-undangan), kemudian dalam Kontrol dan Budgeting dimana lembaga ini turut serta menentukan RAPBD bersama-sama dengan Bupati.

Peranan DPRD dalam legislative di tingkat Kabupaten adalah bersama-sama dengan Bupati sebagai kepala eksekutif menentukan peraturan daerah. Sebagai contohnya bahwa peraturan yang telah dikemukakan dalam bagian terdahulu dan telah menjadi ketetapan yang berlaku di Bangka merupakan rumusan yang diajukan oleh pemerintah dan dibicarakan dalam rapat-rapat di Lembaga Dewan. Sebagai peraturan daerah seperti Pola dasar Daerah adalah merupakan kebijakan bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan kegiatan diperlukan dana maka disusunlah Rencana Anggaran Pendapatan belanja Daerah. Kemudian dari APBD yang telah disetujui dituangkan kepada masing-masing dinas dalam bentuk Rencana Startegis Dinas teknis. Kemudian dinas sebagai unsur pelaksana teknis melaksanakan dengan tetap berpedoman dengan rencana yang telah ditentukan.

Dalam aspek ketenaga kerjaan tentu saja tujuan perencanaan akan mengarah untuk usaha pemecahan persoalan. Persoalan ketenaga kerjaan di Kabupaten Bangka menurut Kepala dinas yang mengurus ketenaga kerjaan meliputi:

*“bahwa SDM yang ada di Dinas masih terbatas karena dinas tersebut sangat baru. Kemudian belum siapnya tenaga kerja lokal dalam bidang pertanian dan masalah yang utama adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM di ketenaga kerjaan di Bangka”.*

Dalam perencanaan ketenaga kerjaan banyak dipengaruhi oleh kondisi yang berjalan di lapangan atau dengan kata lain sangat dipengaruhi oleh kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bangka. Pada prinsipnya lembaga dewan perlu secara aktif melakukan penjangkaran isu-isu ketenagakerjaan apa yang menjadi persoalan khususnya di daerah. Misalnya dalam usaha meningkatkan kualitas SDM sebagai tahap awal dalam penyiapan tenaga kerja yang memiliki kualitas, keterampilan dan diharapkan mampu memiliki daya saing. Meskipun demikian DPRD secara jujur melalui beberapa anggotanya menyatakan bahwa dari aspek pendidikan di Bangka ini telah muncul usaha untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas tetapi ternyata belum memenuhi kebutuhan seperti apa yang diharapkan di Bangka sendiri. Adanya sekolah tinggi Ilmu Pertanian misalnya diharapkan nantinya betul-betul dapat menyiapkan dan mendorong terciptanya tenagakerja yang siap di bidang pertanian. Kemudian pada gilirannya diharapkan dapat terbentuknya usaha perkebunan yang memadahi bagi masyarakat Bangka seperti pengembangan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan lada agar bias menjadi perkebunan yang memiliki daya produksi yang unggul.

Keterkaitannya dengan penyiapan SDM di sini adalah dengan adanya perguruan tinggi pertanian tersebut diharapkan diperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi di bidang pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas tentu saja mencakup bidang kehutanan, perkebunan, peternakan dan juga perikanan. Oleh sebab itu di dalamnya termasuk bagaimana Bangka bisa mengembangkan usaha perikanan. Secara umum DPRD memang juga mendukung terhadap berdirinya sekolah menengah perikanan negeri. Namun kenyataannya pada saat penelitian lapangan dilakukan, pembangunan sekolah masih pada proses pembuatan

prasarana bangunan gedung, akan tetapi penyediaan tenaga pengajar sama sekali belum ada persiapan.

Visi dan Misi daerah di bidang kelautan, mewujudkan dan memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan dengan memberdayakan nelayan dan petani untuk menuju Bangka yang berwawasan agribisnis dan industri maritime. Maka sasaran yang sekaligus menjadi misi dari pembangunan daerah, adalah kualitas dan kesejahteraan SDM menjadi penting. Pembangunan sektor kelautan dan pertanian diharapkan dapat memberi peluang untuk menampung tenagakerja. Hal ini meskipun dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa di kabupaten Bangka tidak terlalu banyak pengangguran, akan tetapi diyakini bahwa angka pengangguran akan meningkat pada masa mendatang.

Demikian halnya di bidang kehutanan usaha pembangunan di bidang tersebut juga mengkait terhadap perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha kepada masyarakat. Bahkan dalam kebijakan umumnya sektor kehutanan dan perkebunan adalah bahwa memposisikan pemerintah hanya sebagai fasilitator terhadap keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam mengolah kehutanan dan perkebunan. Ini artinya bahwa pemerintah akan erusaha untuk menawarkan kepada pihak investor secara terbuka dan dengan pendekatan yang professional. Siapa saja dapat masuk untuk membuka usaha di Bangka dengan assesmen yang telah ditentukan.

Bangka dalam tujuannya ingin menjadikan wilayahnya sebagai daerah tujuan wisata yang handal. Ini berarti juga perlu didukung dengan sumber daya yang potensial dan SDM yang professional. Sebab sebutlah bahwa era globalisasi mungkin dapat mengakibatkan homoginisasi budaya yang sekaligus secara paradoks memunculkan kebudayaan lokal yang bisa dipandang unik. Bangka seperti telah disebutkan diatas dimana kebudayaan melayu dan china tampak dominan. Perkembangan sekarang juga tampak bahwa kebudayaan pendatang (jawa) juga tampak disini. Meskipun demikian Bangka sendiri sebetulnya tidak memiliki kekhususan kebudayaan asli seperti daerah lain. Hal ini akan memberikan suatu yang memiliki potensi yang baik untuk dasar pengembangan kebudayaan dan juga bagaimana bias mendorong budaya kerja nantinya.

Dari uraian tersebut diatas sebenarnya secara filosofis, semangat masyarakat Bangka pada umumnya kearah kemajuan telah terlihat ingi maju. Sekurangnya keniatan itu tampak dalam benak di hati masyarakat. tetapi apa daya era baru berarti juga dalam perjalanannya baru melakukan persiapan dan aturanpun dianggap juga dalam rangka mencari waktu yang tepat. Atau dikatakan bahwa dalam penyiapan ketenagakerjaan di Kabupataen Bangka tersebut baru dalam tingkat permulaan sesuai dengan era pembenahan keorganisasian dinas maupun aparat pejabat pemerintah daerah. Dalam pengertian ini tampaknya Bangka saat ini baru sampai kepada tingkat penyiapan unsure supra struktur dan infra struktur dalam pemerintahan. Yakni Supra struktur pembenahan organisasi masih dirasakan perlu, disamping juga melengkapi aparatnya sebagai pelaksana segala kegiatan yang ingin dilaksanakan.

Dalam tugas pengawasan DPRD, pada dasarnya mempunyai tanggung jawab agar peraturan dan kebijakan daerah yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan yang sifatnya fungsional. Beberapa pengawasan yang harus dilakukan DPRD meliputi:

- a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain.
- b. Pelaksanaan keputusan bupati
- c. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- d. Kebijakan pemerintah daerah
- e. Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang terkait kepentingan daerah
- g. Dan menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat (lihat pasal 18, UU No. 22/1999).

Meskipun demikian dikatakan melalui anggotanya bisa turun kebawah atau menerima segala aduan dari masyarakat maupun kelompok LSM misalnya sebagai sesuatu usaha mengawasi secara tidak langsung. Pengawasan jalannya pemerintahan sebenarnya diakui oleh salah seorang pejabat Bupati baru juga dilakukan oleh *"Massmedia, sedangkan kalau dari anggota DPRD ada acara kunjungan wakil rakyat itu kedaerah kalau tidak salah 3 bulan sekali"*.

Hal seperti ini tampaknya berjalan dengan baik, meskipun demikian dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak yang tidak terjangkau dari pengawasan tersebut. Ini dikarenakan persoalan ketenagakerjaan sendiri menurutnya sangat luas dan terkait dengan permasalahan kehidupan baik secara social dan ekonomi sehari-hari masyarakat. Hal itu seperti diakui sendiri oleh ketua Komisi E di Lembaga DPRD Bangka yang mengatakan bahwa dalam aspek ketenagakerjaan yang terkait dengan pertambangan: seperti khususnya pertambangan rakyat (perda No6/2001 tentang aturan main penambangan, Perda No 20/2001 Status tambang timah menjadi bahan perdagangan strategis dan Perda No 21/2001 tentang penjualan timah harus berupa balok timah).

Masalahnya sangat sulit untuk menegakan hukumnya, dalam arti peraturan daerah ini terkesan kurang dapat optimal diikuti oleh masyarakat. Ini disebabkan penegak hukum dihadapkan kepada kenyataan dimana masyarakat memang lapar dan perlu lapangan kerja untuk dapat menghidupi diri dan keluarganya. Kenyataan ini terjadi dalam usaha timah tradisional (TI) ini yang sulit untuk melakukan penertiban. Hal ini juga dirasakan oleh anggota dewan tentunya. Bahkan kesulitan untuk penertiban TI masih di tambah dengan adanya isu umum dimana usaha penambangan TI kadang dibeking oleh oknum yang memilki posisi “kuat” baik dari lingkungan formal maupun dalam lingkungan masyarakat.

Meskipun hal yang lain yang cukup menjadi keprihatinan bagi dunia ketenagakerjaan dimana bahwa perlindungan ketenagakerjaan di lapangan TI ini sangat lemah. Hal ini seperti dinyatakan oleh seorang petugas lapangan tentang pertanian: *bahwa di usaha tambang TI sering terjadi kecelakaan seperti pekerja yang tertimbun tanah yang ditambang atau kehilangan anggota badan seperti tangan tidak terdatakan oleh pihak pemerintah terkait.*

Tampaknya Institusi DPRD pada era Orde Baru tidak berfungsi seperti saat ini, dimana berbagai fungsi telah dilaksanakan seperti fungsi legislative, pengawasan maupun pada implementasi ketenaga kerjaan misalnya. Meskipun juga DPRD menjadi patner kerja pemerintah dipandang kurang dapat melakukan kegiatannya dan wewenangnya ketika masa Orde Baru. Hal tersebut juga dipahami dimana kenggotaannya sangat banyak ditentukan secara politik dimana golongannya juga merupakan bagian dari pemerintah yang berkuasa baik di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah

Pusat. Waktu itu memiliki satu slogan bahwa semua komponen dalam pemerintahan termasuk unsure masyarakat harus mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Kemudian dalam prakteknya mereka yang diduga menghalangi kepentingan pembangunan akan mengalami persoalan dengan aparat.

Tatanan kehidupan berbangsa di Indonesia dewasa ini telah berubah, era reformasi telah menjadi stigma perjuangan, perubahan di mana-mana baik dalam tatanan pemerintahan maupun dalam lingkungan masyarakat. Di lain pihak, di Bangka yang saat itu PT Timah menjadi pihak yang sangat kuat dan menentukan kehidupan ekonomi wilayah kepulauan ini, ternyata merupakan kabupaten yang masih menjadi wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Saat sekarang warga di daerah ini merasa memiliki kebebasan dan memiliki daerah dan pemerintahan yang bersifat otonom. Kabupaten Bangka, dengan pemerintah daerah yang didampingi dengan DPRD sendiri. Namun dalam pelaksanaannya perkembangan pemerintahannya tampaknya masih pada tingkat konsolidasi (ketika pengamatan ini berlangsung) baik dalam tingkat kebijakan dan pelaksanaan di beberapa dinas tertentu.

## **Peran Dunia Usaha dan Masyarakat**

Dalam era reformasi ini di Indonesia atau di berbagai penjuru wilayah seperti yang dikatakan Warsilah, H (2002) merupakan keadaan paska orba. Keadaan mana umumnya yang ditandai dengan transisi, yang mana kita mengerti bahwa perekonomian dalam keadaan masih terpuruk. Keterpurukan bidang perekonomian juga membawa dampak terhadap masalah lainnya seperti bidang sosial dan politik. Kondisi sebelum Reformasi di mana pada masa jayanya "Konglomerasi" ekonomi di mana para pengusaha bergabung dalam konsi usaha untuk memperoleh keuntungan (profit) yang sebesar-besaarnya melalui kemudahan dalam perolehan permodalan, maupun kemudahan melalui jalur-jalur yang bersifat formal lainnya seperti kebijakan pemerintah dalam keringanan pajak misalnya. Keadaan tersebut mengingatkan kita betapa sulitnya bagi pemilik modal untuk berusaha jika seseorang pemilik modal tersebut tidak memiliki kedekatan dengan pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan. Sedangkan kita

tahu bahwa UKM adalah sector yang memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam masa resesi ekonomi. Keadaan itu telah dibuktikan bagaimana kemampuan pengusaha kecil menengah bias tetap bertahan hingga sekarang.

Kondisi resesi ekonomi Indonesia yang kurang menguntungkan tersebut juga dialami oleh kabupaten Bangka, apalagi setelah PT.Timah di propinsi ini melakukan rasionalisasi perusahaan yang mana intinya melakukan kebijakan efisiensi. Selain itu dampak langsung dalam bidang ketenagakerjaan adanya kebijakan perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Dilain pihak PT Timah juga menurunkan produksi yang terutamanya dipicu oleh menurunnya harga Timah di pasaran internasional.

Para pengusaha tampaknya tidak terlalu kelihatan peranannya dalam (arti formal) bekerja sama dengan pemerintah. Meskipun secara diplomasi para anggota legislative di daerah (DPRD) menyatakan bahwa dunia usaha pernah bekerjasama dalam memajukan daerah dalam arti merekrut tenaga kerja. Disamping itu bahwa aspirasi mereka juga didengar pemerintah, meskipun menurut pejabat dinas di lingkungan dinas tenaga kerja Bangka hanya pada saat saat sulit pengusaha menghadapi persoalan dengan tenaga kerja yang ada..

Dalam pembangunan pendidikan seperti yang tertuang dalam Properda dinyatakan bahwa "sektor pendidikan di kabupaten Bangka selama ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan komitmen dari pihak swasta". Pernyataan itu kemudian dilengkapi dengan data yang menunjukkan lebih dari 50 persen pengelolaan sekolah tingkat SLTP adalah swasta.

Kemudian pada tingkat menengah atas justeru mencapai 70 persen yang dikelola oleh swasta. Demikian halnya bahwa disadari penduduk Bangka adalah penduduk yang muda berarti umur angkatan kerja akan menjadi perhatian. Bahkan seperti seorang pengusaha yang membuka kawasan wisata Pantai Parai, juga menyatakan bahwa akan meningkatkan keterampilan SDM melalui sekolah kejuruan (SMK) untuk mengisi lapangan kerja yang berkaitan dengan kepariwisataan, dan restoran. Namun demikian hal ini juga belum dapat dikatakan dapat memadahi dalam kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja di bidang kepariwisataan di Bangka secara

keseluruhan. Meskipun potensi pariwisata misalnya yang sedang dikembangkan belum mampu menyerap pencari kerja.

Demikian halnya PT Timah yang juga berusaha mempersiapkan kualitas SDM menuju tenaga kerja profesionalisme di Bidang keteknikan, maka dibentuklah sekolah Politeknik dalam spesialisasi dan kejuruan di bidang Mesin, Elektronika dan Rancang Bangun. Salah satu tujuan PT Timah misalnya adalah merencanakan perbaikan terhadap produksi mutu Timah. Selain itu PT Timah melakukan diversifikasi produk terhadap mineral lain. Oleh karenanya disadari bahwa fungsi pengembangan SDM cukup strategis. Untuk itu membentuk Politeknik selain sebagai tempat mendidik calon profesional juga sebagai tempat pelatihan dan pembinaan SDM didalam Timah sendiri. Dalam usaha penyiapan tenaga kerja yang tangguh pihak swasta telah memulai kepeduliannya terhadap dunia kependidikan. Hal ini tentu saja bisa dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan setempat.

Pada tahap penyiapan tenaga kerja seperti yang dilakukan oleh Yayasan L. Jhon yang membuka sekolah kejuruan di bidang kepariwisataan adalah merupakan partisipasi pihak swasta yang baik. Keadaan seperti ini tentu saja pemerintah akan membuka dirinya dan mendukung keberadaan prakarsa dari pihak swasta lainnya. Setidaknya partisipasi pihak swasta tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan kepada semua pihak untuk dapat berbuat seperti yang telah dilakukan oleh Yayasan L. Jhon di Kabupaten Bangka. Pemerintah dapat memberikan bantuan seperti pembinaan atau penyiapan fasilitas dari aspek bantuan SDM dan sarana lain misalnya.

Dalam proses perekrutan tenaga kerja sering dikatakan bahwa peran pengusaha cukup penting. Namun seperti yang dinyatakan oleh Kepala dinas yang mengurus tenaga kerja bahwa pengusaha banyak melakukan perekrutan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah. Bahkan terjadi kalau ada persoalan mereka umumnya lari kepada Dinas untuk turut menyelesaikan. Disini perlunya terjadi ruang koordinasi, apakah pihak pengusaha atau industri selalu melakukan pengecekan apakah mereka sebenarnya telah tercatat sebagai pencari kerja (memiliki kartu kuning). Dan jika demikian apakah pencari kerja sudah melapor kepada instansi terkait ?. Mungkin pertanyaan pertanyaan tersebut



diperlukan dalam kepentingan data ketenagakerjaan. Namun inilah yang menjadi persoalan banyak tenaga kerja yang sudah memperoleh pekerjaan, maupun mereka yang belum umumnya ada perasaan malas untuk melakukan/melaksanakan ketentuan tentang keharusan harap melapor kepada instansi pemerintah dalam waktu sebulan sekali misalnya. Sedangkan data ini diperlukan paling tidak untuk dimanfaatkan sebagai dokumen yang dapat memperlihatkan data ketenagakerjaan seperti komposisi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja dan tingkat pencari kerja.

Dalam aspek pembinaan tenagakerja, jika antara pengusaha dan pihak dinas tenaga kerja kabupaten kurang menjalin keterkaitan secara baik dalam meningkatkan kinerja penyipian dan pembinaan. Maka dapat diperkirakan terjadi pembinaan tenaga kerja di kabupaten Bangka yang kurang optimal. Seperti yang dikeluhkan Kepala Dinas bidang tenaga kerja bahwa selama ini terjadi kontak antara pengusaha dan pihak dinas jika dalam perusahaan menemui persoalan ketenaga kerjaan seperti masalah dalam upah maupun hubungan industrial lainnya.

Dalam persoalan usaha penciptaan lapangan kerja, pengusaha terutama yang bergerak pada usaha kecil menengah termasuk di dalamnya Usaha Tambang Konvensional (TI) pada saat penelitian dilakukan ini cukup memperlihatkan adanya perkembangan yang berarti. Bahkan dalam Pulau Bangka ada yang menaksir sekitar 5000 penambangan jenis ini. Meskipun ini dipandang merugikan secara lingkungan maupun dilihat dari faktor persoalan tenaga kerja lain dan pendapatan daerah. Tetapi sulit untuk melakukan penertiban. Bahkan dalam perlindungan tenaga kerja dalam dunia pertambangan ini sangat tidak bias terkontrol. Menurut salah satu petugas lapangan pertanian mengatakan: *sering terjadi kecelakaan kerja pak sepreti orang tertimbun longsor tanah galian. Ini tidak dilaporkan kepada pemerintah. Bahkan sering terjadi sampai pada kematian.*

Kesempatan kerja lain yang memberikan lapangan kerja adalah terdapatnya banyak industri kecil dan menengah yang semuanya berbahan baku dari sumberdaya yang ada di Bangka. Jumlah industri di Bangka tercatat 6. 215 unit (properda, 2004) dan merekrut tenaga kerja sejumlah 23.015 orang. Sedangkan total investasi sebesar Rp 109.594.845.000,- . dari sejumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri tersebut sekitar 15.920 berada

di industri kecil. Meskipun kita tahu bahwa dari jumlah itu sebetulnya terjadi sedikit penurunan jika dibandingkan pada kondisi tahun 1997 atau masa sebelum krisis. Di mana jumlah industri kecil lebih dari 6.100 unit dengan tenaga kerja berjumlah 17.395 orang. Sedangkan barang produksi dari usaha kecil menengah yang terlihat menonjol adalah produk terasi, madu, gula aren dan rusip.

Sementara lapangan kerja di bidang perkebunan tampaknya masih terbuka lebar seperti dikemukakan oleh ketua Bappeda Bangka. Terutama Bangka memiliki potensi lahan perkebunan yang luas yang meliputi tanaman lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Dilihat dari perkembangan kontribusi sector perkebunan terhadap bidang pertanian cukup dominan. Pada tahun 1999 kontribusi perkebunan terhadap PDRB pertanian adalah 45 persen. Disamping perkebunan juga perikanan baik perikanan darat dan laut. Hal ini merupakan salah satu prospek unggulan dari pulau Bangka. Ketentuan ini juga dimuat dalam program Pembangunan daerah (Perperda yang disusun oleh pemerintah dan DPRD. Usaha sektor perikanan tampaknya masih didominasi oleh perikanan laut. Untuk prospek kedepan akan diimbangi dengan sector perikanan darat seiring dengan memdaya gunakan galian-galian dari timah. Usaha-usaha diatas tentu saja diharapkan nantinya dapat memberikan peluang lapangan kerja bagi penduduk setempat.

Di lain pihak potensi pengembangan lainnya adalah bidang kepariwisataan dimana di beberapa wilayah pantai sekitar pulau Bangka cukup indah panoramanya. Lihat saja pantai Parai dan Matras yang sekarang dikembangkan oleh pengusaha asal daerah setempat sebagai kawasan kepariwisataan pantai yang menarik. Kemudian dalam bidang ini tentu perlu ditunjang berbagai usaha penunjang kepariwisataan seperti hotel, transportasi dan lain-lain.

Peran masyarakat dalam usaha pembangunan ketenaga kerjaan adalah perlu dikembangkan. Karena mereka sendirilah yang akan mengerti dan sekaligus memiliki atas kemanfaatan dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat dalam hal ini bisa dikelompokkan dalam berbagai kelompok. Di propinsi Bangka Belitung ini kita katakan ada tiga kelompok besar secara etnis yakni kelompok pribumi (orang melayu), penduduk keturuna nonpri yaitu China, dan penduduk pendatang dari berbagai propinsi wilayah RI.

Menurut sejarahnya sejak jaman Belanda dimana khususnya orang China didatangkan untuk bekerja di pertambangan (timah) dan perdagangan di Propinsi ini. Demikian halnya orang setempat disamping bekerja dipertambangan dan juga sebagian terbesar di lapangan pertanian. Umumnya mereka bercocok tanam tanaman perkebunan seperti coklat dan kopi. Penyerapan tenaga kerja di pertanian ini cukup besar terutama dari generasi yang lebih tua, sedangkan bagi generasi mudanya menurut beberapa nara sumber sudah beralih keinginan untuk bekerja yang sifatnya lebih pekerjaan sebagai staf atau ketatata usahaan seperti bekerja di kantor sebagai tenagakerja upahan.

Keadaan dimana penduduk keturunan China misalnya membawa kehidupan sekarang dimana para pengusaha perdagangan di Kota-kota seperti di Sungai Liat atau di Pangkal Pinang adalah mereka yang memiliki pengalaman panjang dalam berdagang. Orang keturunan China yang menguasai sebagian perdagangandi daerah tersebut. Bahkan sebagian besar dari mereka juga bekerja di TI .

Kelompok masyarakat lain yang ada di LSM biasanya juga menyalurkan aspirasinya melalui demo-demo yang mereka lakukan di depan DPRD. Menurut informasi di Kabupaten Bangka terdapat ratusan LSM, pada umumnya tidak terdaftar resmi. Menurut peraturan pemerintah semua LSM harus mendaftar, namun peraturan ini tidak ditaati oleh mereka. Ketidaktaatan ini menurut informasi karena "dirusak oleh pers". Mungkin setiap ada kegiatan oleh LSM selalu dimuat di mas media dengan pandangan yang negatif, sehingga hal seperti inilah yang membuat LSM tidak mendaftar. Selanjutnya kalau ada masalah dengan LSM, lembaga hukum yang menangani tidak jalan (macet), menurut informasi karena takut dengan pers. Dengan demikian berarti pers mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan masyarakat.

Masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan disampaikan secara tidak langsung kepada pembuat kebijakan. Seperti yang dinyatakan oleh Komisi E DPRD, Bahwa sebagian besar anggota dewan tinggal bersama dengan masyarakat maka aspirasi masyarakat dapat terserap dengan sendirinya. Hal lain yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung mengemukakan pendapat dengan bentuk unjuk rasa jika mereka merasa tidak

menghendaki adanya sesuatu kebijakan atau praktek kebijakan dari pemerintah. Hal ini seperti yang dilakukan terhadap investor dari luar yang ingin menginvestasikan dalam pengolahan hasil tangkapan ikan di kawasan ZEE. Nelayan setempat disekitar Kecamatan belinyu Kabupaten Bangka menyatakan pendapat (berunjuk rasa) di kantor DPRD setempat dengan “sedikit keras” (tahun 2002). Keadaan ini mengakibatkan investor tersebut mengurungkan kegiatannya diri di Bangka.

Contoh tersebut tampaknya bisa memberikan gambaran betapa rentannya keadaan setelah terjadinya krisis ekonomi dan berlakunya otonomi daerah, dimana suasana yang seperti itu dikatakan oleh pejabat di Dinas pemerintahan belum pernah terjadi pada masa Orde Baru. Sedang sekarang terjadi perubahan yang cukup drastik baik dalam aspek keikutsertaan masyarakat dalam hal memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang dibentuk maupun untuk melakukan pemilihan bagi pimpinannya. Situasi ini dapat dilihat bagaimana hiruk pikuknya masyarakat dan mass media setempat untuk mempengaruhi situasi perpolitikan dalam pergantian pejabat/ Bupati bangka yang saat penelitian ini diadakan baru dalam tahap pengambilan formulir calon di DPRD.

Sekarang disadari oleh masyarakat bahwa keberadaan timah akan mengalami keterbatasan jika untuk dieksploitasi tanpa batas. Untuk itu bagaimana pemerintah, DPRD dan bersama masyarakat memikirkan masalah keterbatasan bahan tambang tersebut. Dikatakan oleh beberapa narasumber bahwa masyarakat dalam memperluang lapangan kerja dan mengganti keberadaan timah dengan cara coba-coba (*trial and error*). Salah satu hal yang bisa dilihat adalah munculnya pondok-pondok makan di tepi pantai Parai. Dibidang perkebunan juga terjadi pembukaan semak-senak kemudian dimanfaatkan dengan tanaman lada. Meskipun demikian bekas-bekas sekitar pertambangan (kolong) juga masih diupayakan lagi untuk penambangan secara konvensional.

Hal yang lain juga tampak adanya beberapa penyelundupan hasil pasir timah yang illegal. Ini dilakukan karena memang menurut sumber informasi harganya cukup bersaing di pasaran Singapura. Sehingga, partisipasi masyarakat dalam bentuk praktis tersebut perlu pula diperhatikan, bagaimana melakukan pembenahan secara baik dalam membuat lapangan kerja untuk tetap menjaga kelestaraan lahan dan keberlanjutan kehidupan.

Hal yang menarik lainnya adalah, terjadinya kecenderungan di kota Sungai liat, dalam waktu dekat ini tampaknya Sungai Liat akan menghasilkan sarang burung wallet yang cukup. Hal ini terlihat bahwa puluhan pengusaha membangun rumah burung wallet disekitar pusat kota. Tenagakerjanya kebanyakan direkrut dari Jawa khususnya Wonogiri. Tampaknya para pengusaha sangat menghendaki tenaga kerja dari luar daerah terutama dari Jawa, karena mereka umumnya dapat diberi upah lebih murah jika dibandingkan tenaga kerja setempat. Dilain pihak tenaga kerja pendatang dianggap memilkipekerjaan yang baik dan juga memiliki disiplin yang lebih tinggi. Keunggulan ini akan memberikan peluang tenaga kerja pendatang dari luar untuk dapat melakukan persaingan pasar kerja yang ada di Bangka. Hal ini meskipun sudah dimengeri dan dipahami oleh masyarakat di kabupaten ini namun tampaknya belum membuat edaan yang dianggap suatu ancaman yang bersifat negative. Pendatang baru ini umumnya bekerja sebagai tenaga kerja di sector informal di beberapa pengusaha perdagangan dan jasa atau majikan yang bergerak di industri kontruksi. Keadaan ini jiga menunjukkan bahwa dalam seckor ini yang lebih mudah proses rekriutmen maupun mudahnya mereka keluar dari pekerjaan tersebut.

Keinginan masyarakat dalam usaha sarang burung wallet cukup menggembirakan. Pemerintah dalam merespon potensi yang ada. Seyogyanya pemerintah sudah mulai melakukan pemnmtauan sejak dini dan memberikan pembinaan serta perlindungan terhadap pengusaha. Hal ini hendaknya disadari agar di hari-hari mendatang tidak menimbulkan persoalan yang akhirnya sulit untuk diatasi antara masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. Kebijakan dalam memberikan kemudahan dan pembinaan usaha kepada investor usaha tersebut akan dapat memberikan dorongan terhadap usaha lain seperti perdaganagan akan lebih memberikan suasana kondusi terhadap permasalahan perekonomian pada umumnya.

## **Penutup**

Kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Bangka sepertinya sudah mengikut sertakan masyarakat juga dunia usaha untuk berperan dalam mengembangkan usahanya. Misalnya saja dalam sektor pertambangan, misinya adalah mengikut sertakan

rakyat yaitu diperbolehkan melakukan penambangan. Namun demikian meskipun ada ketentuan bahwa dalam melakukan penambangan hendaknya sesuai dengan yang benar yaitu memperhatikan cara-cara agar dampaknya tidak merusak lingkungan. Agar supaya cara-cara penambangan ini sesuai dengan yang benar, maka peran pemerintah dalam hal ini memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat bagaimana cara menambang timah yang benar dan tidak merusak lingkungan.

Sumber daya manusia di Propinsi Bangka Belitung secara umum kualitasnya masih rendah. Pengangguran tidak kentara yang sesungguhnya bekerja pada sektor non formal, terbesar bergerak di sektor timah (TI/Timah In konvensional). Hal ini karena tidak memerlukan keahlian khusus dan biaya besar. Disamping itu tidak dibawah pengawasan dan pembinaan tenaga kerja. Dari sisi Dinas Pertambangan memang misinya adalah mengikut sertakan masyarakat dalam sektor ini, maksudnya bahwa rakyat diperbolehkan melakukan penambangan. Ketentuan ini berlaku sejak Tahun 2001 sejak diberlakukannya restrukturisasi PT Timah dari 16 ribu orang karyawan menjadi 5 ribu orang. Hingga saat ini diperkirakan ada sekitar 5 ribu unit penambang, masing-masing unit menggunakan 2 mesin, tiap mesin dikerjakan oleh 2 orang. Bertambahnya penambang ini dipengaruhi oleh turunnya harga lada di pasar dunia. Hal ini disebabkan karena para petani yang tertampung pada sektor pertanian yaitu tanaman lada beralih ke sektor penambangan.

## Daftar Pustaka

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (2002)

*Bahan Promosi Dan Peta Peluang Investasi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Laporan akhir.

Hidayat, Syarif, (2002)

*Desentralisasi, Negara Kesatuan, Dan Semangat Bhinika Tunggal Ika, Masyarakat Indonesia* Jilid XXVIII, No.2 Hal 71

Pemerintah Kabupaten Bangka (2002)

*Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2002-2004*

Pemerintah Kabupaten Bangka (2002)

*Program Pembangunan daerah (Properda) Kabupaten Bangka 2002-2004*

Ratnawati, Tri, (2003)

Evaluasi Dan Implementasi OTODA, *Paper* dalam Pengayaan Ilmiah Dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Prtovinsi Kepulauan Bangka Belitung, 26-28 Mei 2003. Jakarta: Jakarta.

Soeroto, (1983)

*Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Tenagakerja*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sondakh, Lucky 1998,

Reformasi Politik Ekonomi Pembangunan Regional Dari Unitarisme ke Desentralisasi, *Makalah pada seminar*, Reorientasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perekonomian Wilayah, Fak. Ekonomi Unhas, 24 Oktober 1998.

Warsilah, Henny (2002)

Gerakan Pro Demokrasi dan Proses Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Demokratis, *Masyarakat Indonesia* Jilid XXVIII, No.2 Hal 121.





# BAGIAN V

## RANGKUMAN DAN REKOMENDASI

Oleh : Soewartoyo dan YB. Widodo

### Rangkuman

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan disertai peran aktif masyarakat. Visi dan misi pemerintah propinsi Kepulauan Bangka Belitung berbunyi: *"Terwujudnya negeri serumpun sebalai yang sejahtera melalui pemerintah yang amanah dengan meningkatkan kualitas masyarakat serta memberdayakan semua potensi daerah secara arif dan berwawasan lingkungan dalam negara kesatuan republik Indonesia"*. Oleh sebab itu melalui UU No. 27 tahun 2000, tentang terbentuknya propinsi baru dan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang OTDA, telah mendorong aktivitas pemerintah daerah bersama masyarakat dalam melaksanakan sendiri apa yang dipandang penting, misalnya dalam memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keleluasaan menggunakan dana sesuai keperluan daerah untuk memilih alternatif, menentukan prioritas, dan mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat termasuk menanggulangi pengangguran.

Proses dan Implikasi kebijakan ketenagakerjaan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan khususnya di Kabupaten Bangka dewasa ini terjadi perubahan paradigma seiring dengan kebijakan secara nasional. Perubahan tersebut adalah terjadinya proses serta pergeseran kebijakan, dimana perencanaan pembangunan lebih bersifat *bottom up* daripada praktek *top down* yang dilakukan selama orde baru, masih belum sepenuhnya dapat dihindarkan. Program pembangunan daerah dalam lima tahun (1999-2004) tertuang dalam program pembangunan daerah (properda) telah ditetapkan bersama-sama oleh lembaga DPRD dan Kepala daerah, kemudian properda tersebut diterjemahkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat duplikasi pelaksanaan dalam hal pembagian wewenang antara dinas tenaga kerja propinsi dengan

pemerintah kabupaten. Wewenang Dinas TenagaKerja Kabupaten masih di lakukan oleh tingkat propinsi, baik dalam pelaksanaan dan anggaran.

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di propinsi Kepulauan Bangka Belitung 1994 - 2000 adalah sebesar 5,3 persen, sedangkan secara khusus di kabupaten Bangka selama 10 tahun terakhir rata-rata sekitar 5,5 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sebelum krisis di wilayah tersebut cukup menggembirakan. Akan tetapi pada saat krisis ekonomi, kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 1997-1998 terjadi minus 6,3 persen, walaupun tidak berlangsung lama, kemudian kembali positif lagi menjadi 3,3 persen pada tahun 1999 dan meningkat menjadi 6 persen pada tahun 2000 (BPS & Bappeda, 2002). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000 telah terjadi pemulihan ekonomi di kabupaten tersebut, meskipun tidak sebaik sebelum tahun 1997. Sektor ekonomi yang menonjol sebelum krisis (1996) adalah pertambangan (timah dan kuarsa) dan industri pengolahan. Namun setelah krisis pada tahun 2000 nampaknya hanya sektor pertanian yang mampu bertahan, terutama subsektor perkebunan.

Sektor unggulan yang dapat dijelaskan di Kabupaten Bangka menurut indicator ekonomi dengan Location Quotien adalah dilihat data dari sektoral. Sektor pertanian di Bangka termasuk didalamnya adalah perikanan dan perkebunan masih menjadi sektor unggulan yang perlu dikembangkan. Subsektor ini merupakan kegiatan ekonomi yang cukup tahan terhadap krisis ekonomi, terutama komoditi perkebunan yang pemasarannya ke luar negeri (ekspor), di kabupaten Bangka subsektor perkebunan tersebut adalah lada dan kelapa sawit. Perkebunan dan perikanan merupakan subsektor dari sektor pertanian yang kabupaten ini nampaknya akan terus dikembangkan sebagai substitusi sektor pertambangan timah yang sudah semakin menurun produksinya. Usaha perkebunan kelapa sawit yang selama ini telah beroperasi di Kabupaten Bangka dan telah mengembangkan komoditi kelapa sawit seluas 51.121,96 ha. Sedangkan areal percadangannya secara keseluruhan ada sekitar 147.375 ha.

Pada masa krisis, sektor yang paling terpuruk adalah pertambangan dan pengolahan. Tambang timah akhir-akhir ini mulai beralih pengelolaannya dari perusahaan pertambangan besar

menjadi usaha tambang rakyat (TI - *tambang inkonvensional*). usaha pertambangan rakyat ini masih menggunakan teknologi yang sederhana dan kurang memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, usaha tambang rakyat telah meninggalkan *kolong-kolong* (lobang besar), pencemaran air sungai dan air sumur penduduk dan menghasilkan padang-padang kering yang tidak dapat ditanami baik tanaman pangan maupun perkebunan. Sedangkan di daerah-daerah yang tidak ada deposit tambang timah dapat dimanfaatkan sebagai usaha perkebunan, seperti wilayah Bangka Tengah. Subsektor perkebunan (kelapa sawit dan lada) dan perikanan tersebut akan menjadi harapan daerah ini dan telah menjadikan subsektor ini sebagai salah satu unggulannya.

Sebagai salah satu propinsi kepulauan yang terletak di Kawasan Barat Indonesia, maka arah dan strategi ketenagakerjaan masih belum terfokus pada apa yang akan ditekankan pada peningkatan kualitas SDM setempat. Kebijakan selama ini masih mendasarkan pada petunjuk pusat, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja yang bisa mengisi kesempatan kerja belum tersedia. Potensi SDA sangat memungkinkan untuk dikembangkan, seperti potensi kelautan, pantai, dan kawasan pedalaman. Pemerintah daerah menyadari akan hal ini, dan mulai mengarahkan pada pengembangan usaha lain dan tidak lagi mengandalkan pada usaha konvensional seperti timah dan lada putih. Pada pihak lain untuk menumbuhkembangkan sektor yang belum tergalai tersebut diperlukan SDM yang berkualitas. Ketersediaan SDM yang berkualitas sangat tergantung pada sarana pendidikan, akan tetapi sarana pendidikan belum terfokus pada kebutuhan pengelolaan SDA yang tersedia.

Para investor menyadari akan potensi SDA dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Kesadaran kuat bahwa SDA sangat terbatas, terutama setelah tambang timah telah habis dieksploitasi dan mulai menyusut, maka perlu dilakukan usaha lain yang banyak melibatkan kepentingan masyarakat, seperti pariwisata, perikanan dan perkebunan. Akan tetapi untuk mengelola sektor tersebut, dibutuhkan infrastruktur serta teknologi yang memadai. Selain modal usaha perlu diimbangi dengan kemampuan SDM agar dapat digunakan untuk pengelolaan sektor tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Propinsi Babel belum dapat menyediakan kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga terpaksa didatangkan dari daerah lain, seperti dari Jawa.

Perkembangan pembangunan yang terjadi selama ini memberi pengaruh terhadap pandangan bagi sebagian penduduk Bangka, seperti sikap mereka terhadap status kerja. Bagi mereka, orang dikatakan bekerja apabila mereka telah mampu mendapatkan pekerjaan formal seperti sebagai pegawai negeri atau karyawan perusahaan atau swasta. Pandangan ini kemungkinan karena pengaruh berdomisilinya perusahaan pertambangan Timah yang dikenal dikawasan tersebut yang notabene orang yang bekerja di situ dianggap sudah mapan. Oleh karena itu, bagi orang-orang muda yang hanya bekerja di sektor informal bekerja membantu di kebun atau ladang atau sebagai nelayan belum dianggap sebagai bekerja. Dengan demikian para tenaga kerja muda usia di Bangka berusaha mencari pekerjaan di sektor formal, dengan anggapan pekerjaan di sektor formal memberikan jaminan pendapatan yang tetap dan tidak terpengaruh musim maupun pasar. Kemungkinan juga didukung oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan mereka dibanding dengan orang-orang tua mereka. Mereka menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat dan bidang pendidikan yang mereka miliki. Dengan konsep kerja tersebut mendorong orang-orang muda Bangka banyak meninggalkan desanya pergi ke kota-kota di Bangka atau bahkan meninggalkan Pulau Bangka melanjutkan sekolah, merantau atau mencari pekerjaan di Jawa atau daerah lain di Indonesia. Apalagi setelah banyak orang-orang muda Bangka yang berhasil meniti karier di luar Bangka dan berhasil menjadi pejabat tinggi di Jawa atau banyak di antara mereka yang telah berhasil menempuh pendidikan tinggi di Jawa dan kemudian berhasil menduduki jabatan tinggi di Kabupaten Bangka atau Propinsi Bangka Belitung.

Penduduk yang mendiami Pulau Bangka tidak didominasi suku tertentu akan tetapi terdiri dari berbagai suku, terutama suku Melayu dan Tionghoa. Budaya yang ada merupakan campuran antara budaya Melayu dan Tionghoa, memberi arti penting terhadap perkembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu memberi nilai tambah bagi perekonomian di Bangka. Dampak langsung dari perkembangan sektor pariwisata adalah memberi keuntungan bagi usaha perhotelan, rumah makan dan restoran, termasuk juga bagi barang hasil kerajinan dan makanan khas yang dapat dipasarkan. Untuk mendukung program pariwisata di Kabupaten Bangka, telah dibangun beberapa hotel berbintang di daerah pantai.

Pengangguran merupakan masalah utama di Propinsi Bangka Belitung, terutama setelah PT Timah melakukan rasionalisasi usahanya dengan melakukan PHK sebesar 10.000 orang tenaga kerja. Sementara sektor lain belum sepenuhnya dapat menampung pencari kerja. Pemerintah daerah melakukan terobosan pengiriman TKI dari Bangka Belitung dan melakukan pendidikan pelatihan jenis ketrampilan yang tidak dapat menciptakan usaha mandiri. Disamping karena keterbatasan dana dan keterbatasan kemampuan para calon tenaga kerja. Pengembangan UKM belum mendapat dukungan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat setempat, barangkali sesuai dengan konsep kerja bagi penduduk setempat bahwa dikatakan bekerja bila menjadi pegawai negeri dan bekerja di tambang timah. Pengembangan Usaha kecil masih sangat terbatas, padahal sektor ini merupakan sektor penting dalam menghadapi krisis.

## Rekomendasi

Trilogi pembangunan umumnya berorientasi kepada pemerataan, kestabilan dan pertumbuhan. Inilah yang juga disebut sebagai konsep *redistribusi with growth* (H.W. Singer). Tujuan dan sasaran pembangunan daerah perlu didasari dengan apa yang menjadi visi, misi daerah. Ini dapat dijumpai dalam Poldas/GBHD. Visi bisa dianggap sebagai tujuan secara umum dan misi adalah dianggap sebagai arah dari suatu program yang direncanakan. Terutama dalam melakukan arah pembangunan selain memanfaatkan sektor unggulan yang sudah ada, perlu usaha menarik para investor baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk masuk dalam pengembangan setor unggulan tersebut. Demikian pula disertai dengan melakukan strategi pengembangan sumber daya manusia secara cepat.

Aspek pembangunan ketenagakerjaan tidak akan pernah terlepas dari usaha dalam memajukan aspek kesempatan kerja, di mana bidang ini diharapkan dapat membenahi terhadap setiap permintaan kerja bagi tenaga kerja dalam bentuk lapangan pekerjaan. Secara sepintas penduduk yang termasuk dalam kategori bekerja menurun tetapi penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja meningkat secara perlahan. Hal ini dapat diduga bahwa terjadinya penduduk yang masuk usia sekolah sedang dalam kegiatan belajar di sekolah.

Dalam program pembinaan dan pelatihan tenaga kerja, termasuk didalamnya bagaimana pemerintah dan masyarakat mempersiapkan SDM setempat agar berkualitas dan bisa mengisi lapangan kerja serta dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Sekolah dan pendidikan dalam kompetensi tertentu tampaknya perlu segera dibangun, guna mendukung program unggulan daerah. Bagaimana mengolah dan memanfaatkan SDE agar dapat menghasilkan secara optimal adalah suatu upaya yang segera dapat terwujud. Perlu mendirikan pusat-pusat pelatihan yang memiliki fungsi dan tujuan yang tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan tetapi juga informasi tentang keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan. Menyediakan informasi tentang peluang berusaha dan investasi modal, termasuk prosedur yang dapat ditempuh oleh para pengusaha dalam melaksanakan investasi.

Sektor unggulan yang dapat dijelaskan di Kabupaten Bangka menurut indikator ekonomi dengan Location Quotient adalah dilihat data dari sektoral. Sektor pertanian di Bangka termasuk didalamnya adalah perikanan dan tanaman pangan yang diusahakan oleh rakyat masih perlu dikembangkan untuk memberikan mata pencaharian masyarakat seperti tanaman hortikultura. Sedangkan sektor perkebunan terutama perkebunan rakyat, seperti lada, karet, dan coklat dan pada perkebunan besar seperti tanaman kelapa sawit merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan. Sub sektor perikanan laut dan perikanan darat banyak memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika kesempatan kerja ini dapat dikembangkan maka akan memberikan lapangan kerja yang potensial.

Permasalahan pokok yang harus dibenahi di bidang pertambangan adalah adanya tambang inkonvensional. Kabupaten Bangka merupakan daerah potensial penambangan timah. Dalam kaitannya dengan penambangan timah tersebut, Kabupaten Bangka memiliki permasalahan yang khas yang tidak dimiliki propinsi lain di Indonesia. Dari ribuan tambang inkonvensional (TI) yang beroperasi serta merusak lingkungan dan menyebabkan pencemaran limbah galian timah, belum satupun dilakukan tindakan yang memadai. Tindakan reklamasi lingkungan (tanah, air dan hutan) di Kabupaten Bangka maupun Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya, saat ini sangat memerlukan perhatian utama. Menurut Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa tambang inkonvensional

(TI) yang beroperasi sebagian besar bersifat ilegal dan merusak lingkungan yang berada dalam kawasan kuasa pertambangan PT Timah Tbk dan PT Koba Tin. Salah satu pemecahannya, kepada kedua perusahaan tersebut diharuskan membina dan mengawasi TI-TI yang berada dalam kawasan mereka.

Pemerintah daerah telah melakukan terobosan dalam menghadapi pengangguran didaerahnya, akan tetapi belum dapat mengatasi permasalahan yang sebenarnya. Sehingga perlu dikembangkan usaha kemitraan, dengan memberi peluang pada investor untuk mengembangkan usahanya, dengan memfasilitasi dengan informasi pasar tenaga kerja, pada calon pekerja agar dapat mengisi kekosongan pekerjaan yang tersedia. Langkah awal yang perlu dikembangkan adalah memberi kewenangan pada pihak investor untuk melakukan usaha sesuai dengan SDA setepat, setelah itu memberi keringanan pajak (tax holiday) pada pihak pengusaha selama beberapa tahun agar dapat memperoleh peluang selama menjalankan usahanya. Dengan harapan perkembangan usahanya akan dapat lebih menyerap tenaga kerja yang tersedia. Usaha lain terutama kepada peningkatan jumlah lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja tentu bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi bagaimana pemerintah dapat mendorong swasta atau dunia usaha untuk lebih meningkatkan usahanya guna membuka lapangan kerja. Pemerintah tentu saja perlu membuka diri untuk memberikan program kemudahan dan pemberian insentif, serta program pengembangan berusaha.

Program pembinaan dan pelatihan tenaga kerja, perlu ditekankan kepada upaya pemerintah dan masyarakat mempersiapkan SDM setempat agar berkualitas dan bisa mengisi lapangan kerja serta memberi nilai tambah ekonomi. Sekolah dan pendidikan dalam kompetensi tertentu tampaknya perlu segera dibangun, guna mendukung program unggulan daerah. Bagaimana mengolah dan memanfaatkan SDE agar dapat menghasilkan secara optimal adalah suatu upaya yang segera dapat terwujud. Ada suatu hipotesa yang tampaknya perlu diuji bahwa keinginan masyarakat mengikuti sekolah yang lebih tinggi untuk mempersiapkan kualitas SDM dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang handal di Bangka belum terlihat. Hal ini disebabkan karena propinsi tersebut belum ada universitas atau sekolah tinggi yang memiliki kualifikasi tertentu, kecuali terbatas hanya berupa politnik yang dibangun oleh PT Timah.





# LAMPIRAN

## Lampiran 1.

### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

#### Visi dan Misi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

##### *Visi*

Terwujudnya Negeri Serupun Sebalai Yang Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Amanah Dengan Meningkatkan Kualitas Masyarakat Serta Memberdayakan Semua Potensi Daerah Secara Arif dan Berwawasan Lingkungan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### *Misi*

Misi Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia disemua strata masyarakat,
2. Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik diikuti dengan terselenggaranya pemerintah yang bersih dan terbuka,
4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan semangat wirausaha.

6. Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik yang sehat.
7. Mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanah masyarakat.

## **Arahan Kebijakan Pembangunan**

Propeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merumuskan 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Penegakan pembangunan
5. Penegakan supremasi hukum
6. penanganan kenakalan remaja, madat, miras dan judi
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Pengembangan tenaga kerja dan kesempatan usaha
9. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Properda juga menetapkan 6 (enam) sektor unggulan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu, sektor tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan kelautan, sektor pariwisata, sektor industri dan sektor pertambangan.

## **Kebijakan Tata Ruang**

Dalam RTRW propinsi kepulauan Bangka Belitung arahan pengembangan kawasan budidaya adalah sebagai berikut;

- 1). Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.

Sebaran kawasan hutan produksi tetap, diarahkan menyebar hampir ke semua wilayah kabupaten Bangka dan sebagian kawasan bagian utara, timur dan tengah kabupaten Belitung.

- 2). Arahan pengelolaan kawasan pertanian.

Kawasan pertanian meliputi :

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.

Sebaran yang sesuai bagi pertanian tanaman pangan, diarahkan untuk Pulau Bangka yaitu di kecamatan mentok, Jebus, Mendo Barat, Pangkalan Baru, Toboali, Lepar Pongok, dan pulau Liat. Sedangkan Di pulau Belitung diarahkan di kecamatan Dendang, Manggar, dan Tanjungpandan.

b. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan

Arahan penyebaran penggunaan lahan bagi kawasan perkebunan di pulau Bangka, yang ditetapkan berdasarkan kriteria, menyebar di kawasan bagian utara, barat, tengah dan selatan. Sedangkan di pulau Belitung arahan penggunaan lahan bagi kawasan lahan perkebunan diarahkan pada kawasan bagian timur, utara, tengah dan barat.

3). Arahan pengelolaan kawasan perikanan

Sebaran kawasan perikanan terdapat disekitar perairan pantai dan sungai serta tambak-tambak dan kolong-kolong yang terdapat di kepulauan Bangka Belitung.

4). Arahan pengelolaan kawasan pertambangan

Sebaran kawasan pertambangan dan bahan galian golongan C menyebar hampir ke semua kawasan darat dan laut di pulau Bangka dan pulau Belitung

5). Arahan pengelolaan kawasan industri

Sebaran kawasan industri terdapat di pulau Bangka meliputi kota Pangkal Pinang, Belinju dan Mentok.

6). Arahan pengelolaan kawasan pariwisata

Sebaran kawasan pariwisata pada umumnya tersebar di kawasan bagian Barat, utara, selatan, pulau Bangka dan menyebar merata di pulau Belitung.

7). Arahan pengelolaan kawasan permukiman

Sebaran kawasan permukiman menyebar di pulau Bangka dan Belitung.

# Lampiran 2. Peta Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

